



Ikhwan Sapto Darmono
Sudarsih



Pendidikan Kewarganegaraan

untuk SD/MI Kelas V

5



PUSAT PERBUKUAN
Departemen Pendidikan Nasional

Pendidikan Kewarganegaraan

untuk SD/MI kelas V



Penyusun:
Ikhwan Sapto Darmono
Sudarsih



Pusat Perbukuan
Departemen Pendidikan Nasional

Hak Cipta pada Departemen Pendidikan Nasional
Dilindungi Undang-undang

Pendidikan Kewarganegaraan

untuk SD/MI kelas V

Penulis : Ikhwan Sapto Darmono
Sudarsih
Desain Sampul : A. Rosyid
Setting dan Layout : Nurul Huda
Dwi Wahyudi
Ukuran Buku : 17,6 x 25 cm

372.8

DAR DARMONO, Sapto Ikhwal

p

Pendidikan kewarganegaraan 5 : untuk SD/MI kelas V/
Ikhwal Sapto Darmono, Sudarsih. -- Jakarta : Pusat Perbukuan,
Departemen Pendidikan Nasional, 2008.

viii 122 hlm. ; ilus. ; 25 Cm

Bibliografi; hlm. 122

ISBN 979-462-956-1

1. Pendidikan Moral Pancasila-Studi dan Pengajaran I. Judul
II. Sudarsih

Diterbitkan oleh Pusat Perbukuan
Departemen Pendidikan Nasional
Tahun 2008

Diperbanyak oleh ...

Kata Sambutan

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya, Pemerintah, dalam hal ini, Departemen Pendidikan Nasional, pada tahun 2008, telah membeli hak cipta buku teks pelajaran ini dari penulis/penerbit untuk disebarluaskan kepada masyarakat melalui situs internet (website) Jaringan Pendidikan Nasional.

Buku teks pelajaran ini telah dinilai oleh Badan Standar Nasional Pendidikan dan telah ditetapkan sebagai buku teks pelajaran yang memenuhi syarat kelayakan untuk digunakan dalam proses pembelajaran melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2008.

Kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para penulis/penerbit yang telah berkenan mengalihkan hak cipta karyanya kepada Departemen Pendidikan Nasional untuk digunakan secara luas oleh para siswa dan guru di seluruh Indonesia.

Buku-buku teks pelajaran yang telah dialihkan hak ciptanya kepada Departemen Pendidikan Nasional ini, dapat diunduh (down load), digandakan, dicetak, dialihmediakan, atau difotokopi oleh masyarakat. Namun, untuk penggandaan yang bersifat komersial harga penjualannya harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah. Diharapkan bahwa buku teks pelajaran ini akan lebih mudah diakses sehingga siswa dan guru di seluruh Indonesia maupun sekolah Indonesia yang berada di luar negeri dapat memanfaatkan sumber belajar ini.

Kami berharap, semua pihak dapat mendukung kebijakan ini. Kepada para siswa kami ucapkan selamat belajar dan manfaatkanlah buku ini sebaik-baiknya. Kami menyadari bahwa buku ini masih perlu ditingkatkan mutunya. Oleh karena itu, saran dan kritik sangat kami harapkan.

Jakarta, Juli 2008

Kepala Pusat Perbukuan

Panduan Membaca Buku Ini

Buku ini disajikan dengan format sebagai berikut:

BAB 3 Kebebasan Berorganisasi



Berkemah adalah salah satu kegiatan yang menyenangkan dalam kegiatan pramuka. Kegiatan pramuka merupakan organisasi sekolah yang bersifat wajib bagi semua murid kelas lima. Melalui kegiatan pramuka, murid kelas lima belajar hidup mandiri dan cara-cara berorganisasi. Nah ternyata aktif dalam organisasi sekolah adalah hal penting bukan? Lalu, bagaimana dengan kamu? Apakah kamu tertarik bergabung dalam organisasi yang ada di sekolahmu?

Judul materi pelajaran.

Gambar awal bab sebagai sarana bantu dalam menginformasikan objek pelajaran.

Kalimat pengantar (apersepsi) di setiap awal bab sebelum memulai pokok bahasan sebagai stimulus bagi siswa untuk menyimak materi yang dipelajari.

Peta Konsep

```
graph TD
    KB[Kebebasan Berorganisasi] --> PO[Pengertian Organisasi]
    KB --> JJO[Jenis-jenis Organisasi]
    KB --> KBO[Kebebasan Berorganisasi]
    PO --> PKA[Menurut Kamus Administrasi]
    PO --> MKB[Menurut KBBI]
    PO --> MSP[Menurut Sondang P. Siagian]
    JJO --> DLS[Di Lingkungan Sekolah]
    JJO --> DLM[Di Lingkungan Masyarakat]
```

Setelah mempelajari materi dalam bab ini, kalian diharapkan mampu:

1. Mendeskripsikan dan menjelaskan pentingnya organisasi.
2. Menyebutkan contoh organisasi di lingkungan sekolah dan masyarakat.
3. Mengetahui fungsi-fungsi dan manfaat-manfaat yang diperoleh dari sebuah organisasi.
4. Berperan serta dalam memilih suatu organisasi.

Peta konsep merupakan bagan atau skema yang menggambarkan hubungan antar konsep-konsep dalam satu bab.

Uraian tentang batasan kompetensi yang ideal untuk dicapai siswa.

A. Pengertian Organisasi



Penyampaian materi pelajaran disusun sesederhana mungkin dengan tetap berpedoman pada rambu-rambu dalam kurikulum sehingga kompetensi benar-benar tercapai.

Gambar sebagai pendukung materi yang sudah disampaikan.



Di Sekitar Kita

Pernak-pernik “Di sekitar kita” berisi contoh aktual dan terkini yang berkaitan dengan materi pembelajaran.

Nasihat Bijak

Bekerjasamalah dengan orang lain maka kamu akan mendapat kemudahan.

Pernak-pernik “Nasihat Bijak” merupakan bentuk refleksi dari materi pembelajaran yang terkait.

Rangkuman

- Organisasi merupakan suatu perkumpulan yang anggotanya terdiri atas beberapa orang yang bekerja sama dalam upaya mencapai tujuan bersama.
- Tujuan dibentuknya organisasi adalah agar suatu kegiatan berjalan lancar

Bagian ini berisikan uraian singkat dari materi pelajaran setiap bahasan.

Glosarium

- De jure : berdasarkan hukum (pengakuan atas suatu pemerintahan)
- Demokrasi : pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat
- Fraksi : bagian kecil, pecahan, kelompok dalam DPR yang terdiri atas partai-partai politik dalam pemilu

Bagian ini berisikan istilah-istilah yang terdapat dalam materi pelajaran dan perlu dimengerti oleh siswa.

Uji Pemahaman Konsep

I. Berilah tanda silang pada huruf a, b, c, atau d di depan jawaban yang tepat!



Bagian ini berisikan soal-soal latihan dalam satu pokok bahasan setiap akhir pelajaran

Penerapan

A. *Kerjakan portofolio di bawah ini bersama kelompokmu!*

Bagian ini berisikan materi tentang penanaman sikap norma dalam bentuk uraian dan pertanyaan untuk siswa sebagai pembiasaan diri dalam berinteraksi dengan lingkungannya.

Prakata

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga buku Pendidikan Kewarganegaraan untuk SD/MI ini dapat diselesaikan.

Perubahan kurikulum tentu saja berpengaruh pada media belajar, termasuk buku pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Menyadari hal tersebut, kami berusaha mempersembahkan buku pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang tidak terkesan hanya hafalan. Dalam buku Pendidikan Kewarganegaraan untuk SD/MI ini kami lebih menekankan pada aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik secara seimbang.

Buku Pendidikan Kewarganegaraan untuk SD/MI ini diterbitkan untuk memenuhi kebutuhan media belajar yang mengacu pada standar Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Selain sesuai dengan standar pembelajaran KTSP, penyajian materi buku ini juga kami sajikan secara sistematis, sederhana, dan komunikatif sehingga mudah dimengerti siswa. Buku ini juga dilengkapi dengan format soal yang mengakomodasi ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Buku Pendidikan Kewarganegaraan untuk SD/MI ini berlaku untuk I (satu) tahun.

Akhir kata, mudah-mudahan buku ini mampu menjadi sarana peningkatan mutu pendidikan di Indonesia secara umum. Kritik dan saran tetap kami harapkan demi perbaikan buku ini.

Surakarta, 7 Mei 2008

Penulis

Daftar Isi

Kata Sambutan – iii

Panduan Membaca Buku Ini – iv

Prakata – vi

Daftar Isi – vii

Bab 1 Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) – 1

- A. Pengertian Negara Kesatuan Republik Indonesia – 3
- B. Pentingnya Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia – 11
- C. Upaya-Upaya dalam Menjaga Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia – 16

Bab 2 Peraturan Perundang-Undangan – 27

- A. Pengertian Peraturan Perundang-undangan – 29
- B. Sumber Hukum Peraturan Perundang-undangan – 32
- C. Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan – 36
- D. Peraturan Pusat – 41
- E. Peraturan Daerah – 50
- F. Pelaksanaan Peraturan – 56

Ulangan Semester 1 – 64

Bab 3 Kebebasan Berorganisasi – 69

- A. Pengertian Organisasi – 71
- B. Organisasi di Lingkungan Sekolah dan Masyarakat – 75
- C. Kebebasan Berorganisasi – 85

Bab 4 Keputusan Bersama – 93

- A. Pengertian Keputusan Bersama – *95*
- B. Bentuk-Bentuk Keputusan Bersama – *97*
- C. Cara Pengambilan Keputusan Bersama – *100*
- D. Melaksanakan Hasil Keputusan Bersama – *105*

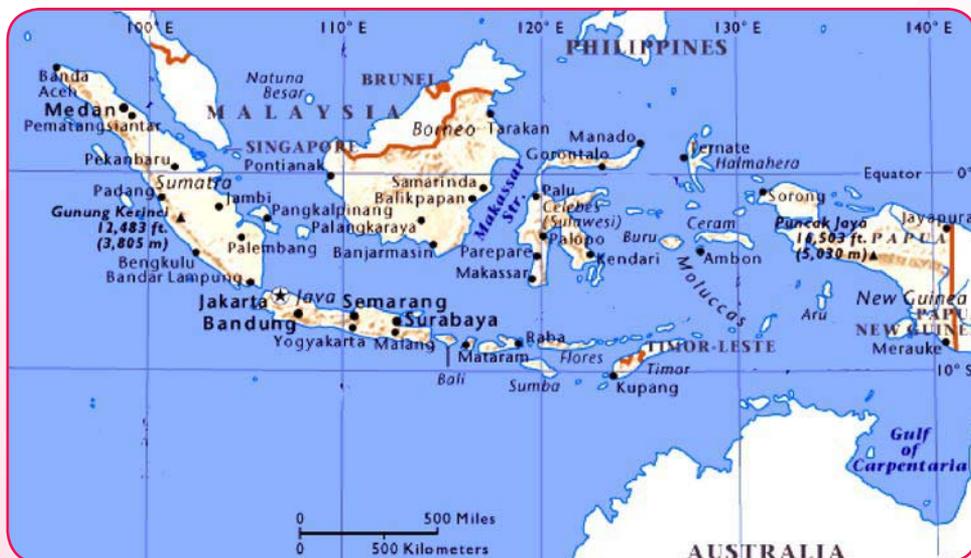
Ulangan Semester 2 – 115

Glosarium – 120

Daftar Pustaka – 122

BAB 1

KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (NKRI)



Gambar: Peta Indonesia

Sumber: agusharyadi4.blogspot.com

Negara Indonesia adalah negara kepulauan. Wilayah negara Indonesia terbentang dari Sabang sampai Merauke. Setelah melalui beberapa peristiwa penjajahan dan pemberontakan, maka Indonesia mampu mempertahankan kesatuan negara Indonesia yang dikenal dengan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Bagaimanakah proses terbentuknya NKRI? Melalui bab ini kita akan dapat menjawab pertanyaan tersebut.

Peta Konsep



Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari materi dalam subbab ini, diharapkan siswa mampu:

1. Mengetahui dan menjelaskan pengertian Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
2. Menjelaskan pentingnya keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
3. Memberikan dan menunjukkan contoh-contoh perilaku dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

A. Pengertian Negara Kesatuan Republik Indonesia

Tuhan menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna. Meskipun demikian, antara manusia yang satu dengan yang lain tidak dapat hidup sendiri. Manusia senantiasa membutuhkan orang lain. Pada akhirnya manusia hidup berkelompok-kelompok. Pada mulanya manusia hidup dalam kelompok keluarga. Selanjutnya mereka membentuk kelompok yang lebih besar seperti suku, masyarakat, bangsa, atau negara. Salah satu contoh negara di dunia ini adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apa itu Negara Kesatuan Republik Indonesia? Untuk mengetahuinya, pelajirlah uraian materi berikut secara saksama!

1. Pengertian Negara Kesatuan Republik Indonesia

Kita adalah bangsa Indonesia yang tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Definisi “bangsa” dan “negara” memiliki perbedaan. Bangsa adalah suatu masyarakat dalam suatu daerah yang sama dan mereka tunduk kepada kedaulatan negaranya. Bangsa juga merupakan persekutuan hidup yang berdiri sendiri dan setiap anggota persekutuan hidup tersebut merasa memiliki kesatuan ras, bahasa, agama, dan adat istiadat.

Berdasarkan pengertian tersebut bangsa memiliki ciri-ciri sebagai berikut.

- a. Sekelompok manusia yang memiliki rasa kebersamaan.
- b. Memiliki wilayah tertentu, tetapi tidak memiliki pemerintah sendiri.
- c. Ada kehendak bersama untuk membentuk atau berada di bawah pemerintahan yang dibuatnya sendiri.
- d. Keanggotaan orangnya bersifat kebangsaan atau nasionalitas.
- e. Tidak dapat ditentukan secara pasti waktu kelahirannya, misalnya bangsa Indonesia tidak diketahui secara pasti kapan mulai ada bangsa Indonesia.
- f. Dapat terjadi karena kesamaan identitas budaya, agama, dan bahasa sehingga dapat dibedakan dengan bangsa lainnya. Bangsa yang mempunyai identitas sama seperti ini adalah bangsa yang homogen (sama).

Negara adalah bentuk organisasi dari masyarakat atau kelompok orang yang mempunyai kekuasaan mengatur hubungan, menyelenggarakan ketertiban, dan menetapkan tujuan-tujuan dari kehidupan bersama.

Beberapa pengertian negara antara lain:

- a. Beberapa kelompok manusia yang bersama-sama mendiami wilayah tertentu dengan mengakui adanya suatu pemerintahan yang mengurus tata tertib dan keselamatan sekelompok atau beberapa kelompok manusia.
- b. Suatu daerah teritorial yang bersama-sama diperintah oleh sejumlah pejabat yang berhasil menuntut warganya dalam ketaatan pada perundang-undangan melalui penguasaan kontrol dari kekuasaan yang sah.

Dari beberapa pendapat tentang pengertian negara di atas, maka secara teoritis negara memiliki unsur sebagai berikut.

a. *Unsur Konstitutif*

Unsur konstitutif merupakan unsur mutlak pembentuk atau unsur yang harus ada untuk terjadinya negara. Unsur tersebut mencakup wilayah (darat, udara, dan perairan), rakyat atau masyarakat, serta pemerintah yang berdaulat.

b. Unsur Deklaratif

Unsur deklaratif merupakan unsur yang bersifat pernyataan dan melengkapi unsur konstitutif. Unsur ini meliputi adanya tujuan negara, undang-undang dasar, pengakuan dari negara lain secara *de jure* ataupun *de facto*.

Secara umum, suatu negara dikatakan terbentuk dengan terpenuhinya unsur-unsur negara, yaitu adanya pemerintahan yang berdaulat, bangsa, dan wilayah terpenuhi. Selain unsur-unsur negara, adapula unsur-unsur tambahan lain sebagai syarat terbentuknya dan diakuinya suatu negara oleh bangsa dan negara lain.



Gambar 1.1 Rakyat merupakan unsur konstitutif berdirinya sebuah negara.
Sumber: Encharta Encyclopedia

2. Proses Terjadinya Negara Kesatuan Republik Indonesia

Bagi bangsa Indonesia terjadinya negara merupakan proses yang melalui berbagai tahap, yaitu:

a. Perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia

Terjadinya negara merupakan suatu proses yang tidak hanya diambil dari proklamasi, tetapi dari perjuangan bangsa Indonesia yang menuntut kemerdekaan, sehingga membentuk ideologi (ide-ide dasar yang dicita-citakan).

Sejarah mencatat sebelum abad ke-16, kehidupan bangsa Indonesia rukun dan damai. Tetapi setelah para penjajah dari negara Barat datang, keutuhan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara mulai retak. Para penjajah, khususnya Belanda, menerapkan politik adu domba, memecah belah, saling menghasut, memfitnah antara satu kelompok dengan kelompok lainnya. Pada akhirnya hubungan antara satu dengan lainnya retak.

Dalam situasi yang tidak akur dan terpecah belah tersebut, penjajah masuk menyusup dengan mudah. Perang saudara tidak terelakkan lagi. Akhirnya setiap daerah berjuang sendiri-sendiri. Pangeran Diponegoro yang berasal dari Jawa Tengah, Tuanku Imam Bonjol dari Sumatra Barat, adalah contoh tokoh pahlawan yang gigih berani melawan penjajah. Namun perjuangan kedua tokoh tersebut gagal karena perjuangan mereka bersifat kedaerahan. Bahkan Pangeran Diponegoro ditangkang dan dibuang ke luar Pulau Jawa. Beliau di pengasingan sampai akhirnya wafat.

Dari Aceh muncul tokoh Cut Nyak Dien, Teuku Umar, dan Cut Meutia. Mereka berjuang melawan penjajah, tetapi juga belum berhasil. Pahlawan dari wilayah Timur di antaranya Kapitan Pattimura yang berasal dari Ambon dengan dibantu teman-temannya. Pangeran Antasari dari Kalimantan Selatan pun berjuang melawan penjajah tetapi belum berhasil juga. Bahkan Kapitan Pattimura atau Thomas Matulesi gugur di tiang gantungan. Dari Ujung Pandang, ada Sultan Hasanuddin yang gigih dan perkasa mengusir penjajah, walaupun kandas juga. Sultan Hasanuddin terkenal dengan julukan “Ayam Jantan dari Timur”.



Gambar 1. 2 Sultan Hasanuddin dijuluki sebagai *Ayam Jantan dari Timur*.

Sumber: Ensiklopedi Nasional Indonesia

b. Proklamasi sebagai pintu gerbang kemerdekaan

Setelah melalui perjuangan yang panjang akhirnya terbentuklah negara Indonesia. Proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 mengantarkan bangsa Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan. Dengan negara yang berdaulat, lepas dari cengkeraman penjajah, bangsa Indonesia dapat meraih cita-cita dan meningkatkan taraf hidupnya.



Gambar 1. 3 Presiden Ir. Soekarno memproklamasikan kemerdekaan bersama dengan Drs. Mohammad Hatta.

Sumber: Ensiklopedi Nasional Indonesia

c. Terjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia

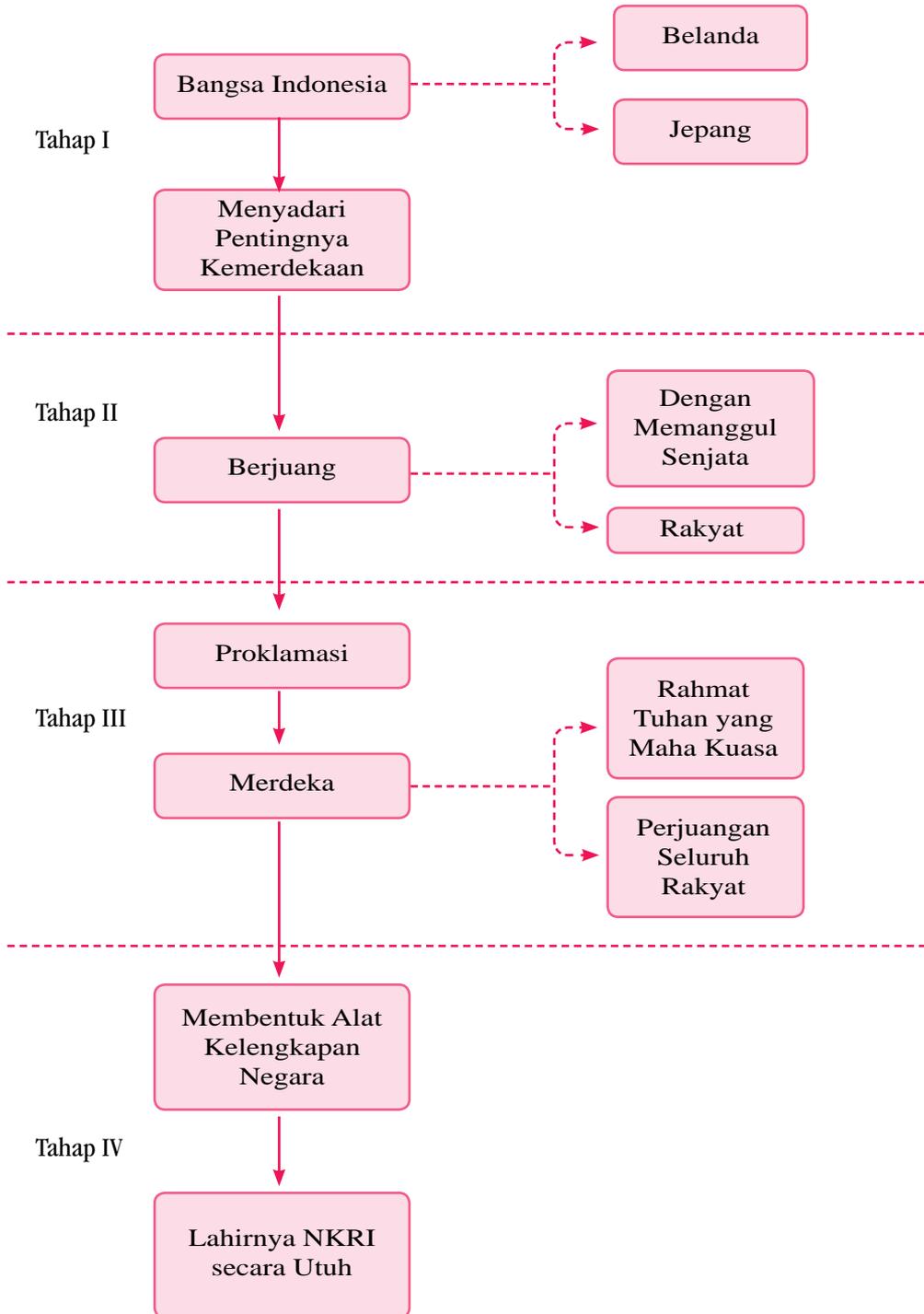
Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk melalui proses dan tahapan yang panjang. Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk karena beberapa faktor, yaitu:

- 1) Adanya persamaan nasib, yaitu penderitaan bersama di bawah penjajahan bangsa asing selama kurang lebih 350 tahun.
- 2) Adanya keinginan bersama untuk merdeka dan melepaskan diri dari belenggu penjajahan.
- 3) Adanya kesatuan tempat tinggal, yaitu wilayah Nusantara yang terbentang dari Sabang sampai Merauke.
- 4) Adanya cita-cita bersama untuk mencapai kemakmuran dan keadilan sebagai suatu bangsa.

Faktor-faktor pembentuk bangsa Indonesia tersebut, secara bertahap telah melahirkan negara Indonesia. Secara runtut, perkembangan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah:

- 1) Adanya kesadaran dari seluruh bangsa Indonesia bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Bangsa Indonesia memiliki tekad kuat untuk menghapus segala penindasan dan penjajahan yang ada di Indonesia.
- 2) Kesadaran akan hak kemerdekaan tersebut mendorong bangsa Indonesia untuk berjuang melawan penjajah. Perjuangan panjang bangsa Indonesia menghasilkan proklamasi. Proklamasi inilah yang mengantarkan bangsa Indonesia ke pintu gerbang kemerdekaan.
- 3) Terjadinya negara Indonesia adalah kehendak bersama seluruh rakyat Indonesia dan atas rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa.
- 4) Setelah merdeka, negara Indonesia menyusun alat-alat kelengkapan negara yang meliputi tujuan negara, bentuk negara, sistem pemerintahan negara, UUD negara, dan dasar negara. Dengan demikian, sempurna lah Indonesia sebagai sebuah negara.

Perhatikan bagan di bawah ini untuk mempermudah memahami proses terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia





Di Sekitar Kita

Tokoh-tokoh yang berjasa dalam memproklamasikan berdirinya NKRI.

a. Ir. Soekarno

Soekarno lahir di Blitar, Jawa Timur pada tanggal 6 Juni 1901. Soekarno merupakan lulusan *Techische Hoge School* (sekarang ITB) Bandung.

Pada tanggal 4 Juli 1927, Soekarno mendirikan Partai Nasional Indonesia (PNI). Lewat pidato dan kritiknya yang tajam, Soekarno sering keluar masuk penjara pemerintahan Belanda. Bersama Drs. Mohammad Hatta, pada tanggal 17 Agustus 1945, beliau memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Setelah kemerdekaan, Soekarno menjabat sebagai presiden Republik Indonesia yang pertama. Ir. Soekarno wafat pada tanggal 21 Juni 1970 di Jakarta dan dimakamkan di Blitar Jawa Timur.



b. Drs. Mohammad Hatta

Mohammad Hatta lahir di Bukittinggi pada tanggal 12 Agustus 1902. Beliau melanjutkan sekolah Rotterdam, Belanda, tepatnya di Sekolah Tinggi Ekonomi Negera Belanda.

Mohammad Hatta aktif dalam organisasi Jong Sumatra dan ketika di Belanda, beliau mendirikan organisasi Perhimpunan Indonesia (PI). Pada tanggal 17 Agustus 1945 beliau mendampingi Ir. Soekarno membacakan teks proklamasi. Mohammad Hatta juga dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Mohammad Hatta wafat pada tanggal 14 Maret 1980 di Jakarta.



c. Ahmad Soebardjo

Ahmad Soebardjo terkenal sebagai konseptor dalam penulisan naskah teks proklamasi dan Pembukaan UUD 1945. Beliau adalah yang menjamin Ir. Soekarno dan Mohammad Hatta dengan nyawanya ketika terjadi peristiwa Rengasdengklok.



3. Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Negara merupakan perkumpulan manusia yang hidup dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Tujuan negara bermacam-macam, di antaranya memperluas kekuasaan, menyelenggarakan ketertiban umum, dan menciptakan kebahagiaan bagi rakyatnya. Tujuan Negara Republik Indonesia tercantum di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945, yaitu:

- Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
- Memajukan kesejahteraan umum.
- Mencerdaskan kehidupan bangsa.
- Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Keempat tujuan tersebut didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.



Gambar 1. 4 Negara memiliki tujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.
Sumber: Dokumentasi

4. Fungsi Negara Kesatuan Republik Indonesia

Ada banyak fungsi negara yang perlu diketahui. Beberapa fungsi mutlak dari setiap negara adalah sebagai berikut.

a. Melaksanakan penertiban

Fungsi negara sebagai penertiban, yaitu untuk mencapai tujuan bersama dan mencegah bentrokan-bentrokan di dalam masyarakat, sehingga masyarakat tetap stabil.

b. Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat

Fungsi ini dianggap sangat penting terutama bagi negara-negara baru. Pemerintah Indonesia menerapkan fungsi ini ke dalam bentuk Repelita (Rencana Pembangunan Lima Tahun)

c. Pertahanan

Fungsi ini untuk menjaga kemungkinan serangan dari luar. Untuk menjaga kondisi keamanan, negara memfasilitasi angkatan perangnya dengan peralatan yang lengkap beserta peralatan pertahanannya.

d. Menegakkan keadilan

Fungsi ini diharapkan dapat menciptakan supremasi hukum.

Kemudian apa fungsi Negara Kesatuan Republik Indonesia? Menurut E. Mirriam Budiardjo, fungsi negara yang sesuai dengan kondisi di negara Indonesia adalah:

- a. keamanan ekstern,
- b. ketertiban intern,
- c. keadilan,
- d. kesejahteraan umum, dan
- e. kebebasan.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa tugas-tugas pemerintah dalam mengurus rumah tangga meliputi:

a. Fungsi reguler

Dalam hal ini, pemerintah menjalankan fungsinya berkaitan dengan pelaksanaan tugas yang mempunyai akibat langsung yang dirasakan oleh seluruh masyarakat.

Fungsi reguler pemerintah antara lain:

- 1) Negara sebagai negara politik, yaitu pemeliharaan ketenangan dan ketertiban, serta pertahanan dan keamanan.
- 2) Negara sebagai diplomatik, yaitu menjalankan kerukunan dan persahabatan dengan negara-negara lain terutama negara tetangga.
- 3) Negara sebagai sumber hukum, yaitu pemerintah harus bertindak adil terhadap warga negaranya melindungi hak/harta benda setiap warganya dari gangguan anggota masyarakat lainnya.
- 4) Negara sebagai administratif, fungsi ini menitikberatkan pada kekuatan di tangan rakyat, pemerintah hanya menerima pendelegasian yang diberikan rakyat melalui wakil-wakilnya di MPR dan DPR.

b. Fungsi Perkembangan

1) Fungsi stabilisator

Dalam hal ini pemerintah wajib melaksanakan fungsi sebagai berikut.

a) Stabilitas politik

Stabilitas politik bertujuan menetapkan suasana politik yang aman dan keutuhan persatuan bangsa baik faktor-faktor ekonomi maupun faktor-faktor ideologis.

b) Stabilitas ekonomi

Stabilitas ini menciptakan perekonomian yang stabil dan mantap seperti menghilangkan inflasi, meningkatkan pendapatan masyarakat, memperluas kesempatan kerja, dan lain-lain.

c) Stabilitas sosial budaya

Stabilitas ini bertujuan menghilangkan dan mengurangi pembangunan yang menghambat.

2) Sebagai inovator

Negara menciptakan ide-ide baru terutama berhubungan dengan pembangunan. Presiden memiliki wewenang untuk melaksanakan pembangunan.



Latihan Soal 1.1

A. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan jawaban yang benar!

1. Apakah yang dimaksud dengan negara?
2. Bagaimanakah terjadinya Negara Kesatuan Republik Indonesia?
3. Unsur negara secara teoritis terdiri dari unsur konstitutif dan unsur deklaratif. Jelaskan perbedaan antara kedua unsur tersebut!
4. Sebutkan ciri-ciri suatu bangsa!
5. Sebutkan 5 fungsi yang sesuai dengan negara Indonesia menurut E. Mirriam Budiardjo!

B. Amatilah kotak-kotak yang berisi huruf di bawah ini! Kemudian cari dan lingkarilah susunan huruf yang membentuk nama atau ibu kota provinsi yang termasuk Negara Kesatuan Republik Indonesia!

M	A	K	A	S	S	A	R	K	G
E	P	S	D	U	L	A	B	U	O
M	A	T	A	R	A	M	A	P	R
B	L	E	Y	A	S	K	N	K	O
R	E	R	O	B	K	L	P	U	N
A	M	N	G	Y	K	O	U	P	T
N	B	A	Y	A	L	P	N	A	A
O	A	T	A	F	I	I	G	N	L
K	N	E	K	D	G	L	H	G	O
U	G	R	A	S	A	P	N	E	D



Tugas Mandiri

Carilah informasi dari buku-buku sejarah atau referensi lain tentang faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya NKRI!

Tulis dalam kertas folio, kemudian kumpulkan pada gurumu!



Tugas Kelompok

Perhatikan peta Indonesia di bawah ini lalu kerjakan tugas-tugas di bawahnya!



Gambar Peta Indonesia

Sumber: agusharyadi4.blogspot.com

1. **Perhatikan peta di atas!**

Bersama kelompokmu, temukan provinsi-provinsi yang menjadi wilayah NKRI pada awal kemerdekaan!

2. **Tulis nama masing-masing provinsi tersebut kemudian tandailah masing-masing provinsi tersebut untuk membedakannya dengan wilayah yang tidak termasuk dalam NKRI pada awal kemerdekaan!**

B. Pentingnya Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Negara Kesatuan Republik Indonesia dianugerahi wilayah yang luas dan kekayaan alam yang beraneka ragam untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Oleh karena itu, semua rakyat Indonesia berkewajiban untuk melindungi dan mempertahankan wilayah Indonesia agar tetap utuh.

Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak berdiri dengan sendirinya, tetapi melalui perjuangan para pejuang yang dilakukan dengan proses yang sangat panjang. Mereka telah mengorbankan harta dan bahkan nyawa mereka demi Indonesia tercinta, sehingga para pejuang dan pendiri Indonesia sudah bertekad bahwa bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan pilihan terakhir.

1. Pengertian Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, keutuhan berasal dari kata dasar utuh yang berarti dalam keadaan sempurna seperti semula. Utuh juga berarti tidak bercerai berai atau tidak terpecah belah. Jadi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia artinya adalah bahwa Indonesia merupakan negara kesatuan yang memiliki kedaulatan, memiliki tujuan nasional, dan berdiri secara utuh baik wilayahnya, rakyatnya, ataupun pemerintahnya.

Keutuhan NKRI juga ditunjukkan melalui hal-hal berikut:

- Indonesia yang utuh dan tidak mudah terpecah belah.
- Hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya baik.
- Tidak ada pergolakan, peperangan, pemberontakan ataupun perpecahan di antara rakyat.
- Situasi negara yang aman, nyaman, dan damai.

Jika Indonesia bisa mencapai keempat butir di atas maka Indonesia adalah negara yang utuh.

Sejak proklamasi kemerdekaan, keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia mengalami pasang surut. Gangguan demi gangguan yang berusaha membubarkan Republik Indonesia sudah banyak terjadi, baik yang berasal dari luar maupun dari dalam negeri. Misalnya, pemberontakan PKI di Madiun, PRRI Semesta, Pemberontakan Kahar Muzakar, Pemberontakan Republik Maluku Selatan, Pemberontakan G 30 S/PKI, Gerakan Aceh Merdeka, dan Organisasi Papua Merdeka. Semua peristiwa yang berusaha



Gambar 1. 5 GAM merupakan salah satu peristiwa yang mengancam keutuhan NKRI.
Sumber: www.solopos.net

memecah dan menghancurkan Negara Kesatuan Republik Indonesia tersebut berhasil digagalkan oleh tekad segenap bangsa Indonesia untuk tetap mempertahankan keutuhan dan kesatuan Republik Indonesia.

Kita harus selalu waspada terhadap ancaman dan gangguan yang ingin memecah belah bangsa Indonesia. Rakyat Indonesia harus membangun rasa kebersamaan dan menjadikan perbedaan sebagai sumber kekuatan bersama.

Negara Indonesia merupakan negara kepulauan, karena terdiri atas pulau-pulau besar dan kecil. Wilayahnya membentang dari Sabang sampai Merauke. Negara Indonesia disebut juga negara maritim karena pulau-pulainya dikelilingi oleh lautan yang luas. Bahkan luas perairan negara Indonesia lebih besar daripada luas daratan. Seluruh wilayah kepulauan Indonesia disebut sebagai Nusantara.

Negara kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Wilayah ini terbagi atas beberapa provinsi. Tiap-tiap provinsi dikepalai oleh seorang gubernur. Saat ini Indonesia terdiri dari 33 provinsi. Perhatikanlah tabel yang mencantumkan beberapa provinsi berikut ini!

Provinsi-provinsi Negara Kesatuan Republik Indonesia

No.	Nama Provinsi	Ibu Kota	No.	Nama Provinsi	Ibu Kota
1.	NAD	Banda Aceh	18.	Kalimantan Tengah	Palangkaraya
2.	Sumatra Utara	Medan	19.	Kalimantan Selatan	Banjarmasin
3.	Sumatra Barat	Padang	20.	Kalimantan Timur	Samarinda
4.	Riau	Pekan Baru	21.	Sulawesi Utara	Manado
5.	Kepulauan Riau	Batam	22.	Gorontalo	Gorontalo
6.	Jambi	Jambi	23.	Sulawesi Tengah	Palu
7.	Sumatra Selatan	Palembang	24.	Sulawesi Selatan	Makassar
8.	Bangka Belitung	Pangkal Pinang	25.	Sulawesi Tenggara	Kendari
9.	Bengkulu	Bengkulu	26.	Sulawesi Barat	Mamuju
10.	Lampung	Bandar Lampung	27.	Bali	Denpasar
11.	DKI Jakarta	Jakarta	28.	Nusa Tenggara Barat	Mataram
12.	Jawa Barat	Bandung	29.	Nusa Tenggara Timur	Kupang
13.	Banten	Serang	30.	Maluku	Ambon
14.	Jawa Tengah	Semarang	31.	Maluku Utara	Ternate
15.	DI Yogyakarta	Yogyakarta	32.	Papua Barat	Manokwari
16.	Jawa Timur	Surabaya	33.	Papua	Jayapura
17.	Kalimantan Barat	Pontianak			

Dari tabel tersebut, terlihat betapa luasnya wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga kita perlu menjaga dan mempertahankan keutuhannya.

Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam. Kekayaan alam ini dimanfaatkan dan digunakan untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Sehingga semua warga dan rakyat Indonesia berkewajiban melindungi dan mempertahankan wilayah Indonesia agar tetap utuh. Keutuhan wilayah ini sangat penting karena mengingat kemajemukan bangsa Indonesia.

Nasihat Bijak

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kita mengenal istilah "Tri Kerukunan Umat Beragama". Isi Tri Kerukunan Umat Beragama meliputi 3 hal, yaitu:

1. Kerukunan intern umat beragama.
2. Kerukunan antarumat beragama.
3. Kerukunan umat beragama dengan pemerintah.

Keutuhan wilayah sebuah negara sangat penting, karena keutuhan wilayah suatu negara sangat menentukan berlangsung tidaknya pemerintahan suatu negara. Maka, semua negara berusaha untuk menjaga keutuhan wilayahnya. Demikian juga dengan negara Indonesia yang selalu berusaha untuk menjaga keutuhan wilayahnya termasuk di dalamnya pemerintah dan aparat keamanan untuk bersama-sama dan bersatu padu menjaga keamanan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia diperlukan sikap-sikap:

a. *Cinta tanah air*

Sebagai warga negara Indonesia kita wajib mempunyai rasa cinta terhadap tanah air. Cinta tanah air dan bangsa dapat diwujudkan dalam berbagai hal, antara lain:

- 1) Menjaga keamanan wilayah negaranya dari ancaman yang datang dari luar maupun dari dalam negeri.
- 2) Menjaga kelestarian lingkungan dan mencegah terjadinya pencemaran lingkungan.
- 3) Mengolah kekayaan alam dengan menjaga ekosistem guna meningkatkan kesejahteraan rakyat.
- 4) Rajin belajar guna menguasai ilmu pengetahuan dari berbagai disiplin untuk diabdikan kepada negara.

b. *Membina persatuan dan kesatuan*

Pembinaan persatuan dan kesatuan harus dilakukan di manapun kita berada, baik di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Tindakan yang menunjukkan usaha membina persatuan dan kesatuan, antara lain:

- 1) Menyelenggarakan kerja sama antardaerah.
- 2) Menjalin pergaulan antarsuku bangsa.
- 3) Memberi bantuan tanpa membedakan suku bangsa atau asal daerah.
- 4) Mempelajari berbagai kesenian dari daerah lain.



Gambar 1. 6 Peringatan Hari Jadi Kemerdekaan Republik Indonesia merupakan wujud cinta tanah air.

Sumber: www.kompas.com



Gambar 1. 7 Mempelajari berbagai tarian dari daerah lain merupakan wujud membina persatuan dan kesatuan.

Sumber: www.balipost.co.id

- 5) Memperluas pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa.
- 6) Mengerti dan merasakan kesedihan dan penderitaan orang lain, serta tidak mudah marah atau menyimpan dendam.
- 7) Menerima teman tanpa mempertimbangkan perbedaan suku, agama, maupun bahasa dan kebudayaan

c. *Rela Berkorban*

Sikap rela berkorban adalah sikap yang mencerminkan adanya kesediaan dan keikhlasan memberikan sesuatu yang dimiliki untuk orang lain, walaupun akan menimbulkan penderitaan bagi diri sendiri. Dalam pengertian yang lebih sederhana, rela berkorban adalah sikap dan perilaku yang tindakannya dilakukan dengan ikhlas serta mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan diri sendiri. Sikap rela berkorban ditunjukkan dengan cara membiasakan merelakan sebagian kepentingan kita untuk kepentingan orang lain atau kepentingan bersama.

Pelaksanaan sikap rela berkorban antara lain:

- 1) Di rumah
 - a) Menunda acara bermain untuk membantu pekerjaan ibu.
 - b) Menunda rencana berkemah bersama teman-teman karena harus menunggu anggota keluarga yang sedang sakit.
- 2) Di sekolah
 - a) Memberi iuran bila ada teman yang kena musibah.
 - b) Mau berangkat lebih pagi untuk melaksanakan piket kelas.
 - c) Memberikan sumbangan untuk PMI (Palang Merah Indonesia).



Gambar 1. 8 Mengikuti PMI adalah wujud sikap rela berkorban demi keutuhan NKRI.
Sumber: www.palangmerah.org

- 3) Di masyarakat
 - a) Menunda pergi piknik ketika ada acara kerja bakti di kampung.
 - b) Membatalkan perayaan ulang tahun di rumah karena ada tetangga di sebelah rumah yang sedang sakit keras.



Latihan Soal 1.2

A. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan jawaban yang benar!

1. Keutuhan wilayah suatu negara sangat menentukan berlangsung tidaknya pemerintahan sebuah negara. Mengapa demikian? Jelaskan pendapatmu!
2. Jelaskan pentingnya keutuhan NKRI!
3. Sikap apa saja yang harus dimiliki oleh bangsa Indonesia untuk melindungi keutuhan NKRI?
4. Sebutkan alat pemersatu bangsa Indonesia untuk menjaga keutuhan NKRI!
5. Apa yang dimaksud dengan Nusantara?

B. Carilah informasi dari buku-buku sejarah atau buku-buku referensi lainnya tentang peristiwa-peristiwa yang ingin menghancurkan NKRI! Tulislah jawabanmu di dalam tabel berikut ini, dan tuliskan pula pengaruh peristiwa tersebut terhadap keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia!

No.	Nama Peristiwa	Tokoh Pejuang NKRI	Tokoh Pemberontak	Tujuan Pemberontakan	Pengaruh Keutuhan NKRI
1.	Pemberontakan G 30 S/PKI				
2.					
3.					
4.					
5.					



Tugas Mandiri

Carilah informasi di buku-buku sejarah, majalah, koran, atau referensi lain tentang peranan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam menjaga keutuhan wilayah NKRI! Kumpulkan informasi tersebut, kemudian buatlah kliping dan kumpulkan pada gurumu!



Tugas Kelompok

Menjaga keutuhan bangsa juga dapat dilakukan di lingkungan sekolah.

Lakukan kunjungan ke sekolah lain yang dekat dengan sekolahmu! Mintalah izin kepada pihak sekolah tersebut untuk mengamati lingkungannya! Tuliskan hal-hal yang dapat menjaga keutuhan lingkungan sekolah tersebut, diskusikan bersama kelompokmu dan presentasikan di depan kelas pada kesempatan lain!

C. Upaya-Upaya dalam Menjaga Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Setiap rakyat Indonesia mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai generasi penerus bangsa, kita juga harus turut serta dalam menjaga dan mempertahankan keutuhan NKRI. UUD 1945 Pasal 30 Ayat (1) dan (2) mengatur hal ini. Pada pasal tersebut dinyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Usaha pertahanan dan keamanan rakyat dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Isi pasal tersebut juga menunjukkan bahwa partisipasi warga negara sangat penting untuk menjaga keutuhan negara dan berlangsungnya pemerintahan.

Keikutsertaan rakyat dalam usaha membela negara demi menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat dilakukan melalui bela negara secara fisik dan nonfisik.

1. Bela Negara Secara Fisik



Gambar 1.9 Bela negara secara fisik dapat diwujudkan melalui keanggotaan TNI.

Sumber: www.tni.mil.id

Menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, keikutsertaan warga negara dalam usaha bela negara dapat dilakukan dengan cara bergabung dalam:

- a. Anggota TNI
- b. Jajaran Kepolisian RI (Polri)
- c. Pelatihan dasar kemiliteran, seperti Rakyat Terlatih (Ratih), pertahanan rakyat semesta (Permesta), dan lain-lain.

2. Bela Negara secara Nonfisik

Berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 2002, keikutsertaan warga negara dalam bela negara secara nonfisik dapat dilakukan melalui berbagai bentuk, misalnya:

- a. Meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara dengan cara menghargai perbedaan pendapat dan tidak memaksakan kehendak kita kepada orang lain.
- b. Menanamkan kecintaan terhadap tanah air, melalui pengabdian tulus dalam membangun masyarakat.
- c. Berperan serta dalam memajukan bangsa dan negara dengan karya nyata.
- d. Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku dan menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menangkai pengaruh-pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan norma-norma kehidupan bangsa Indonesia dengan lebih bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.



Di Sekitar Kita

Sebagai seorang pelajar, kita juga wajib membela negara kita. Wujud partisipasi kita dalam usaha bela negara dapat dilakukan dengan berbagai cara, di antaranya:

1. Menghormati jasa para pahlawan.
2. Bangga memiliki dan menggunakan bahasa Indonesia.
3. Menghormati dan menghargai bendera Merah Putih.
4. Melestarikan dan mencintai budaya daerah.
5. Menggunakan barang-barang dari dalam negeri.

Selain melalui bela negara secara fisik dan nonfisik, partisipasi rakyat dalam menjaga keutuhan NKRI dapat dimulai dari lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat.

1. Lingkungan Keluarga

Keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan yang lebih besar. Oleh karena itu, setiap anggota keluarga harus dapat menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan keluarga.

Keamanan dan ketertiban keluarga dapat terwujud jika di dalam keluarga ada kepatuhan dan ketaatan terhadap aturan keluarga, tata krama, dan adat istiadat.



Gambar 1.10 Keluarga merupakan unit terkecil dalam upaya bela negara.

Sumber: Dokumentasi

Jadi, apabila setiap anggota keluarga telah memiliki kepatuhan dan ketaatan terhadap tata krama dan aturan keluarga, maka akan terciptalah kehidupan yang harmonis, rukun, dan damai. Adapun hal-hal yang dapat mendukung suasana harmonis dalam keluarga, antara lain:

- beribadah bersama,
- saling mencintai, menghargai, dan tolong menolong antaranggota keluarga.
- mengakui keberadaan dan fungsi atau kedudukan masing-masing anggota keluarga,
- menghargai pendapat satu sama lain, dan sebagainya.

2. Lingkungan Sekolah

Di dalam lingkungan sekolah ada tata tertib yang harus ditaati oleh seluruh warga sekolah. Tata tertib di sekolah bertujuan untuk menciptakan ketertiban, kelancaran, dan keamanan sekolah dalam proses kegiatan belajar mengajar. Jika semua warga sekolah menaati tata tertib maka keamanan, kenyamanan, dan keberhasilan belajar dapat dicapai. Sebaliknya, bila warga sekolah tidak menaati tata tertib maka akan terjadi kekacauan dalam kegiatan belajar mengajar. Selain itu, menjaga tata tertib di sekolah juga dapat meningkatkan persatuan dan kesatuan.

Adapun hal-hal yang dapat dilakukan untuk menjaga persatuan dan kesatuan di sekolah antara lain:

- Melaksanakan 6K (keamanan, kebersihan, ketertiban, keindahan, kekeluargaan, dan kerindangan) di lingkungan sekolah masing-masing.
- Berperan aktif dalam kegiatan UKS, PMR, pramuka, OSIS, olahraga, dan kesenian.
- Aktif belajar, mematuhi tata tertib, hormat kepada bapak/ibu guru, kepala sekolah, dan semua karyawan di sekolah.
- Mempunyai kepedulian sosial, misalnya memberi sumbangan bila ada bencana alam, membantu kegiatan donor darah PMI, dan sebagainya.

3. Lingkungan Masyarakat

Masyarakat adalah bagian dari suatu negara, sehingga masyarakat dapat memengaruhi persatuan dan kesatuan bangsa dan negara yang bersangkutan. Masyarakat yang terdiri atas berbagai individu dengan berbagai sikap dan kehendak akan mengalami kekacauan jika tidak memiliki tata tertib di masyarakat. Oleh karena itu, perlu dibuat tata tertib yang mengatur kehidupan bermasyarakat, agar dapat mewujudkan lingkungan yang aman, tertib, serta menjaga persatuan dan kesatuan. Agar tujuan tersebut dapat dicapai maka semua warga masyarakat harus berpartisipasi dalam menjaga keamanan di lingkungan masyarakat.

Adapun contoh-contoh kegiatan di masyarakat sebagai wujud peran serta dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, antara lain:



Gambar 1. 11 Aktif dalam kegiatan pramuka merupakan wujud menjaga keutuhan NKRI di lingkungan sekolah.

Sumber: Dokumentasi

- a. Kerja bakti dan gotong royong membersihkan lingkungan dan sarana prasarana hidup milik umum.
- b. Saling menghormati dan bekerja sama.
- c. Toleransi antarumat beragama dan penganut kepercayaan.
- d. Ikut ronda malam bagi yang sudah dewasa sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- e. Rela berkorban untuk kepentingan bersama bagi bangsa dan negara.

Dengan ikut menjaga keamanan, ketertiban, dan ketenteraman di lingkungan masyarakat, kita akan dapat:

- a. Menciptakan keamanan lingkungan sehingga warga tidak merasa takut dan gelisah.
- b. Menciptakan ketenangan dan ketenteraman hidup.
- c. Menciptakan suasana yang teratur sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- d. Menciptakan kehidupan yang menyejukkan hati, tidak ada kerusuhan, dan tidak ada kekacauan.
- e. Menjaga keutuhan wilayah Indonesia.

Selain hal-hal yang telah disebutkan di atas, kita sebagai warga negara Indonesia harus bangga, karena dengan adat istiadat yang berbeda, persatuan dan kesatuan masih tetap terjaga. Jadi, upaya yang perlu dilakukan bagi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah kita harus memahami dan mengamalkan semboyan “Bhinneka Tunggal Ika” yang terdapat pada pita yang digenggam oleh burung Garuda Pancasila.

Istilah Bhinneka Tunggal Ika ini diambil dari Kitab Sutasoma karangan Mpu Tantular, yang berarti walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Semboyan ini sangat cocok bagi bangsa Indonesia dan perlu diimban. Seperti kita ketahui, bahwa bangsa Indonesia terdiri dari beragam suku bangsa, maka hal itu jangan sampai menjadi penghalang bagi bangsa Indonesia untuk bersatu menjaga dan mewujudkan satu kesatuan Negara Republik Indonesia.

Melalui semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini, kita harus dapat menjadikan pegangan bagi masyarakat untuk mewujudkan keutuhan NKRI. Semboyan ini mengajarkan kita untuk menghindari perpecahan karena adanya perbedaan. Perbedaan yang ada justru dapat dijadikan sebagai kekayaan bangsa, sebagai modal dalam mengembangkan dan memajukan bangsa Indonesia.



Gambar 1.12 Gotong royong adalah contoh kegiatan yang mencerminkan upaya menjaga keutuhan NKRI di lingkungan masyarakat.

Sumber: *Pustaka Pengetahuan Modern*



Gambar 1.13 Semboyan Bhinneka Tunggal Ika terdapat pada lambang burung Garuda Pancasila.

Sumber: *Ensiklopedi Pelajar*



Latihan Soal 1.3

A. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan jawaban yang benar!

1. Keikutsertaan rakyat dalam usaha membela negara dalam menjaga keutuhan NKRI dapat dilakukan melalui bela negara secara fisik dan non fisik. Jelaskan kedua hal tentang bela negara tersebut!
2. Bagaimanakah isi Pasal 30 Ayat (1) dan (2) UUD 1945?
3. Bagaimana bentuk partisipasi rakyat dalam menjaga keutuhan NKRI?
4. Apa yang dimaksud dengan semboyan “Bhinneka Tunggal Ika”?
5. Sebutkan hal-hal yang harus dilakukan untuk menjaga persatuan dan kesatuan sebagai upaya dalam menjaga keutuhan NKRI dalam:
 - a. lingkungan keluarga,
 - b. lingkungan sekolah, dan
 - c. lingkungan masyarakat!

B. Jelaskan arti slogan-slogan di bawah ini sesuai pendapatmu yang berhubungan dengan upaya-upaya untuk menjaga keutuhan wilayah NKRI!

No.	Slogan	Arti
1.	Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh.	
2.	Rawe-rawe rantas, malang-malang putung.	
3.	Lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup di tangan penjajah.	
4.	Hidup mulia atau mati syahid.	
5.	Daripada hidup bercermin bangkai, lebih baik mati berkalang tanah.	
6.	Daripada hujan emas di negeri orang lebih baik hujan batu di negeri sendiri.	
7.	Bhinneka Tunggal Ika Tan Hana Dharma Mangrwa.	



Tugas Mandiri

Tanyakan kepada beberapa orang di sekitarmu! Bagaimana pendapat mereka tentang penyebab yang dapat merusak keutuhan lingkungan dan usaha untuk mengatasinya? Buatlah kesimpulan dari pendapat-pendapat tersebut!

No.	Masalah/Penyebab yang Merusak Keutuhan Lingkungan	Usaha untuk Mengatasi
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

Kesimpulan:

.....

.....

.....

.....

.....



Tugas Kelompok

Bentuklah kelasmu menjadi beberapa kelompok di mana masing-masing kelompok terdiri atas tiga orang!

Bagilah tiap anggota kelompokmu untuk membuat karangan singkat sebagai berikut:

1. Anggota I : Usaha menjaga keutuhan NKRI di lingkungan keluarga.
2. Anggota II : Usaha menjaga keutuhan NKRI di lingkungan sekolah.
3. Anggota III : Usaha menjaga keutuhan NKRI di lingkungan masyarakat.

Kemudian, buatlah kesimpulan dari hasil karangan tersebut dalam bentuk laporan, dan presentasikan hasilnya di depan kelas!



Rangkuman

- Bangsa adalah suatu masyarakat dalam suatu daerah yang sama dan mereka tunduk kepada kedaulatan negaranya.
- Negara adalah bentuk organisasi dari masyarakat atau kelompok orang yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan, menyelenggarakan ketertiban, dan menetapkan tujuan-tujuan dari kehidupan bersama.
- Unsur-unsur teoritis berdirinya suatu negara, terdiri dari unsur konstitusif dan unsur deklaratif.
- Tahap-tahap yang merupakan proses terbentuknya negara bagi bangsa Indonesia:
 1. Perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia.
 2. Proklamasi sebagai pintu gerbang kemerdekaan.
 3. Terjadinya NKRI (kemerdekaan RI 17 Agustus 1945).
- Tujuan NKRI tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alenia keempat, antara lain:
 1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
 2. Memajukan kesejahteraan umum.
 3. Mencederdaskan kehidupan bangsa.
 4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
- Fungsi negara, terdiri dari:
 1. Melaksanakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.
 2. Pertahanan.
 3. Menegakkan keadilan.
- Keutuhan wilayah suatu negara menentukan berlangsung tidaknya pemerintahan suatu negara.
- Sikap-sikap yang harus dimiliki oleh bangsa Indonesia untuk melindungi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, antara lain:
 1. Menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan, dan keselamatan negara di atas pribadi dan golongan.
 2. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan.
 3. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara.
 4. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang ber-Bhinneka Tunggal Ika.
 5. Mengembangkan rasa bangga berbangsa dan bertanah air Indonesia.
 6. Mengurangi ketegangan dalam segala hal pada negara asing.
 7. Meningkatkan kesadaran rakyat akan pentingnya menjaga keutuhan wilayah negara.
- Upaya-upaya dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 1. Keikutsertaan rakyat demi menjaga keutuhan NKRI dapat dilakukan melalui bela negara, baik secara fisik maupun nonfisik.
 2. Partisipasi dalam menjaga keutuhan NKRI dapat dimulai dari:
 - a. Lingkungan keluarga.
 - b. Lingkungan sekolah.
 - c. Lingkungan masyarakat.



Uji Kompetensi

Kerjakan di buku tugas kalian!

A. Uji Pemahaman Konsep

1. Pilihlah huruf a, b, c, atau d di depan jawaban yang paling tepat!

- Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berbentuk
 - kepulauan
 - daratan
 - benua
 - lautan
- Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Pernyataan tersebut termuat dalam UUD 1945 pasal
 - 1 Ayat (2)
 - 1 Ayat (1)
 - 2 Ayat (1)
 - 4 Ayat (1)
- Bangsa adalah suatu masyarakat dalam suatu daerah yang sama dan mereka tunduk kepada kedaulatan
 - sukunya
 - agamanya
 - negaranya
 - daerahnya
- Kemerdekaan bangsa Indonesia diraih berkat adanya
 - keprihatinan yang tinggi
 - persatuan dan kesatuan
 - dendam kepada penjajah
 - penderitaan bangsa Indonesia
- Salah satu ciri negara yang mempunyai ketahanan yang kuat adalah
 - mempunyai TNI dan Polri
 - banyak suku bangsa
 - rakyatnya bersatu
 - rakyatnya kaya
- Pertengkarannya yang terjadi antarwarga, akan mengakibatkan
 - ketahanan masyarakat mantap
 - ketahanan masyarakat berkurang
 - raka kesetiakawanan kuat
 - ketahanan masyarakat meningkat
- Memelihara ketahanan nasional diawali dengan ketahanan
 - orang perorang
 - generasi pendahulu
 - generasi mendatang
 - golongan pergolongan
- Ketahanan nasional tercipta karena kita memegang teguh pada kebenaran dan
 - kekuasaan
 - kehormatan
 - keserakahan
 - keadilan
- Ketahanan nasional merupakan kekuatan, kemampuan, dan daya tahan negara dalam menghadapi
 - masa depan kita
 - musuh pribadi kita
 - ancaman dan gangguan
 - bangsa yang pernah menjajah negara kita
- Bentuk negara Indonesia adalah kesatuan. Hal ini berarti
 - semua rakyatnya berasal dari satu suku bangsa
 - agama yang berlaku di Indonesia hanya satu
 - negara Indonesia dipimpin oleh seorang presiden
 - badan yang berkuasa dalam negara hanya satu pemeritahan pusat
- Alasan bangsa Indonesia memilih bentuk negara kesatuan adalah

- a. agar rakyatnya mudah diatur
 - b. karena tuntutan jiwa Pancasila
 - c. agar dikagumi oleh bangsa lain
 - d. karena pesan dari para pendahulu bangsa
12. Tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Hal ini sesuai dengan UUD 1945 Pasal ...
 - a. 30 Ayat (1)
 - b. 30 Ayat (2)
 - c. 31 Ayat (1)
 - d. 31 Ayat (2)
 13. Bangsa kita memberi kesempatan budaya bangsa lain untuk masuk dengan cara
 - a. disenangi dan cocok
 - b. sesuai dengan kepribadian kita
 - c. berasal dari negara Timur
 - d. dapat memajukan bangsa
 14. Di bawah ini merupakan salah satu tindakan yang membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa adalah
 - a. membanggakan budaya daerah lain
 - b. senang mempelajari budaya asing
 - c. mempelajari bahasa Inggris
 - d. belajar di luar negeri
 15. Berikut ini yang bukan merupakan ciri-ciri bangsa adalah
 - a. memiliki rasa kebersamaan
 - b. kesamaan identitas budaya
 - c. memiliki penguasa sah yang ditakuti
 - d. keanggotaannya bersifat nasionalitas
 16. Unsur deklaratif pembentukan negara adalah
 - a. rakyat
 - b. wilayah
 - c. pemerintah yang berkedaulatan
 - d. pengakuan dari negara lain
 17. Di dalam keluarga yang harus menaati peraturan adalah
 - a. anak dan ibu
 - b. ayah dan ibu
 - c. anak-anak dan pembantu
 - d. semua anggota keluarga
 18. Salah satu cara untuk membina kerukunan antarsiswa di sekolah adalah
 - a. menjaga kerapian di dalam kelas
 - b. mengikuti pelajaran dengan saksama
 - c. bergaul tanpa membeda-bedakan teman
 - d. bekerja sama dalam mengerjakan ulangan
 19. Agar masyarakat aman dan tenteram, maka semua warga masyarakat harus taat
 - a. kepada pemuka agama
 - b. kepada pejabat setempat
 - c. kepada aturan yang berlaku
 - d. kepada pemuka masyarakat
 20. Contoh perbuatan yang mengganggu kerukunan dalam masyarakat adalah
 - a. memberi ucapan selamat hari raya bagi agama lain
 - b. kerja bakti membersihkan tempat ibadah
 - c. hanya bergaul dengan kelompoknya saja
 - d. menengok tetangga yang sedang sakit
 21. NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) terbentuk pada tanggal
 - a. 17 Agustus 1945
 - b. 18 Agustus 1945
 - c. 17 Agustus 1954
 - d. 18 Agustus 1954
 22. Gerakan pemberontakan yang dilakukan oleh Partai Komunis disebut
 - a. RMS
 - b. G30S/PKI
 - c. GAM
 - d. PRRI
 23. Pada waktu berdiri, NKRI dibagi menjadi ... provinsi.
 - a. 6
 - b. 7
 - c. 8
 - d. 9
 24. Perbedaan antarsuku di Indonesia apabila tidak dijaga akan menimbulkan
 - a. kebahagiaan
 - b. kesedihan
 - c. konflik
 - d. perdamaian

25. Keanekaragaman budaya harus terus dikembangkan agar dapat menjadi ... persatuan dan kesatuan.
 - a. pemecah
 - b. merusak
 - c. penghalang
 - d. perekat
26. Pernyataan satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa Indonesia dilakukan oleh pemuda pada kongres
 - a. Pemuda
 - b. Indonesia
 - c. Sumpah Pemuda
 - d. Sumpah Indonesia
27. Penduduk pulau Jawa sering disebut sebagai suku
 - a. Minang
 - b. Dani
 - c. Dayak
 - d. Jawa
28. Apabila keadaan negara aman dan damai, maka kegiatan pembangunan dapat berjalan dengan
 - a. lancar
 - b. tersendat
 - c. terganggu
 - d. lambat
29. Keadaan yang berbeda menuntut rakyat Indonesia harus membangun rasa
 - a. kekhawatiran
 - b. permusuhan
 - c. ketidaknyamanan
 - d. kebersamaan
30. Gerakan pemberontakan rakyat Aceh dikenal dengan nama
 - a. PRRI
 - b. GAM
 - c. RMS
 - d. PKI

II. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat!

1. Bangsa Indonesia menyusun pemerintahannya sejak
2. Negara Indonesia yang berbentuk republik dipimpin oleh seorang
3. Keutuhan wilayah NKRI menjadi tanggung jawab
4. Peran serta warga negara dalam ketahanan negara tercantum dalam UUD 1945 Pasal ... Ayat
5. Stabilitas nasional yang baik akan menjamin lancarnya
6. Masyarakat Indonesia harus selalu menjaga ketahanan fisik maupun ketahanan jiwa agar terhindar dari
7. Keanekaragaman suku bangsa dapat menghambat pembangunan jika tidak disertai sikap
8. Saling tolong menolong antara ayah, ibu, dan anak merupakan contoh kerukunan di dalam
9. Kegiatan belajar mengajar di sekolah akan lancar apabila ketahanan sekolah
10. Ketahanan nasional dapat terpelihara jika ketahanan masyarakat

III. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan jawaban yang benar!

1. Apa yang dimaksud dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia?
2. Sebutkan ciri-ciri bangsa!
3. Jelaskan proses terjadinya NKRI!
4. Bagaimanakah upaya-upaya untuk menjaga keutuhan NKRI?
5. Jelaskan arti penting semboyan “Bhinneka Tunggal Ika” bagi bangsa Indonesia!

B. Penerapan

Kerjakan tugas portofolio berikut ini!

Materi Pokok : Negara Kesatuan Republik Indonesia
 submateri pokok : Pentingnya Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
 Kelas/Semester : V/I
 Nama :
 Tanggal :
 Waktu : 1 Minggu

1. Permasalahan : Bagaimanakah upaya-upaya yang harus dilakukan untuk menjaga keutuhan NKRI?
2. Jawaban sementara :
3. Tugas : Menyebutkan kegiatan masyarakat yang merupakan upaya-upaya untuk menjaga keutuhan NKRI!
4. Petunjuk
 - a. Lakukan wawancara dengan tokoh masyarakat di sekitarmu!
 - b. Tulis hasil wawancara dan presentasikan hasil wawancara tersebut di depan kelas!
 - c. Buatlah kesimpulan!
5. Lembar kerja :

No.	Kegiatan Masyarakat sebagai Upaya-Upaya untuk Menjaga Keutuhan NKRI
1.
2.
3.
4.
5.

Lembar Penilaian:

Skor	Aspek yang Dinilai	Nilai	Nilai Akhir	Tanda Tangan	
				Guru	Orang Tua
A = 8,5 – 10	Pemahaman				
B = 7,5 – 8,4	Hasil wawancara				
C = 6,5 – 7,4	Argumentasi				
D = 0 – 6,4	Kerja sama				

BAB 2

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

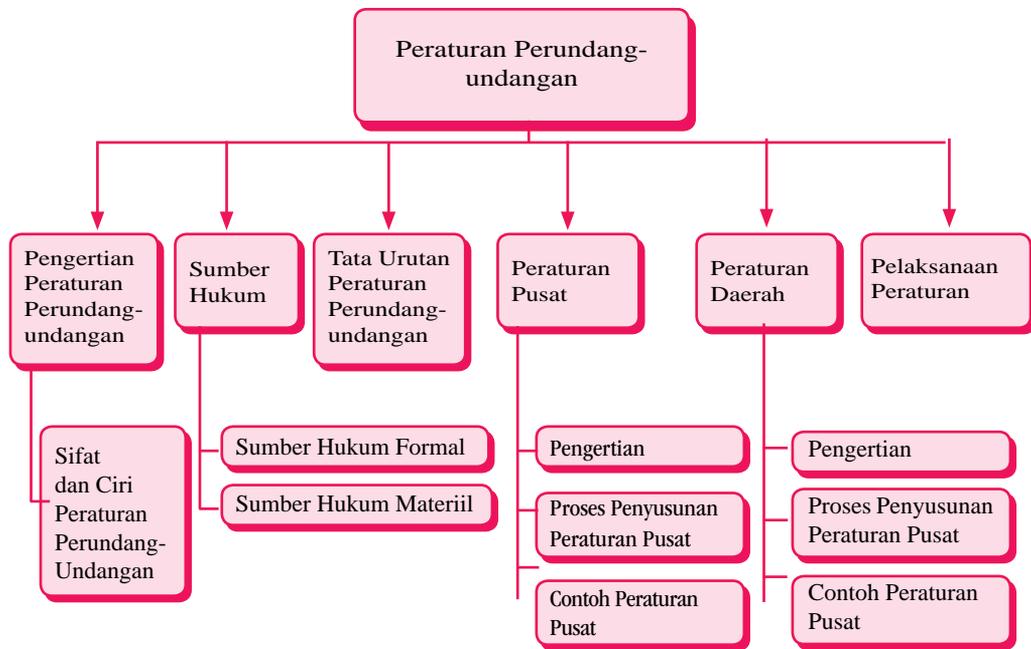


Gambar: Mahkamah Agung adalah salah satu lembaga untuk menegakkan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Sumber: www.sarwono.net

Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal tersebut berarti semua pelaksanaan pemerintahan negara, serta kehidupan berbangsa dan bernegara harus berdasarkan pada hukum atau peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan dibuat untuk menciptakan kehidupan yang aman, tertib, dan teratur dalam kehidupan bermasyarakat. Sebenarnya apakah peraturan itu dan bagaimanakah peraturan dibuat?

Peta Konsep



Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari materi dalam bab ini, kalian diharapkan mampu:

1. Menjelaskan pengertian dan pentingnya peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan daerah.
2. Memberikan contoh peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan daerah.
3. Melaksanakan berbagai peraturan di tingkat pusat maupun daerah.

A. Pengertian Peraturan Perundang-undangan

Untuk menciptakan kehidupan kenegaraan yang tertib dan baik diperlukan suatu tatanan atau aturan yang menjadi pedoman bagi seluruh elemen negara dalam bertindak. Apakah peraturan itu? Peraturan adalah ketentuan yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Sedangkan peraturan perundang-undangan merupakan semua peraturan yang bersifat mengikat secara umum, yang dikeluarkan oleh badan perwakilan rakyat bersama pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Peraturan perundang-undangan tersebut berlaku untuk lembaga-lembaga negara dan seluruh warga negara Indonesia. Adapun sifat dan ciri peraturan perundang-undangan di antaranya adalah:

1. Peraturan perundang-undangan dikeluarkan dalam wujud keputusan tertulis, jadi mempunyai format/bentuk tertentu. Peraturan perundang-undangan di Indonesia yang berpedoman pada UUD 1945. Peraturan perundang-undangan merupakan keseluruhan peraturan hukum yang diciptakan oleh suatu negara dan berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia demi tercapainya ketertiban dan keadilan dalam masyarakat.
2. Peraturan perundang-undangan berisi aturan pola tingkah laku.
3. Peraturan perundang-undangan dibentuk, ditetapkan, dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.
4. Peraturan perundang-undangan mengikat secara umum dan tidak ditunjukkan kepada seseorang atau individu tertentu.

Coba bayangkan, apa yang akan terjadi jika di sebuah perempatan jalan yang ramai, tidak ada lampu lalu lintas dan polisi yang mengatur lalu lintas? Tentu akan banyak terjadi kecelakaan.



Gambar 2.1 Tanpa peraturan lalu lintas, kondisi lalu lintas akan kacau.
Sumber: orangmiskin.wordpress.com

Peraturan perundang-undangan di Indonesia yang berpedoman pada UUD 1945 merupakan keseluruhan peraturan hukum yang diciptakan oleh suatu negara dan berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia demi tercapainya ketertiban dan keadilan dalam masyarakat.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia dibuat berdasarkan Pancasila, sebab Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. Setiap materi peraturan perundang-undangan yang dibuat di Indonesia, harus mengandung asas sebagai berikut.

1. Pengayoman.
2. Kemanusiaan.
3. Kebangsaan.
4. Kekeluargaan.
5. Kenusantaraan.
6. Bhinneka Tunggal Ika.
7. Keadilan.
8. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan.
9. Ketertiban dan kepastian hukum.
10. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Peraturan perundang-undangan dalam suatu negara adalah suatu hal yang penting bagi kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara.

Pentingnya perundang-undangan nasional bagi warga negara adalah sebagai berikut.

1. Memberikan Kepastian Hukum bagi Warga Negara

Sebuah peraturan berfungsi memberikan kepastian hukum bagi warga negara. Apabila di suatu negara tidak ada kepastian hukum, maka semua orang akan bertindak sesuka hatinya. Namun bila ada kepastian hukum, maka orang yang melanggar hukum di negara tersebut akan dikenai sanksi. Contohnya jika seseorang bertindak aniaya terhadap orang lain maka dia akan mendapatkan hukuman sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2. Melindungi dan Mengayomi Hak-Hak Warga Negara

Perundang-undangan berfungsi melindungi dan mengayomi hak-hak warga negara. Hak-hak tersebut memang telah ada sebelum peraturan dibuat, misalnya hak untuk hidup. Hak hidup merupakan hak asasi dari Tuhan yang sudah ada sebelum perundang-undangan dibuat manusia. Walaupun demikian, negara tetap melindungi hak hidup warganya.

3. Memberikan Rasa Keadilan bagi Warga Negara

Perundang-undangan diadakan untuk memberikan rasa keadilan bagi warga negara. Sulit bagi warga negara untuk menyadari adanya rasa keadilan apabila tidak ada undang-undang. Undang-undang merupakan sebuah jaminan tertulis akan adanya rasa keadilan. Contohnya penyelesaian masalah tentang PKL dengan diterbitkannya sebuah perda yang tidak menimbulkan konflik antara PKL, masyarakat, dan pemerintah.

4. Menciptakan Ketertiban dan Ketenteraman

Perundang-undangan menjadi hal yang sangat penting bagi warga negara karena dapat menciptakan ketertiban dan ketenteraman. Undang-undang mampu merapikan kekacauan yang terjadi di dalam masyarakat.



Gambar 2.2 Ketertiban dan keteraturan akan tercipta bila hukum ditegakkan.

Sumber: ebukindo.4rumer.com

Peraturan perundang-undangan dibuat karena memiliki arti penting bagi masyarakat. Adapun arti penting peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan tingkat daerah bagi masyarakat adalah:

1. Memberi kepastian hukum bagi masyarakat.
2. Melindungi dan mengayomi hak-hak masyarakat.
3. Memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.
4. Menciptakan ketertiban dan ketenteraman dalam masyarakat.
5. Mewujudkan kesejahteraan bersama.



Latihan Soal 2.1

A. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan jawaban yang benar!

1. Bagaimana cara menciptakan kehidupan kenegaraan yang tertib dan baik?
2. Untuk siapakah peraturan perundang-undangan dibuat?
3. Sebutkan sifat dan ciri peraturan perundang-undangan!
4. Apa yang dimaksud dengan peraturan?
5. Apa yang akan terjadi jika di suatu masyarakat tidak ada peraturan?

B. Berilah tanda (✓) pada kolom yang sesuai dengan sikapmu!

No	Pernyataan	Setuju	Tidak setuju
1.	Setiap orang bisa menetapkan peraturan perundang-undangan.		
2.	Polisi lalu lintas tugasnya hanya mengatur lalu lintas di jalan raya.		
3.	Pejabat negara yang melanggar hukum tidak bisa dihukum.		
4.	Peraturan perundang-undangan dibuat untuk dijadikan pajangan.		
5.	Peraturan perundang-undangan berlaku untuk seluruh warga negara.		



Tugas Kelompok

Buat kelompok yang terdiri dari 4 – 5 siswa! Amatilah perilaku orang-orang di lingkunganmu. Catatlah perilaku yang menunjukkan taat pada peraturan dan yang melanggar peraturan di lingkunganmu! Kerjakan pada kolom berikut!

No	Hari/Tanggal	Perilaku Taat Pada Peraturan	Perilaku yang Melanggar Peraturan
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			



Tugas Mandiri

Tanyakan kepada ketua RT di tempat tinggalmu tentang peraturan yang dipatuhi masyarakat dengan tertib, dan peraturan-peraturan yang kurang dipatuhi, serta tanyakan alasannya!

No	Peraturan yang Dipatuhi	Alasan	Peraturan yang Kurang Dipatuhi	Alasan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

B. Sumber Hukum Peraturan Perundang-undangan

Sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan yang mempunyai kekuatan memaksa. Memaksa di sini berarti bila aturan-aturan dilanggar dikenai sanksi yang tegas dan nyata. Sumber hukum dibedakan antara sumber hukum “material” (*wellborn*) dan sumber hukum “formal” (*kenborn*). Sumber hukum material adalah keyakinan dan perasaan (kesadaran) hukum individu dan pendapat umum yang menentukan isi atau materi (jiwa) hukum. Sedangkan sumber hukum formal adalah perwujudan bentuk dari isi hukum material yang menentukan berlakunya hukum itu sendiri. Macam-macam sumber hukum formal, antara lain:

1. Undang-Undang

Undang-undang sebagai sumber hukum mempunyai dua arti, yaitu:

- a. Undang-undang dalam arti luas (materil) yaitu setiap peraturan atau hukum/ketetapan yang isinya berlaku mengikat kepada setiap orang.
- b. Undang-undang dalam arti sempit (formal) yaitu setiap peraturan/hukum/ketetapan yang dibuat oleh alat perlengkapan negara yang diberi kekuasaan untuk membuat undang-undang.

Agar kita dapat membedakan kedua jenis undang-undang ini, maka undang-undang dalam arti luas disebut peraturan dan undang-undang dalam arti sempit disebut undang-undang saja.

2. Kebiasaan (Hukum Tidak Tertulis)

Kebiasaan merupakan perbuatan yang dilakukan berulang-ulang terhadap hal yang sama dan kemudian diterima dan diakui masyarakat.

Dalam masyarakat, keberadaan hukum tidak tertulis atau kebiasaan dikenal dengan norma yang harus dipatuhi. Sedangkan dalam praktik penyelenggaraan negara, hukum tidak tertulis disebut *konvensi*. Kebiasaan atau hukum tidak tertulis meskipun tidak ditetapkan oleh pemerintah, tetapi ditaati oleh seluruh rakyat karena masyarakat yakin bahwa peraturan itu berlaku sebagai hukum supaya kebiasaan mempunyai kekuatan dan dapat dijadikan sebagai sumber hukum, ada 2 (dua) faktor yang menentukan, yaitu:

- a. Adanya perbuatan yang dilakukan berulang kali dalam hal yang sama yang selalu diikuti dan diterima oleh yang lainnya.
- b. Adanya keyakinan hukum dari orang-orang atau golongan-golongan yang berkepentingan. Maksudnya adanya keyakinan bahwa kebiasaan itu memuat hal-hal yang baik dan pantas ditaati serta mempunyai kekuatan mengikat.

Contoh: dalam hal jual beli atau sewa menyewa terdapat pihak penghubung (makelar) yang selalu mendapat komisi atau persen dari hasil usahanya menghubungkan antara penjual dengan pembeli. Meskipun hal ini tidak diatur di dalam hukum tertulis, namun dalam kenyataannya praktik pemberian komisi selalu dipatuhi oleh masyarakat.

3. Yurisprudensi

Yurisprudensi adalah keputusan hakim terdahulu terhadap suatu perkara yang tidak diatur oleh undang-undang dan dijadikan pedoman oleh hakim lainnya dalam memutuskan perkara yang sama. Yurisprudensi lahir karena adanya peraturan perundang-undangan yang kurang atau tidak jelas pengertiannya, sehingga menyulitkan hakim dalam memutuskan suatu perkara. Yurisprudensi paling terkenal, yang kerap dijadikan contoh adalah yurisprudensi mengenai pencurian arus listrik.

Dalam membuat yurisprudensi, biasanya seorang hakim akan melaksanakan berbagai macam penafsiran, misalnya:

- a. Penafsiran secara gramatikal (tata bahasa), yaitu penafsiran berdasarkan arti kata.
- b. Penafsiran secara historis, yaitu penafsiran berdasarkan sejarah terbentuknya undang-undang.
- c. Penafsiran sistematis, yaitu penafsiran dengan cara menghubungkan pasal-pasal yang terdapat dalam undang-undang.
- d. Penafsiran teleologis, yaitu penafsiran dengan jalan mempelajari hakekat tujuan undang-undang yang disesuaikan dengan perkembangan zaman.
- e. Penafsiran otentik, yaitu penafsiran yang dilakukan oleh si pembentuk undang-undang itu sendiri.

4. Traktat

Traktat adalah perjanjian yang dibuat oleh dua negara atau lebih mengenai persoalan-persoalan tertentu yang menjadi kepentingan negara yang bersangkutan. Macam-macam traktat adalah:

- a. Traktat multilateral yaitu perjanjian yang dibuat/dibentuk oleh lebih dari dua negara. Traktat ini bersifat terbuka, misal: PBB.
- b. Traktat bilateral yaitu perjanjian yang dibuat oleh dua negara. Sifat traktat bilateral adalah tertutup karena hanya melibatkan dua negara yang berkepentingan. Misal : masalah dwi kewarganegaraan antara Indonesia dan RRC (Republik Rakyat China).

Pembuatan traktat, biasanya melalui tahap-tahap berikut ini:

- a. Penetapan isi perjanjian dalam bentuk konsep yang dibuat atau disampaikan oleh delegasi negara yang bersangkutan.
- b. Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat masing-masing.
- c. Ratifikasi atau pengesahan oleh kepala negara masing-masing sehingga sejak saat itu traktat dinyatakan berlaku di seluruh wilayah negara.
- d. Pengumuman, yaitu penukaran piagam perjanjian.

Setelah diratifikasi oleh DPR dan kepala negara traktat tersebut menjadi undang-undang dan merupakan sumber hukum formal yang berlaku.

5. Doktrin

Doktrin adalah pendapat para ahli hukum terkemuka yang dijadikan landasan atau dasar atau asas-asas penting dalam hukum dan pelaksanaannya. Dalam hukum pemerintahan, kita mengenal doktrin seperti doktrin dari Montesquieu, yakni *Trias Politica* yang membagi kekuasaan pemerintah menjadi tiga bagian yang terpisah.

Tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Segala peraturan perundang-undangan harus bersumber pada sumber hukum. Sumber hukum nasional Indonesia adalah Pancasila. Jadi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan Pancasila.



Di Sekitar Kita

Di sekitar kita banyak sekali contoh doktrin yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah *Ma Lima*. *Ma lima* adalah lima pantangan atau larangan yang harus di jauhi oleh masyarakat Jawa. Lima pantangan atau larangan tersebut antara lain sebagai berikut.

1. Dilarang *mateni* (membunuh)
2. Dilarang *maling* (mencuri)
3. Dilarang *madon* (berzina)
4. Dilarang *mabuk* (minum minuman keras)
5. Dilarang *madat* (memakai obat-obatan terlarang)



Latihan Soal 2.2

A. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan jawaban yang tepat!

1. Apakah yang dimaksud dengan sumber hukum?
2. Bagaimanakah arti undang-undang dalam arti luas dan sempit?
3. Jelaskan perbedaan antara sumber hukum formal dengan sumber hukum material!
4. Sebutkan macam-macam traktat!
5. Mengapa kebiasaan bisa menjadi sumber hukum?

B. Berikan pengertian tentang sumber sumber hukum formal berikut ini dengan kata-katamu sendiri!

No	Sumber hukum formal	Penjelasan
1.	Undang-undang	
2.	Kebiasaan	
3.	Yurisprudensi	
4.	Traktat	
5.	Doktrin	



Tugas Kelompok

Bersama kelompokmu, carilah artikel-artikel yang memuat tentang sumber-sumber hukum formal! Kumpulkan artikel tersebut dan buatlah kliping!



Tugas Mandiri

Amatilah lingkungan di sekitar tempat tinggalmu! Sebutkan norma atau kebiasaan-kebiasaan apa saja yang dilakukan oleh masyarakat, di mana kebiasaan tersebut menjadi sesuatu yang harus dilakukan! Tuliskan pada kolom berikut!

No	Bentuk Kebiasaan Masyarakat
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

C. Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan

Telah kita ketahui bersama, bahwa setiap negara membutuhkan suatu peraturan. Indonesia pun membutuhkan sebuah peraturan. Peraturan perundang-undangan tersebut disusun dengan urutan dari yang paling atas sampai yang terbawah. Seiring dengan berkembangnya tingkat kebutuhan masyarakat, tata urutan peraturan perundang-undangan Indonesia telah mengalami perubahan.

Tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004. Hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia terdiri dari:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perpu).
3. Peraturan pemerintah.
4. Peraturan presiden.
5. Peraturan daerah, yang terbagi dalam:
 - a. Peraturan daerah provinsi, dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi bersama dengan gubernur.
 - b. Peraturan daerah kabupaten/kota, dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten/kota bersama bupati/wali kota.
 - c. Peraturan desa/peraturan yang setingkat, dibuat oleh Badan Perwakilan Desa atau nama lainnya bersama dengan kepala desa.

Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia adalah:

1. Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Dasar 1945 adalah peraturan perundangan yang tertinggi sebagai hukum dasar tertulis yang memuat dasar dan garis besar hukum dalam penyelenggaraan negara. Jadi semua peraturan yang berada di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945.

UUD 1945 telah mengalami empat kali perubahan (amendemen). Mengapa UUD 1945 diamendemen? UUD 1945 mengalami amendemen karena dalam pasal-pasal UUD 1945 banyak ketentuan yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan negara dan masyarakat Indonesia. Amendemen UUD 1945 dilakukan oleh MPR. Keempat amendemen UUD 1945 tersebut adalah:

- a. *Amendemen pertama tanggal 18 Oktober 1999*
 - 1) Perumusan undang-undang (Pasal 5 dan 20 UUD 1945), DPR memiliki kekuasaan membentuk undang-undang, sedangkan presiden hanya berhak mengajukan RUU.
 - 2) Masa jabatan presiden dan wakil presiden (Pasal 7) dibatasi, setelah memegang jabatan selama lima (5) tahun dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali jabatan.
 - 3) Pemberian grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi tidak mutlak kekuasaan presiden (Pasal 14 UUD 1945), tetapi harus memerhatikan pertimbangan MA dan DPR.
- b. *Amendemen kedua tanggal 9 Agustus 2000*

Memperluas Pasal 28 tentang HAM menjadi 13 macam hak asasi manusia.
- c. *Amendemen ketiga tanggal 9 November 2001*
 - 1) Pasal 1 Ayat (2) yang berbunyi “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar”.
 - 2) Pasal 6 Ayat (1), diubah menjadi “Calon presiden dan wakil presiden harus warga negara Indonesia sejak kelahirannya”

d. *Amendemen keempat tanggal 10 Agustus 2002*

- 1) Pasal 2 Ayat (1) : “MPR terdiri atas anggota DPR dan DPD, yang dipilih melalui pemilu ...”.
- 2) Pasal 16 : DPA dihapus, diganti dewan pertimbangan yang dibentuk oleh presiden.
- 3) Aturan Peralihan Pasal III, sebelum Mahkamah Konstitusi dibentuk, kewenangannya dilakukan oleh MA.

2. Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)

Undang-undang memiliki kedudukan yang setara dengan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu). Lalu, dimana letak perbedaan keduanya? Coba kamu perhatikan uraian materi berikut, untuk memahami perbedaan kedua konsep tersebut!

a. *Undang-undang*

Undang-undang merupakan suatu bentuk peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan UUD 1945 serta ketetapan MPR. Undang-undang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat bersama Presiden.

Adapun proses penyusunan undang-undang diatur dalam UUD 1945 Pasal 5 dan Pasal 20, yaitu:

- 1) Pasal 5 UUD 1945 Ayat (1)
Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
- 2) Pasal 20 UUD 1945 Ayat (1)
Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.
- 3) Pasal 20 UUD 1945 Ayat (2)
Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- 4) Pasal 20 UUD 1945 Ayat (3)

Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-Undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.

Undang-undang adalah peraturan yang dibentuk oleh DPR atas persetujuan presiden. Sebelum undang-undang disahkan, DPR atau presiden harus membuat rancangan undang-undang (RUU) terlebih dahulu. Undang-undang dibuat menurut kebutuhan negara. Contoh undang-undang antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- 2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu).
- 5) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Hak Asasi Manusia, dan sebagainya.



Gambar 2. 3 Sekolah merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional yang diatur menurut undang-undang.

Sumber: Dokumentasi

b. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perpu)

Peraturan pemerintah pengganti undang-undang dibuat oleh presiden dalam hal kepentingan yang memaksa. Sedangkan ketentuan penyusunan perpu adalah:

- 1) Perpu harus diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikutnya.
- 2) Dewan Perwakilan Rakyat dapat menerima atau menolak peraturan pemerintah pengganti undang-undang dengan tidak mengadakan perubahan.
- 3) Jika ditolak oleh Dewan Perwakilan Rakyat, peraturan pemerintah pengganti undang-undang tersebut harus dicabut.

Sedangkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang adalah peraturan yang ditetapkan oleh presiden dalam kepentingan yang memaksa. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang ditetapkan untuk mengatasi situasi yang gawat atau darurat. Contoh Perpu adalah: -

- 1) Perpu No. 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- 2) Perpu No. 1 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003.
- 3) Perpu No. 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, dan sebagainya

3. Peraturan Pemerintah

Peraturan pemerintah ditetapkan oleh presiden untuk melaksanakan undang-undang. Oleh karena peraturan itu ditetapkan oleh presiden sebagai kepala pemerintahan, maka peraturan itu disebut peraturan pemerintah.

Peraturan pemerintah adalah peraturan yang ditetapkan oleh presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Contoh peraturan pemerintah adalah:

- a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan.
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggara Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik.
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan sebagainya.



Gambar 2. 4 Aturan tentang kepolisian diatur melalui peraturan pemerintah.

Sumber: www.polri.go.id

4. Peraturan Presiden (PP)

Peraturan presiden adalah peraturan yang dibuat oleh presiden. Peraturan presiden berisi tentang berbagai hal yang diperintahkan oleh presiden berkaitan dengan pelaksanaan peraturan yang berada di atasnya. Contoh peraturan presiden antara lain:

- a. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia.
- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia.
- c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005, dan sebagainya.



Gambar 2. 5 Susunan kementerian diatur dalam peraturan presiden.
 Sumber: www.presidensby.com

5. Peraturan Daerah

Peraturan daerah ditetapkan oleh pemerintah daerah yang bersangkutan dengan persetujuan dari DPRD. Peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berada di atasnya. Contoh peraturan daerah antara lain sebagai berikut.

- a. Peraturan daerah provinsi (perda provinsi).
- b. Peraturan daerah kabupaten/kota (perda kabupaten/kota).
- c. Peraturan desa.



Latihan Soal 2.3

A. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan jawaban yang benar!

1. Mengapa UUD 1945 diamendemen?
2. Sebutkan tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia!
3. Apakah yang dimaksud dengan ketetapan MPR?
4. Bagaimanakah ketentuan dan penyusunan perpu?
5. Sebutkan bunyi Pasal 20 Ayat (3) UUD 1945!

B. Jodohkanlah pernyataan yang ada dengan jawaban yang sesuai

- | | | |
|--|-------|--------------------|
| 1. Pelaksanaan amandemen UUD 1945 yang pertama. | (...) | a. Pancasila |
| 2. Peraturan perundang-undangan yang tertinggi. | (...) | b. Undang-undang |
| 3. Sumber dari segala sumber hukum. | (...) | c. Kesatuan |
| 4. Putusan MPR yang mengikat ke dalam saja. | (...) | d. UUD 1945 |
| 5. Dibuat oleh presiden dalam hal kepentingan yang memaksa. | (...) | e. Perpu |
| 6. Peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan UUD 1945 dan ketetapan MPR. | (...) | f. Keppres |
| 7. Keputusan yang ditetapkan oleh presiden. | (...) | g. Keputusan MPR |
| 8. Bentuk negara Indonesia. | (...) | h. 18 Oktober 1999 |



Tugas Kelompok

Tuliskan teks pasal dan ayat UUD 1945 hasil amandemen lalu berikan komentar kalian mengenai hasil amandemen tersebut! Kerjakan secara berkelompok!



Tugas Mandiri

Tentukan sikapmu terhadap pernyataan-pernyataan di bawah ini dengan memberi tanda centang (✓)!

No	Pernyataan	Setuju	Tidak Setuju
1.	Sepulang sekolah Andi, Tuti, dan Iwan berjalan berjejer di sebelah kanan jalan.		
2.	Ibu Sudarsih tidak memakai sabuk pengaman sewaktu mengemudikan mobilnya.		
3.	Lusiana tetap melaju dengan kencang, meski lampu lalu lintas sudah menyala merah.		
4.	Bapak Sudarno membangun rumah tanpa mengurus Surat Izin Mendirikan Bangunan terlebih dahulu.		
5.	Setiap minggu Tika dan Santi ikut serta dalam kegiatan kerja bakti di desanya.		

D. Peraturan Pusat

Ketika sedang melihat televisi, pernahkah kalian mendengar tentang pemilu, korupsi, atau peraturan? Tahukah kamu bahwa pemilu dan korupsi itu diatur dalam undang-undang? Nah, undang-undang tentang pemilu, undang-undang tentang korupsi merupakan salah satu contoh peraturan di tingkat pusat. Lalu apa yang dimaksud dengan peraturan pusat?

1. Pengertian Peraturan Pusat

Peraturan pusat adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah pusat, dan berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia secara keseluruhan. UUD 1945, ketetapan MPR, undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, dan peraturan pelaksana lainnya merupakan atau termasuk peraturan pusat.



Gambar 2. 6 Peraturan di tingkat pusat dibuat oleh lembaga legislatif.
Sumber: www.tempointeraktif.com

Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yaitu:

a. Kejelasan tujuan

Yang dimaksud dengan “kejelasan tujuan” adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan jelas yang hendak dicapai.

b. Kelembagaan/organ pembentuk yang tepat

Yang dimaksud dengan asas “kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat” adalah bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, apabila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.

c. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan

Yang dimaksud dengan asas “kesesuaian antara jenis dan materi muatan” adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memerhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangannya.

d. *Dapat dilaksanakan*

Yang dimaksud dengan asas “dapat dilaksanakan” adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.

e. *Kedayagunaan dan kebasilgunaan*

Yang dimaksud dengan asas “kedayagunaan dan kehasilgunaan” adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

f. *Kejelasan rumusan*

Yang dimaksud dengan asas “kejelasan rumusan” adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

g. *Keterbukaan*

Yang dimaksud dengan asas “keterbukaan” adalah bahwa dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan untuk isi atau materi muatan peraturan perundang-undangan harus mengandung asas sebagai berikut:

a. *Pengayoman*

Yang dimaksud dengan “asas pengayoman” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketenteraman masyarakat.

b. *Kemanusiaan*

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

c. *Kebangsaan*

Yang dimaksud dengan “asas kebangsaan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang *pluralistik* (kebhinnekaan) dan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

d. *Kenusantaraan*

Yang dimaksud dengan “asas kenusantaraan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memerhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.

e. *Keluargaan*

Yang dimaksud dengan “asas keluargaan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.



Gambar 2. 7 Setiap materi muatan peraturan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat.

Sumber: www.dpr.go.id

f. Bhinneka Tunggal Ika

Yang dimaksud dengan “*asas Bhinneka Tunggal Ika*” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus memerhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

g. Keadilan

Yang dimaksud dengan “*asas keadilan*” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.

h. Kesamaan

Yang dimaksud dengan “*asas kesamaan*” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain: agama, suku, ras, golongan, perbedaan jenis kelamin, atau status sosial.

i. Ketertiban dan kepastian hukum

Yang dimaksud dengan “*asas ketertiban dan kepastian hukum*” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

j. Keseimbangan

Yang dimaksud dengan “*asas keseimbangan*” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.

Selain asas-asas di atas peraturan perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan hukum peraturan perundang-undangan, misalnya hukum pidana dan hukum perdata.

2. Proses Penyusunan Peraturan Pusat

Kekuasaan membentuk undang-undang disebut kekuasaan legislatif. Menurut UUD 1945, DPR adalah pemegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang, sedangkan presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang.

Proses pembuatan undang-undang, melalui 3 tahap yaitu proses penyiapan rancangan undang-undang, proses mendapatkan persetujuan, serta proses pengesahan dan pengundangan.

a. *Proses pengajuan rancangan undang-undang*

Proses pengajuan RUU dapat dilakukan oleh 2 lembaga, yaitu pemerintah dan DPR.

1) Proses RUU dari pemerintah

Proses penyiapan RUU dari pemerintah berpedoman pada Inpres Nomor 15 Tahun 1970, tentang “Tata cara mempersiapkan rancangan undang-undang dan rancangan peraturan pemerintah RI”. Rancangan undang-undang yang berasal dari pemerintah dipersiapkan oleh masing-masing departemen disertai penjelasan pokok-pokok materi terlebih dahulu kemudian dilaporkan kepada presiden.

Apabila presiden menyetujui, maka selanjutnya sekretaris negara menyampaikan surat persetujuan sekaligus meminta departemen yang bersangkutan untuk membentuk panitia guna membahas lebih lanjut RUU tersebut. Apabila presiden tidak menyetujui, departemen yang bersangkutan akan memperoleh surat disertai dengan alasan-alasan.

RUU yang disetujui presiden akan dibahas oleh panitia internal departemen dalam jangka waktu tertentu. Setelah selesai, RUU tersebut diedarkan kepada:

- a) para menteri/lembaga yang berhubungan dengan materi RUU untuk mendapatkan tanggapan,
- b) menteri kehakiman, untuk memperoleh tanggapan seperlunya dari segi hukum,
- c) sekretaris kabinet, untuk menyelesaikan RUU selanjutnya.

Bila telah mendapatkan persetujuan bersama, maka presiden menyerahkan RUU tersebut kepada DPR. Proses selanjutnya adalah pembahasan RUU tersebut di DPR. Pemerintah tidak dapat sewenang-wenang dalam mengusulkan sebuah rancangan undang-undang. Pemerintah membutuhkan persetujuan DPR. Bila tidak sesuai dengan kondisi rakyat, maka DPR sebagai wakil rakyat dapat menolaknya.

2) Proses penyiapan RUU dari DPR

Rancangan undang-undang yang berasal dari DPR disebut RUU inisiatif. Tata cara pengajuan RUU inisiatif diatur dalam peraturan tata tertib DPR RI Nomor 9/DPR-RI/1997 – 1998. RUU dari DPR baru dapat diajukan apabila disetujui sepuluh anggota DPR dari fraksi yang berbeda, disertai daftar nama dan tanda tangan, serta disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPR. Oleh pimpinan DPR, RUU tersebut dibawa ke dalam rapat paripurna.

Selanjutnya diadakan rapat Badan Musyawarah/Bamus DPR untuk membahas RUU tersebut. Apabila Bamus menyetujui RUU, maka kemudian dibawa kembali dalam rapat paripurna. Selanjutnya jika RUU inisiatif disetujui dalam rapat paripurna, maka DPR akan membentuk panitia *ad hoc* untuk membahas dan menyempurnakannya. Langkah berikutnya adalah RUU tersebut disampaikan kepada presiden dan dibahas bersama.

b. *Proses mendapat persetujuan dari DPR*

Dalam proses pembahasan di DPR, ada 4 tingkat pembicaraan yang harus dilalui, yaitu:

1) Pembicaraan tingkat I

Pada pembicaraan tingkat I, dilakukan penjelasan dari pemerintah atau panitia *ad hoc* mengenai RUU.



Gambar 2. 8 Rapat paripurna DPR
 Sumber: www.suarapembaruan.com

2) Pembicaraan tingkat II

Mekanisme yang harus dilalui dalam pembicaraan tingkat II adalah:

- a) Pemandangan umum setiap fraksi terhadap RUU dan penjelasan pemerintah atas pandangan umum fraksi, apabila RUU berasal dari pemerintah.
- b) Tanggapan pemerintah terhadap RUU inisiatif DPR beserta penjelasan panitia khusus dan jawaban panitia khusus terhadap tanggapan pemerintah tersebut.

3) Pembicaraan tingkat III

Pembicaraan tingkat III merupakan rapat komisi/rapat panitia khusus bersama pemerintah dengan agenda membahas RUU secara keseluruhan mulai dari penamaan, pembukaan, pasal-pasal, hingga bagian akhir RUU.

4) Pembicaraan tingkat IV

Pembicaraan tingkat IV merupakan rapat paripurna berupa laporan hasil pembicaraan tingkat III, penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi, dan pengambilan keputusan.

c. *Proses pengesahan dan pengundangan*

RUU yang telah disempurnakan dan disetujui DPR dikirim kepada presiden untuk ditandatangani dan disahkan. Setelah proses penandatanganan, status RUU berubah menjadi undang-undang dan berlaku untuk umum, serta bersifat mengikat undang-undang baru tersebut diundangkan oleh Menteri Sekretaris Negara.

3. Contoh Peraturan Pusat

Indonesia adalah negara hukum. Oleh karena itu, segala perbuatan yang dilakukan oleh pemerintah atau warga negara harus berdasarkan hukum. Peraturan yang dibuat oleh pemerintah mencakup semua bidang kehidupan, mulai dari bidang politik, ekonomi, keamanan, dan sosial budaya. Untuk lebih mengetahui tentang peraturan perundang-undangan. Berikut ini akan kita uraikan beberapa contoh peraturan pusat yang berlaku di Indonesia:

a. *Peraturan tentang otonomi daerah*

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan tentang otonomi daerah ini diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan amanat UUD 1945, daerah diberi kebebasan/kewenangan untuk mengurus sendiri urusan pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Otonomi daerah bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memerhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.



Gambar 2. 9 Daerah diberi kewenangan untuk mengatur rumah tangganya sendiri.
Sumber: *Encharta Encyclopedia*

b. Peraturan tentang lalu lintas

Peraturan pusat yang mengatur tentang tata tertib berlalu lintas adalah Undang-Undang No. 14 Tahun 1992. Peraturan ini menyatakan bahwa setiap pengguna jalan raya wajib menaati peraturan-peraturan lalu lintas dan rambu-rambu lalu lintas. Sudahkah kalian hafal rambu-rambu lalu lintas? Misalnya ketika di jalan raya ada *traffic lights* dan lampu merah menyala, apa yang harus kalian lakukan?

Tentu saja kalian harus berhenti, memberi jalan pada pengendara motor atau mobil dari arah lain untuk lewat. Selain itu, setiap pengemudi kendaraan bermotor wajib mempunyai Surat Izin Mengemudi (SIM) dan memakai helm.

Undang-Undang No. 14 Tahun 1992 juga mengatur tentang keselamatan bagi para pejalan kaki. Hal itu diatur dalam Pasal 26 Ayat (1) yang berbunyi, “Pejalan kaki wajib berjalan pada bagian jalan dan menyeberang pada tempat penyeberangan yang telah disediakan bagi pejalan kaki”.

Apabila setiap pengguna jalan raya mau menaati setiap peraturan lalu lintas maka tidak akan terjadi kecelakaan atau kemacetan.



Gambar 2. 10 Kemacetan merupakan salah satu alibat ketidaktertiban pengguna jalan.

Sumber: www.bbc.co.uk

c. *Peraturan tentang korupsi*

Undang-undang yang mengatur tentang korupsi adalah Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Korupsi berasal dari bahasa latin, yaitu *corruptio* yang berarti busuk, rusak, memutarbalikkan, ataupun menyogok. Dalam arti luas korupsi adalah penyalahgunaan uang, Fasilitas dan wewenang atau jabatan untuk keuntungan pribadi atau sekelompok orang. Korupsi mencakup penyalahgunaan oleh pejabat pemerintah seperti nepotisme, penyogokan, pemerasan, penggelapan, dan sebagainya.



Gambar 2. 11 Pemberantasan korupsi merupakan tanggung jawab KPK.

Sumber: www.kompas.com

Korupsi pada dasarnya merupakan perbuatan yang merugikan negara. Korupsi memberikan dampak negatif yang luas dalam kehidupan suatu bangsa. Di bidang ekonomi, korupsi mempersulit pembangunan ekonomi dan mengurangi kualitas pelayanan pemerintahan.

Upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dilakukan melalui berbagai cara, seperti supervise, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di sidang pengadilan. Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK merupakan lembaga independen yang secara bebas melaksanakan tugas dan wewenangnya melakukan pengusutan tindak pidana korupsi dari pengaruh siapa pun atau kekuasaan mana pun.

d. Peraturan tentang pajak

Peraturan yang mengatur tentang pajak adalah Undang-Undang No. 16 Tahun 2000. Undang-Undang No. 16 Tahun 2000 berisi tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Indonesia. Pajak adalah iuran wajib yang dibayar oleh wajib pajak berdasarkan norma-norma hukum untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran kolektif guna meningkatkan kesejahteraan umum yang balas jasanya tidak diterima secara langsung.

Pajak merupakan salah satu sumber terpenting bagi penghasilan negara. Penghasilan atas pajak tersebut dipergunakan negara untuk membiayai kegiatan alat-alat negara, administrasi negara, lembaga negara. Pajak digunakan untuk melayani sekaligus membangun sarana dan prasarana yang dibutuhkan masyarakat, seperti sarana pendidikan, kesehatan, transportasi, dan sebagainya.

Kelancaran dan keberhasilan pembangunan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja tetapi juga tanggung jawab seluruh masyarakat.

Salah satu bentuk partisipasi atau pengabdian masyarakat terhadap negara adalah dengan membayar pajak. Dengan membayar pajak tepat waktu maka kita telah ikut melaksanakan pembangunan nasional.



Gambar 2. 12 Membayar tarif tol merupakan salah satu sumber dana bagi pembangunan.

Sumber: Ilmu Pengetahuan Populer

e. Peraturan tentang hak asasi manusia

Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah – Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Hak asasi manusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Dalam undang-undang tersebut pemerintah memberikan jaminan hak asasi manusia kepada warga masyarakat. Hak asasi yang dilindungi tersebut meliputi hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, dan sebagainya.

Selanjutnya, untuk mengawasi dan menegakkan HAM di Indonesia, pemerintah juga mengeluarkan undang-undang tentang Pengadilan HAM, yaitu UU No. 26 Tahun 2000. Tujuan dibentuknya Pengadilan Hak Asasi Manusia adalah untuk mengadili pelanggaran hak asasi manusia yang berat.



Latihan Soal 2.4

❖ **Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan jawaban yang benar!**

1. Apa yang dimaksud dengan peraturan pusat?
2. Berikan 3 contoh peraturan pusat!
3. Apa yang kamu ketahui tentang DPR?
4. Apa yang dimaksud dengan otonomi daerah?
5. Mengapa kita harus selalu membayar pajak?



Tugas Kelompok

❖ **Bersama kelompokmu kerjakan tugas-tugas di bawah ini!**

1. Buatlah skema tentang proses pembuatan undang-undang!
2. Buatlah skema tersebut dalam kertas karton!
3. Berilah warna agar menarik!
4. Masing-masing anggota kelompok menjelaskan skema tersebut!



Tugas Mandiri

Tanyakan kepada ayah dan ibumu, di mana mereka harus membayar jenis-jenis pajak di bawah ini!

No	Jenis Pajak	Tempat Membayar
1.	Telepon	
2.	Listrik	
3.	PBB (Pajak Bumi dan Bangunan)	
4.	Sepeda motor	
5.	Mobil	

E. Peraturan Daerah

Peraturan daerah dibuat untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah berdasarkan sistem otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab.

1. Pengertian Peraturan Daerah

Menurut UU No. 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan peraturan daerah adalah peraturan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama kepala daerah.

Peraturan daerah untuk tiap daerah tidak sama, karena disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing. Untuk melaksanakan peraturan daerah kepala daerah menetapkan keputusan kepala daerah.

Pembuatan peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan daerah lain dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dasar hukum pembentukan peraturan daerah adalah:

- Pasal 18, Pasal 18 A, Pasal 18 B +UUD 1945.
- UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Keputusan Mendagri No. 21 Tahun 2003; No. 22 Tahun 2003; No. 23 Tahun 2003; No. 24 Tahun 2003.
- Tata Tertib DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota.

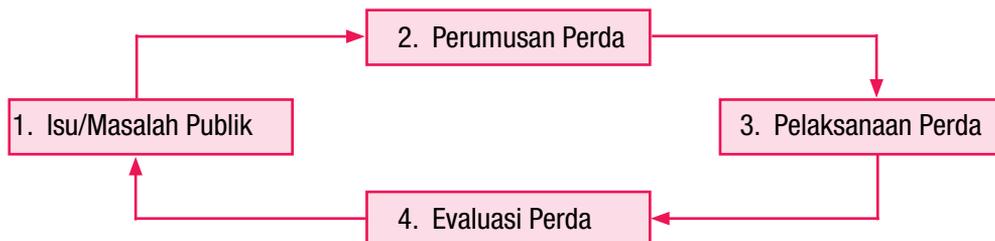
2. Proses Penyusunan Peraturan Daerah

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah membuat sejumlah peraturan daerah. Peraturan daerah tersebut biasa disingkat dengan istilah perda. Perda tersebut bisa mengatur masalah administrasi, lingkungan hidup, ketertiban, pendidikan, sosial, dan lain-lain. Perda tersebut pada dasarnya dibuat untuk kepentingan masyarakat.

Proses penyusunan peraturan daerah melalui beberapa tahap. Penyusunan peraturan daerah dimulai dengan perumusan masalah yang akan diatur dalam perda tersebut. Masalah yang dimaksud adalah masalah-masalah sosial atau publik. Pada umumnya masalah sosial dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu sebagai berikut.

- Masalah sosial yang terjadi karena adanya perilaku dalam masyarakat yang bermasalah. Misalnya: maraknya perjudian atau beredarnya minuman keras dalam masyarakat sehingga membuat kehidupan masyarakat terganggu.
- Masalah sosial yang disebabkan karena aturan hukum yang tidak lagi proporsional dengan keadaan masyarakat. Misalnya, perda tentang retribusi pemeriksaan kesehatan yang sangat memberatkan masyarakat kecil sehingga peraturan daerah tersebut harus diganti.

Untuk mengetahui secara jelas, alur dari proses pembuatan perda itu, lihatlah bagan di bawah ini!



Pembuatan suatu peraturan, baik peraturan pusat maupun peraturan daerah, pada dasarnya hampir sama mulai dari asas-asasnya, materi muatannya dan sebagainya. Tata cara penyusunan peraturan daerah, antara lain:

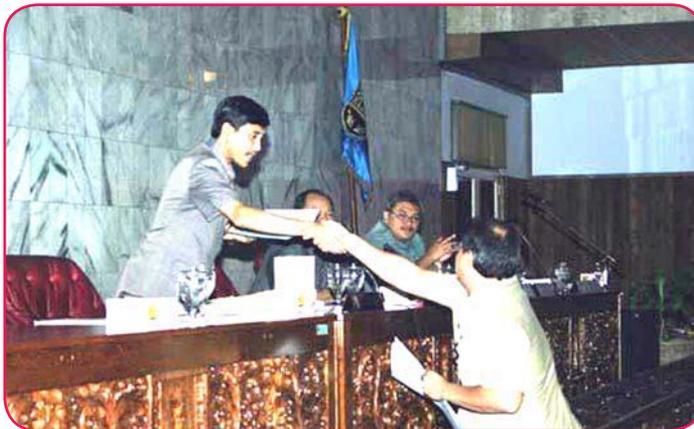
a. Pengajuan peraturan daerah

Proses pengajuan peraturan daerah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1) Pengajuan peraturan daerah dari kepala daerah

Proses pengajuan peraturan daerah dari kepala daerah, adalah sebagai berikut:

- a) Konsep rancangan perda disusun oleh dinas/biro/unit kerja yang berkaitan dengan perda yang akan dibuat.
- b) Konsep yang telah disusun oleh dinas/biro/unit kerja tersebut diajukan kepada biro hukum untuk diperiksa secara teknis seperti kesesuaian dengan peraturan perundangan lain dan kesesuaian format perda.
- c) Biro hukum mengundang dinas/biro/unit kerja yang mengajukan rancangan perda dan unit kerja lain untuk menyempurnakan konsep itu.
- d) Biro hukum menyusun penyempurnaan rancangan perda untuk diserahkan kepada kepala daerah guna diadakan pemeriksaan (dibantu oleh sekretaris daerah).
- e) Konsep rancangan perda yang telah disetujui kepala daerah berubah menjadi rancangan perda.
- f) Rancangan perda disampaikan oleh kepala daerah kepada ketua DPRD disertai nota pengantar untuk memperoleh persetujuan dewan.



Gambar 2. 13 Proses pengajuan peraturan daerah dapat dilakukan oleh kepala daerah.

Sumber: www.solopos.net

2) Pengajuan peraturan daerah dari DPRD

Proses pengajuan peraturan daerah dari DPRD adalah sebagai berikut:

- a) Usulan rancangan peraturan daerah dapat diajukan oleh sekurang-kurangnya lima orang anggota.
- b) Usulan rancangan peraturan daerah itu disampaikan kepada pimpinan DPRD kemudian dibawa ke Sidang Paripurna DPRD untuk dibahas.
- c) Pembahasan usulan rancangan peraturan daerah dalam sidang DPRD dilakukan oleh anggota DPRD dan kepala daerah.



Di Sekitar Kita

Apabila dalam satu masa sidang, kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah, mengenai materi yang sama, maka yang dibahas adalah rancangan peraturan daerah yang disampaikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sedangkan rancangan peraturan daerah yang disampaikan oleh kepala daerah digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Rancangan peraturan daerah dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan kepala daerah. Rancangan peraturan daerah yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan kepala daerah.

b. Pembahasan rancangan peraturan daerah

Pembahasan rancangan peraturan daerah melalui empat tahapan pembicaraan, kecuali apabila panitia musyawarah menentukan lain. Keempat tahapan pembicaraan tersebut adalah :

1) Tahap pertama

Tahap pertama dilakukan dalam Sidang Paripurna. Untuk rancangan perda dari kepala daerah penyampaian dilakukan oleh kepala daerah, sedangkan penyampaian rancangan perda dari DPRD dilakukan oleh pimpinan rapat gabungan komisi.

2) Tahap kedua

Tahap kedua merupakan tahap pandangan umum. Untuk rancangan perda dari kepala daerah, pandangan umum dilakukan oleh anggota fraksi dan kepala daerah memberikan jawaban atas pandangan umum tersebut. Sebaliknya, untuk rancangan perda dari DPRD maka tahap pandangan umum dilakukan dengan cara mendengarkan pendapat kepala daerah dan jawaban pimpinan komisi atas pendapat kepala daerah.

3) Tahap ketiga

Tahap ketiga merupakan tahap rapat komisi atau gabungan komisi yang disertai oleh kepala daerah. Tahap ini dilakukan untuk mendapatkan kesepakatan tentang rancangan perda antara kepala daerah dan DPRD.

4) Tahap keempat (rapat paripurna)

Tahap empat meliputi pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului hal-hal berikut :

a) laporan hasil pembicaraan tahap III,

b) pendapat akhir fraksi-fraksi,

c) pemberian kesempatan kepada kepala daerah untuk menyampaikan pendapat/sambutan terhadap pengambilan keputusan.

Rancangan peraturan daerah yang sudah disetujui DPRD kemudian ditandatangani oleh kepala daerah sehingga terbentuk peraturan daerah.

3. Contoh Peraturan Daerah

Setelah kalian mengetahui proses pembuatan peraturan daerah, sekarang mari kita lihat beberapa contoh peraturan daerah yang ada di Indonesia. Setiap pemerintah daerah memiliki peraturan daerah yang berbeda-beda. Hal tersebut disesuaikan dengan keadaan daerah masing-masing.

- a. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan Pasal 6 Ayat (1) yang berbunyi, “Setiap pejalan kaki yang akan menyeberang jalan harus menggunakan sarana jembatan penyeberangan atau marka penyeberangan (zebra cross)”.



Gambar 2. 14 Pejalan kaki di zebra cross.
Sumber: polres-grobogan.com

- b. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan Pasal 23 Ayat (1) berbunyi, “Tempat umum, sarana kesehatan, tempat kerja, dan tempat yang secara spesifik sebagai tempat proses belajar mengajar, arena kegiatan anak, tempat ibadah, dan angkutan umum dinyatakan sebagai kawasan tanpa merokok. Pada Pasal 48 ketentuan sanksi pada peraturan yang sama disebutkan bahwa setiap orang yang melanggar akan dikenakan hukuman denda Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)”.
- c. Beberapa Peraturan Daerah Provinsi Bali Tahun 2000 – 2001
 - 1) No. 001 tentang Penetapan Upah Minimum.
 - 2) No. 002 tentang Penyerahan Hak Pakai/Penggunaan Barang Milik/yang dikuasai Pemprov Bali.
 - 3) No. 003 tentang Penetapan Juara Perlombaan Kelompencapir.
 - 4) No. 004 tentang Penetapan Lokasi Terminal Penumpang B.
 - 5) No. 005 tentang Penetapan Desa Sadar Hukum.
 - 6) No. 009 tentang Program Pembangunan Daerah, dan sebagainya.
- d. Beberapa Peraturan Daerah Tahun 2001 Provinsi Jawa Timur
 - 1) No. 1 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2001

- 2) No. 2 tentang Program Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur 2001 – 2005
 - 3) No. 3 tentang Badan Pengelola Data Elektronik Provinsi Jawa Timur
 - 4) No. 4 tentang Badan Kesatuan Bangsa Provinsi Jawa Timur
 - 5) No. 5 tentang Badan Koordinasi Wilayah Provinsi Jawa Timur dan sebagainya.
- e. Perda No. 14 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang di Wilayah Kabupaten Sragen.



Latihan Soal 2.5

A. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan jawaban yang benar!

1. Apa yang dimaksud dengan peraturan daerah?
2. Sebutkan dasar hukum pembentukan peraturan daerah!
3. Bagaimana proses pengajuan peraturan daerah dari DPRD?
4. Gambarkan alur dari proses pembuatan perda!
5. Siapakah yang menetapkan peraturan daerah?

B. Berikan pendapatmu tentang isi berita di bawah ini!

PUNGUTAN LIAR DI TIRTONADI MASIH TERJADI

Berdasarkan pantauan Espos, Jumat (4/5), sejumlah petugas penjaga pos pemungutan jasa ruang tunggu menarik pembayaran Rp 300 – Rp 500/orang/sekali masuk. Padahal, sesuai Peraturan Daerah (Perda) No. 2 Tahun 2002 besarnya retribusi jasa ruang tunggu adalah Rp 200/orang/sekali masuk. Retribusi jasa ruang tunggu tersebut juga termasuk penggunaan fasilitas kebersihan, duduk, penerangan dan toilet atau tempat mandi cuci kakus (MCK). Dari lima lokasi pos pemungutan jasa retribusi ruang tunggu, praktik pungli banyak terjadi pada pos penarikan antara terminal penurunan penumpang dan pemberangkatan penumpang ke arah barat serta antara terminal penurunan penumpang dan pemberangkatan penumpang ke arah timur. Modusnya, penjaga hanya memberi kembalian uang retribusi jasa ruang tunggu senilai Rp 200 kepada warga yang membayarnya dengan uang Rp 500. Bahkan, terkadang penjaga tidak mengembalikan uang kembalian tersebut. Sementara warga juga masih ditarik pungutan jika menggunakan toilet terminal. Besaran tarikan pungutan di toilet mencapai Rp 1.000/orang. Padahal semestinya penggunaan fasilitas toilet gratis lantaran sudah termasuk retribusi jasa ruang tunggu. “Tadi waktu masuk terminal saya bayar Rp 500 dan uang kembaliannya hanya Rp 200. Itu pun waktu masuk ke kamar kecil bayar lagi Rp 1.000. Padahal kalau dilihat dari karcis masuk terminal, uang yang harus dibayarkan Cuma Rp 200/orang dan sudah termasuk fasilitas toilet, duduk, kebersihan dan penerangan,” ujar salah satu warga yang saat itu tengah menunggu bus di Terminal Tirtonadi. Sudarmi menuturkan praktik pungli di pos pemungutan retribusi jasa ruang tunggu sudah sejak lama. Diakuinya, kerap kali masuk Terminal Tirtonadi besaran tarikan retribusi jasa ruang tunggu adalah

senilai Rp 300/orang/sekali masuk, bukan Rp 200.” Bayar uang masuk terminal Rp 300 itu sih sudah lama terjadi. Bahkan, saya juga pernah membayarnya Rp 500 dan tidak ada kembaliannya,” tuturnya.

Parkir

Sementara itu, praktik pungli juga masih terjadi pada jasa parkir kendaraan terutama lokasi parkir di bagian barat terminal. Untuk parkir kendaraan sepeda motor, besaran retribusi parkirnya adalah Rp 1.000/motor. “Petugas langsung menarik uang Rp 1.000 untuk parkir. Padahal di sana terpampang papan pengumuman tariff parkir. Untuk sepeda Rp 300, sepeda motor Rp 500 dan mobil Rp 1.000. Tapi kenyataannya uang parkir motor ditarik Rp 1.000,” ujar warga Pabelan Kartasura Wisnu W.

(Sumber: Solopos, 7 Mei 2007)



Tugas Kelompok

Buatlah kelompok terdiri dari 3-4 orang! Bersama kelompokmu carilah informasi di majalah, buku, koran untuk mengetahui tugas dan wewenang beberapa lembaga di daerah! Tulislah hasilnya pada kolom berikut ini!

No	Lembaga Daerah	Tugas dan Fungsi
1.	DPRD	
2.	Kepala daerah	
3.	Dinas daerah	
4.	Sekretaris daerah	
5.	Lembaga teknis daerah	



Tugas Mandiri

**Lakukan kunjungan ke kantor bupati/wali kota atau DPRD di daerahmu!
Carilah informasi mengenai hal-hal berikut!**

1. Nama-nama pejabat pemerintah daerah.
2. Struktur organisasi pemerintahan kabupaten/kota.
3. Jumlah anggota DPRD.
4. Struktur organisasi DPRD.

F. Pelaksanaan Peraturan

Peraturan perundang-undangan dibuat untuk kepentingan bersama. Pelaksanaannya pun wajib dipatuhi oleh seluruh warga masyarakat, tidak memandang pejabat, orang berpengaruh atau kaya, semua orang wajib melaksanakan peraturan, dan apabila peraturan tersebut dilanggar akan mendapat hukuman.

Tetapi, lihatlah di sekelilingmu! Pasti kalian sering menjumpai orang-orang yang melanggar peraturan. Misalnya : masih banyak pejalan kaki yang menyeberang jalan tidak pada tempatnya, atau orang yang merokok di tempat-tempat / kawasan bebas rokok.

Masyarakat wajib mematuhi peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena:

1. Peraturan itu dapat menciptakan ketenteraman dan ketertiban dalam masyarakat.
2. Masyarakat berkepentingan atas berlakunya perundangan itu.
3. Peraturan membuat sesuatu berjalan dengan lancar.

Mematuhi perundang-undangan yang berlaku memberikan manfaat bagi diri sendiri, masyarakat dan negara. Untuk melaksanakan peraturan diperlukan kesadaran pada diri masing-masing orang, dan kerja sama antarwarga, pejabat, para penegak hukum dan sebagainya. Misalnya: peraturan tentang merokok, seharusnya para pejabat, penegak hukum memberi contoh dengan tidak merokok di sembarang tempat.



Gambar 2. 15 Melalui peraturan larangan merokok, kini masyarakat tidak diperbolehkan merokok di sembarang tempat.

Sumber: Dokumentasi

Kepatuhan warga negara terhadap perundang-undangan nasional dapat ditunjukkan dengan sikap-sikap di bawah ini:

1. Tidak membuat kerusuhan dan teror dalam rangka melaksanakan undang-undang antiteroris.
2. Melaksanakan wajib belajar dalam rangka melaksanakan undang-undang pendidikan nasional.
3. Membiasakan tertib berlalu lintas dalam rangka melaksanakan undang-undang lalu lintas.
4. Membayar pajak bumi dan bangunan sesuai jumlah dan waktu yang ditentukan dalam rangka melaksanakan undang-undang perpajakan.
5. Menggunakan hak pilih dalam pemilihan umum, dalam rangka melaksanakan undang-undang pemilu, dan sebagainya.

Keamanan dan ketenteraman tidak mungkin terjadi tanpa adanya peraturan. Contoh yang sederhana adalah dalam sebuah pertandingan apabila tidak ada aturan main maka setiap orang akan bertindak semaunya sendiri tanpa mengindahkan orang lain. Agar tidak terjadi kekacauan kita harus patuh pada perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai pelajar, kalian pun juga harus ikut serta bahkan memberi contoh orang-orang di sekitarmu dengan melaksanakan dan mematuhi aturan-aturan yang berlaku. Sikap patuh terhadap aturan-aturan yang berlaku dapat kalian terapkan di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa dan negara. Contoh-contohnya dapat kamu lihat pada uraian berikut.

1. Di Lingkungan Keluarga

- a. Patuh terhadap orang tua.
- b. Menghargai antaranggota keluarga.
- c. Memerhatikan dan melaksanakan nasihat orang tua.
- d. Melaksanakan aturan-aturan yang telah disepakati oleh anggota keluarga.
- e. Patuh melaksanakan ibadah.
- f. Membuang sampah pada tempatnya, dan sebagainya.



Gambar 2. 16 Membuang sampah pada tempatnya merupakan wujud pelaksanaan peraturan di dalam keluarga.

Sumber: hijaubatam.files.wordpress.com

2. Di Lingkungan Sekolah

- a. Menghormati bapak/ibu guru dan karyawan.
- b. Menjaga nama baik sekolah.
- c. Menaati tata tertib sekolah.
- d. Saling menghargai antarteman.
- e. Tidak berbuat onar, baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah.

3. Di Lingkungan Masyarakat, Berbangsa, dan Bernegara

- a. Memperkokoh persatuan dan kesatuan.
- b. Menjaga nama baik masyarakat/bangsa.
- c. Memupuk kesetiakawanan sosial dan nasional.
- d. Menaati norma-norma yang berlaku.
- e. Menghindarkan diri dari perbuatan yang merugikan masyarakat/bangsa.



Latihan Soal 2.6

A. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan jawaban yang benar!

1. Bagaimanakah cara melaksanakan aturan di masyarakat?
2. Untuk siapakah aturan itu dibuat?
3. Apa yang sebaiknya dilakukan untuk menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan tempat tinggal kita?
4. Mengapa kita harus patuh pada peraturan yang berlaku?
5. Sebutkan 3 sikap patuh terhadap aturan yang berlaku di lingkungan keluarga!

B. Simaklah artikel di bawah ini, bagaimana pendapatmu tentang isi artikel tersebut!

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SOSIALISASI TENTANG PAJAK KEPADA PELAJAR

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) beberapa hari lalu menggelar sosialisasi tentang perpajakan bagi para siswa sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan di Kota Solo. Seperti dilansir SOLOPOS edisi Jumat (4/5), acara yang digelar atas kerja sama dengan Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah ini sebagai upaya memperkenalkan pajak sejak dini kepada masyarakat. Kepala Kantor Wilayah DJP Jateng II, Eddy Setyadi menjelaskan, tujuan dari sosialisasi ini adalah membangkitkan kesadaran tentang pajak pada para pelajar yang nantinya juga akan menjadi wajib pajak ketika mereka sudah dewasa dan bekerja. Berbicara tentang pajak, ada sebagian masyarakat yang belum memiliki kesadaran untuk membayar pajak karena memang belum sepenuhnya mengerti manfaat dari pajak itu sendiri. Bahkan ada segelintir orang yang dengan berbagai cara berusaha menghindari dari kewajiban yang satu ini, dengan membuat semacam manipulasi terkait status usaha atau pekerjaan, agar tidak dikenal sebagai wajib pajak.

(Sumber: Solopos, 7 Mei 2007)



Tugas Kelompok

Bagilah kelasmu menjadi 4-5 kelompok! Masing-masing kelompok membuat contoh permasalahan kelas, misalnya: masalah kebersihan kelas. Masing-masing anggota kelompok mengajukan suatu usulan peraturan untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Tuliskan usulan peraturan tersebut pada kolom berikut ini!

.....

.....

.....

.....

.....



Tugas Mandiri

Sebagai pelajar, tentunya kalian pernah melanggar peraturan sekolah seperti terlambat, tidak berseragam lengkap, tidak melaksanakan PR, dan sebagainya. Buatlah catatan terhadap pelanggaran yang pernah kamu lakukan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini!

1. Pelanggaran apa yang kamu lakukan?
2. Mengapa kamu melanggar aturan?
3. Kapan pelanggaran dilakukan?
4. Sanksi apa yang kamu terima?
5. Bagaimana perasaanmu setelah melakukan pelanggaran?



Rangkuman

- Peraturan adalah ketentuan yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan.
- Ditinjau dari tingkatannya, ada dua tingkat peraturan yaitu peraturan perundangan tingkat pusat dan peraturan daerah.
- Sumber hukum peraturan perundang-undangan adalah:
 - a. Undang-undang
 - b. Kebiasaan (hukum tidak tertulis)
 - c. Yurisprudensi
 - d. Traktat
 - e. Doktrin
- Tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004.
- Tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia terdiri dari:
 - a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
 - b. Undang-undang/peraturan pemerintah pengganti undang-undang
 - c. Peraturan pemerintah
 - d. Peraturan presiden
 - e. Peraturan daerah
- Peraturan pusat adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah pusat.
- Contoh peraturan pusat di antaranya adalah undang-undang korupsi, undang-undang hak asasi manusia, undang-undang perpajakan, undang-undang lalu lintas, dan sebagainya.
- Peraturan daerah adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah.
- Contoh dari peraturan daerah adalah:

- a. Perda Kota Bandung No. 03 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan.
- b. Perda No. 2 tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur 2001 – 2005 dan sebagainya.
- Pentingnya peraturan perundang-undangan nasional bagi warga negara adalah:
 - a. Memberikan kepastian hukum bagi warga negara.
 - b. Melindungi dan mengayomi hak-hak warga negara.
 - c. Memberikan rasa keadilan bagi warga negara.
 - d. Menciptakan ketertiban dan ketenteraman.



Uji Kompetensi

Kerjakan di buku tugas kalian!

A. Uji Pemahaman Konsep

1. Pilihlah huruf a, b, c, atau d di depan jawaban yang paling tepat!

1. Kekuasaan membentuk undang-undang disebut kekuasaan
 - a. eksekutif
 - b. legislatif
 - c. yudikatif
 - d. eksaminatif
2. Peraturan yang dibuat oleh pemerintah pusat disebut
 - a. peraturan pusat
 - b. peraturan wilayah
 - c. peraturan daerah
 - d. peraturan desa
3. Proses pembuatan undang-undang melalui ... tahap.
 - a. 2
 - b. 3
 - c. 4
 - d. 5
4. Proses penyiapan RUU dari pemerintah berpedoman pada
 - a. Tap MPR No. XX Tahun 1966
 - b. UU No. 39 Tahun 1999
 - c. Inpres No. 15 Tahun 1970
 - d. UU No. 32 Tahun 2004
5. Rancangan undang-undang yang berasal dari DPR disebut RUU
 - a. komparatif
 - b. inisiatif
 - c. kompetitif
 - d. konstitutif
6. Undang-undang yang telah ditandatangani presiden diundangkan oleh ...
 - a. Menteri Dalam Negeri
 - b. Menteri Penerangan
 - c. Menteri Penyiaran dan Informasi
 - d. Menteri Sekretaris Negara
7. Ketentuan tentang otonomi daerah diatur dalam
 - a. UU No. 32 Tahun 2004
 - b. UU No. 39 Tahun 1999
 - c. UU No. 6 Tahun 2000
 - d. UU No. 26 Tahun 2000
8. Istilah korupsi berasal dari bahasa Latin, yaitu
 - a. *corruption*
 - b. *corruptionase*
 - c. *corrop*
 - d. *ceurroptio*

9. Setiap pengemudi kendaraan bermotor wajib memiliki
 - a. syarat izin mengemudi
 - b. surat izin mengemudi
 - c. surat untuk mengemudi
 - d. surat khusus mengemudi
10. Penyalahgunaan uang, fasilitas, wewenang, dan jabatan untuk keuntungan pribadi atau sekelompok orang disebut
 - a. nepotisme
 - b. kolusi
 - c. desentralisasi
 - d. korupsi
11. Berikut ini bukan termasuk pentingnya peraturan perundang-undangan nasional bagi warga negara adalah
 - a. memberikan kepastian hukum
 - b. melindungi dan mengayomi hak-hak warga negara
 - c. menciptakan ketertiban dan ketenteraman
 - d. memberikan rasa bersalah bagi warga negara
12. Setiap peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. Pernyataan tersebut merupakan pengertian dari asas
 - a. dapat dilaksanakan
 - b. kedayagunaan dan kehasilgunaan
 - c. kejelasan tujuan
 - d. keterbukaan
13. Sikap yang tidak mencerminkan kepatuhan terhadap perundang-undangan nasional adalah
 - a. mengajak masyarakat untuk membuat keributan
 - b. membayar pajak
 - c. mematuhi peraturan lalu lintas
 - d. belajar dengan tekun
14. Tempat bagi pejalan kaki disebut
 - a. zebra cross
 - b. trotoar
 - c. etalase
 - d. halte
15. Seperangkat hak yang melekat pada manusia yang merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa disebut
 - a. hak asasi manusia
 - b. kewajiban asasi manusia
 - c. perintah manusia
 - d. larangan manusia
16. Orang yang melanggar peraturan akan mendapatkan
 - a. piala
 - b. hadiah
 - c. sanksi
 - d. pujian
17. Apabila semua orang telah menaati peraturan, maka akan tercipta
 - a. suasana kehidupan yang kacau
 - b. lingkungan pemukiman yang kumuh
 - c. penindasan terhadap rakyat kecil
 - d. kehidupan masyarakat yang harmonis
18. Pajak yang dibayarkan oleh rakyat, sebenarnya digunakan untuk
 - a. kesejahteraan rakyat
 - b. berfoya-foya oleh para pejabat
 - c. dikorupsi oleh wakil rakyat
 - d. membayar hutang luar negeri
19. Peraturan daerah harus ditaati oleh
 - a. seluruh rakyat
 - b. pemerintah daerah
 - c. aparat daerah
 - d. masyarakat setempat
20. Kepala daerah menetapkan peraturan daerah atas persetujuan
 - a. rakyat
 - b. DPRD
 - c. MPR
 - d. DPD
21. Setiap warga negara berhak mendapat perlindungan dalam hukum. Hal ini diatur dalam UUD 1945 Pasal
 - a. 26
 - b. 27
 - c. 28
 - d. 29

22. Segala sesuatu yang menimbulkan aturan dan mempunyai kekuatan memaksa disebut
- aturan hukum
 - undang-undang
 - sumber hukum
 - sumber penilaian
23. Undang-undang sebagai sumber hukum mempunyai dua arti, yaitu
- panjang dan pendek
 - tepat dan bermanfaat
 - formal dan material
 - luas dan sempit
24. Undang-undang dalam arti luas disebut
- landasan
 - peraturan
 - norma
 - etika
25. Mematuhi perintah orang tua merupakan salah satu contoh melaksanakan aturan di lingkungan
- sekolah
 - negara
 - keluarga
 - masyarakat
26. Peraturan perundang-undangan Indonesia yang tertinggi adalah
- peraturan pemerintah
 - ketetapan MPR
 - UUD 1945
 - undang-undang
27. Tujuan dibuatnya sebuah peraturan adalah
- agar peraturan tersebut ditaati
 - agar masyarakat menjadi tidak tertib
 - untuk menjaga masyarakat dari serangan musuh
 - untuk menjaga ketertiban masyarakat
28. Pemakaian seragam di sekolah selain menanamkan jiwa persatuan juga menanamkan sikap
- keteladanan
 - kesederhanaan
 - kebanggaan
 - keadilan
29. Norma yang bersifat memaksa adalah
- agama
 - kesusilaan
 - hukum
 - kesopanan
30. Rancangan undang-undang dapat diajukan oleh
- DPR dan gubernur
 - presiden atau DPR
 - presiden dan menteri
 - presiden dan gubernur

II. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat!

- Penafsiran berdasarkan arti kata disebut penafsiran
- Traktat multilateral bersifat
- Pendapat dari para ahli hukum terkemuka, yang dijadikan landasan dalam hukum disebut
- Tata urutan peraturan perundang-undangan RI diatur dalam UU
- Sumber hukum nasional Indonesia adalah
- UUD 1945 telah mengalami amandemen sebanyak
- Peraturan pemerintah pengganti undang-undang dibuat oleh
- Peraturan pusat yang dibuat, berlaku untuk
- Hak yang paling asasi bagi setiap warga negara adalah
- Lembaga legislatif daerah adalah

III. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan jawaban yang benar!

1. Jelaskan pengertian peraturan perundang-undangan!
2. Bagaimana tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia?
3. Sebutkan 3 contoh peraturan pusat!
4. Sebutkan 5 asas pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia!
5. Mengapa peraturan perundang-undangan penting bagi warga negara?

B. Penerapan

Materi Pokok : Negara Kesatuan Republik Indonesia
 submateri pokok : Pentingnya Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
 Kelas/Semester : V/I
 Nama :
 Tanggal :
 Waktu : 1 minggu

1. Permasalahan : Bagaimanakah pelaksanaan perda di daerahmu?
2. Jawaban sementara :
3. Tugas :
 - a. Cari dan sebutkan perda yang ada di daerahmu!
 - b. Bagaimana pelaksanaan perda tersebut?
 - c. Bagaimana reaksi masyarakat terhadap perda tersebut?
4. Lembar Kerja

No	Bentuk Perda	Pelaksanaan	Reaksi Masyarakat
1.			
2.			
3.			

Kesimpulan :

.....

.....

.....

.....

Lembar Penilaian

Skor	Aspek yang Dinilai	Nilai	Nilai Akhir	Tanda Tangan	
				Guru	Orang Tua
A = 8,5 – 10	Pemahaman Masalah				
B = 7,5 – 8,4	Argumentasi				
C = 6,5 – 7,4	Kesesuaian Jawaban				
D = 0 – 6,4	Kerja Sama				



Ulangan Semester 1

Kerjakan di buku tugas kalian!

I. Pilihlah huruf a, b, c, atau d di depan jawaban yang paling tepat!

- Salah satu ciri negara yang mempunyai ketahanan yang kuat adalah
 - rakyatnya kaya
 - rakyatnya bersatu
 - banyak organisasi berdiri
 - mempunyai TNI dan Polri
- Tata tertib lalu lintas dibuat dengan tujuan agar
 - aman dan sejahtera
 - tertib dan teratur
 - aman dan sentosa
 - bersih dan indah
- Wilayah NKRI berbentuk
 - kepulauan
 - daratan
 - benua
 - lautan
- Wilayah Indonesia bagian timur berbatasan dengan negara
 - Malaysia
 - Australia
 - Singapura
 - Papua Nugini
- Wilayah perbatasan suatu negara harus dijaga agar
 - penduduk antarnegara tidak saling berhubungan
 - masyarakat mematuhi aturan
 - tidak terjadi penyelundupan barang dagangan
 - tidak terjadi persengketaan antarnegara
- Contoh gangguan dari luar yang dapat menimbulkan perpecahan antara lain
 - bersaing dalam prestasi
 - adu domba sesama bangsa
 - banyaknya turis mancanegara
 - pertandingan olahraga antarnegara
- Contoh ancaman dari diri sendiri yang dapat menimbulkan perpecahan yaitu
 - dendam dan iri hati
 - rasa cinta pada tanah air
 - kesukaan yang kuat
 - persaudaraan yang erat
- Orang yang tidak mudah terpengaruh berarti
 - sifatnya egois dan sombong
 - tidak memerhatikan orang lain
 - memiliki ketahanan diri yang kuat
 - mau melakukan perintah orang lain
- Suasana yang diperlukan dalam mendukung persatuan dan kesatuan di sekolah adalah
 - rapi dan bersih
 - aman dan tertib
 - senang dan bahagia
 - indah dan menyenangkan
- Pengaruh permainan yang dijual di sekolah, merupakan gangguan terhadap ketahanan di lingkungan sekolah dari
 - kemajuan teknologi
 - siswa di sekolah itu
 - warga luar sekolah
 - orang tua murid
- Salah satu cara membina kerukunan antarsiswa di sekolah adalah
 - menjaga kerapian di dalam kelas
 - mengikuti pelajaran dengan saksama
 - bergaul tanpa membedakan teman
 - bekerja sama dalam mengerjakan ulangan

12. Kewajiban warga negara yang diatur dalam UUD 1945 adalah
 - a. memperoleh pendidikan
 - b. berkumpul dan berserikat
 - c. memperoleh perlindungan
 - d. membela bangsa dan negara
13. Kita harus merasa bangga
 - a. berkebangsaan Indonesia
 - b. memiliki kekayaan alam
 - c. memiliki banyak penduduk
 - d. memiliki keluarga sejahtera
14. Persatuan dikembangkan atas dasar
 - a. kemerdekaan
 - b. hak asasi
 - c. Bhinneka Tunggal Ika
 - d. peraturan pemerintah
15. Semangat kebangsaan melahirkan pendirian untuk menghormati
 - a. kemerdekaan bangsa lain
 - b. kepala negara kita
 - c. ABRI
 - d. orang tua kita
16. Negara kita didirikan atas dasar
 - a. kemauan rakyat
 - b. Pancasila
 - c. pemilihan umum
 - d. keinginan sekelompok orang
17. Keanekaragaman masyarakat disebut
 - a. puspa ragam
 - b. taman indonesia indah
 - c. masyarakat majemuk
 - d. tunggal ika
18. Temanmu terdiri atas berbagai macam suku bangsa. Hal yang sebaiknya kamu lakukan dalam pergaulan di sekolah adalah
 - a. memilih teman yang pandai saja
 - b. bergaul dengan teman satu suku
 - c. tidak bergaul dengan siapa-siapa
 - d. bergaul dengan siapa saja
19. Tetangga daerah kita sedang dilanda musibah bencana alam, yang sebaiknya kita lakukan adalah
 - a. melapor pada aparat
 - b. membantu semampunya
 - c. menuntut pemerintah agar segera mengatasinya
 - d. mencegah agar bencana tidak sampai ke daerah kita
20. Berikut ini yang **bukan** merupakan ciri-ciri bangsa adalah
 - a. memiliki rasa kebersamaan
 - b. kesamaan identitas budaya
 - c. keanggotaannya bersifat nasionalitas
 - d. memiliki penguasa sah yang ditakuti
21. Unsur deklaratif pembentukan negara adalah
 - a. rakyat
 - b. wilayah
 - c. pemerintah yang berdaulat
 - d. pengakuan dari negara lain
22. Bahasa persatuan yang digunakan di negara kita adalah bahasa
 - a. Sanskerta
 - b. pergaulan
 - c. Indonesia
 - d. Melayu
23. Contoh perbuatan yang menunjukkan rasa bangga berbangsa Indonesia adalah
 - a. jalan-jalan ke luar negeri
 - b. memakai produk dalam negeri
 - c. menghormati para pejabat negara
 - d. memasang bendera di setiap sudut rumah
24. Berikut ini merupakan negara-negara yang tidak memiliki perbatasan laut dengan Indonesia adalah
 - a. Malaysia
 - b. Singapura
 - c. Papua Nugini
 - d. Amerika Serikat
25. Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu
 - a. Asia dan Afrika
 - b. Asia dan Eropa
 - c. Asia dan Australia
 - d. Amerika dan Australia

26. Agar masyarakat tenteram dan tertib, semua warga harus taat kepada
- pejabat setempat
 - pemuka agama
 - aturan yang berlaku
 - pemuka masyarakat
27. Dalam keluarga, yang harus menaati peraturan keluarga adalah
- semua anggota keluarga
 - anak dan ibu
 - ayah dan ibu
 - anak dan pembantu
28. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 mengatur tentang
- otonomi daerah
 - peraturan daerah
 - pemerintah daerah
 - wewenang daerah
29. Setiap warga mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Hal ini diatur dalam
- ketetapan MPR
 - peraturan negara
 - undang-undang
 - adat istiadat
30. Peraturan daerah wajib ditaati oleh
- DPRD
 - pemerintah daerah
 - tim penyusun perda
 - seluruh warga daerah
31. Hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri disebut
- birokrasi
 - konsentrasi
 - desentralisasi
 - otonomi daerah
32. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) termasuk lembaga
- eksekutif
 - legislatif
 - yudikatif
 - eksklusif
33. Kepala daerah menetapkan peraturan daerah atas persetujuan
- DPR
 - DPRD
 - MPR
 - rakyat
34. Peraturan perundang-undangan tertinggi di Indonesia adalah
- UUD 1945
 - undang-undang
 - peraturan pemerintah
 - peraturan daerah
35. Pada umumnya peraturan memiliki sifat
- relatif
 - memaksa
 - menyesuaikan
 - bekerja sama
36. Jika suatu negara ingin tidak mempunyai peraturan perundang-undangan maka negara tersebut akan menjadi
- damai
 - kacau
 - aman
 - tenteram
37. Rancangan perda dibahas oleh kepala daerah dan DPRD melalui ... tahap.
- 4
 - 3
 - 2
 - 1
38. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang berhak ditolak oleh
- menteri
 - hakim
 - polisi
 - DPR
39. Bentuk sanksi yang diberikan bagi pelanggar hukum adalah
- celaan
 - hinaan
 - kutukan
 - kurungan

40. Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas
- hukum
 - kitab suci
 - norma
 - adat istiadat
41. Sumber dari segala sumber hukum di Indonesia adalah
- UUD 1945
 - ketetapan MPR
 - undang-undang
 - Pancasila
42. Undang-undang dibuat oleh
- presiden dan menteri
 - DPR dan presiden
 - DPR dan MPR
 - DPR dan MA
43. Peraturan lalu lintas harus ditaati oleh
- pejalan kaki
 - pengguna jalan
 - polisi lalu lintas
 - pengendara motor
44. Undang-Undang Dasar 1945 telah mengalami perubahan sebanyak ... kali.
- dua
 - tiga
 - empat
 - lima
45. Apabila semua orang telah menaati peraturan, maka akan tercipta
- suasana kehidupan yang kacau
 - lingkungan kumuh
 - penindasan terhadap kaum miskin
 - kehidupan masyarakat yang harmonis
46. Peraturan yang telah dibuat sebaiknya
- dijadikan hiasan
 - dimengerti
 - dipatuhi
 - dilihat
47. Peraturan daerah diajukan oleh kepala daerah atas persetujuan
- warga
 - presiden
 - DPR
 - DPRD
48. Peraturan yang dibuat oleh pemerintah pada saat terjadi kegentingan disebut
- Undang-Undang
 - keputusan presiden
 - ketetapan MPR
 - peraturan pemerintah pengganti undang-undang
49. Jika kita ingin menyeberang jalan harus lewat
- trotoar
 - tepi jalan
 - zebra cross
 - traffic light
50. Undang-Undang No. 14 Tahun 1992 memuat ketentuan tentang
- perpajakan
 - anti korupsi
 - kawasan dilarang merokok
 - lalu lintas dan angkutan jalan

II. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat!

- Kesadaran bela negara merupakan bentuk
- Bangsa Indonesia menyusun pemerintah sejak
- Peristiwa pengikraran bertanah air satu, berbangsa satu, dan berbahasa satu disebut ikrar
- NKRI merupakan kependekan dari
- Persatuan dan kesatuan merupakan syarat mutlak terwujudnya
- Peraturan perundang-undangan lain dikeluarkan dalam wujud keputusan

7. Peraturan daerah wajib ditaati oleh
8. Siapa saja yang tidak taat pada hukum akan dikenakan
9. Sumber hukum nasional negara Indonesia adalah
10. Undang-undang dituntut oleh DPR bersama

III. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini jawaban yang benar!

1. Mengapa Indonesia disebut sebagai negara kepulauan?
2. Bagaimana sikap kita terhadap perbedaan suku, budaya, dan adat istiadat yang ada di negara kita?
3. Sebutkan batas-batas NKRI!
4. Mengapa wilayah perbatasan suatu negara harus dijaga?
5. Jelaskan keanekaragaman yang dimiliki bangsa Indonesia!
6. Mengapa perlu dibuat peraturan?
7. Sebutkan sifat dan ciri peraturan perundang-undangan!
8. Sebutkan 2 macam keputusan MPR!
9. Sebutkan 3 contoh sikap yang dapat ditunjukkan oleh warga negara dalam mematuhi perundang-undangan!
10. Bagaimana proses pengajuan perda yang berasal dari inisiatif DPRD?

BAB 3

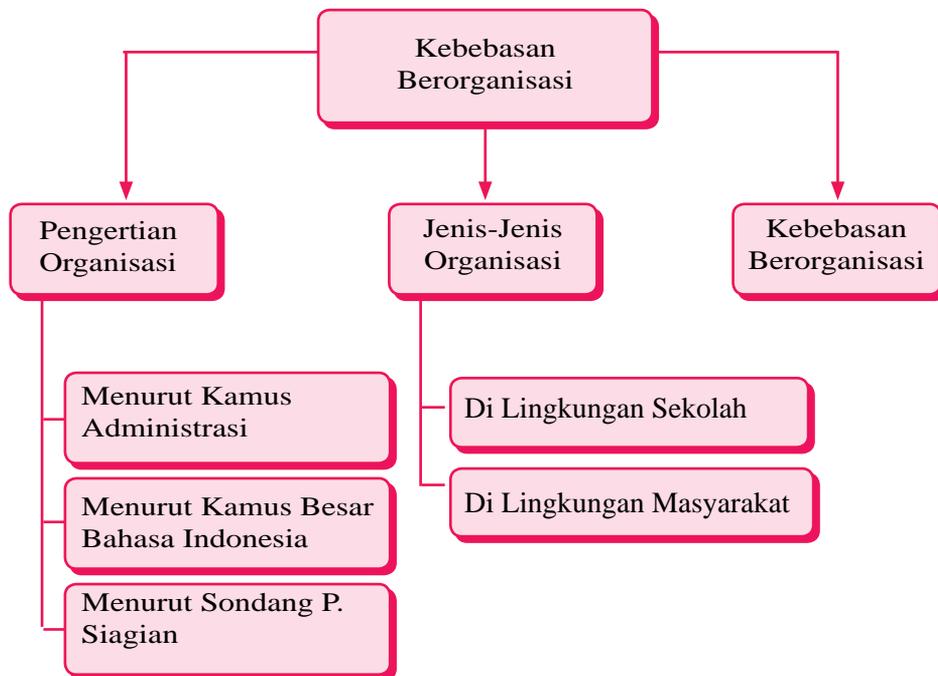
KEBEBASAN BERORGANISASI



Gambar: Salah satu organisasi yang ada di sekolah adalah pramuka
Sumber: www.gemari.or.id

Berkemah adalah salah satu kegiatan yang menyenangkan dalam kegiatan pramuka. Kegiatan pramuka merupakan organisasi sekolah yang bersifat wajib bagi semua murid kelas lima. Melalui kegiatan pramuka, murid kelas lima belajar hidup mandiri dan cara-cara berorganisasi. Nah ternyata aktif dalam organisasi sekolah adalah hal penting bukan? Lalu, bagaimana dengan kamu? Apakah kamu tertarik bergabung dalam organisasi yang ada di sekolahmu?

Peta Konsep



Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari materi dalam bab ini, kalian diharapkan mampu:

1. Mendeskripsikan dan menjelaskan pentingnya organisasi.
2. Menyebutkan contoh organisasi di lingkungan sekolah dan masyarakat.
3. Mengetahui fungsi-fungsi dan manfaat-manfaat yang diperoleh dari sebuah organisasi.
4. Berperan serta dalam memilih suatu organisasi.

A. Pengertian Organisasi

Apakah yang kalian tahu tentang organisasi? Organisasi merupakan suatu perkumpulan yang anggotanya terdiri atas beberapa orang untuk melakukan kerja sama dalam upaya mencapai tujuan bersama.

Pada bab ini kita akan mempelajari jenis-jenis organisasi serta struktur dan fungsinya. Coba sebutkan jenis-jenis organisasi yang ada di sekolahmu!

1. Pengertian organisasi

Pernahkah kalian mendengar kata organisasi? Apakah organisasi itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, organisasi adalah kesatuan yang terdiri atas bagian-bagian atau orang-orang dalam perkumpulan untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi, organisasi adalah tempat berkumpulnya orang-orang demi tujuan tertentu. Organisasi terbentuk bila dua orang atau lebih maupun sekelompok orang yang bekerja sama dan menjalankan suatu pekerjaan atau kegiatan demi mencapai tujuan yang sama pula. Dalam suatu organisasi terdapat pembagian tugas. Pembagian tugas yang dilakukan harus disesuaikan dengan kemampuan setiap individu.

Organisasi memiliki beberapa unsur, antara lain:

- Adanya tujuan, yaitu sesuatu yang ingin diwujudkan serta dicapai sehingga memunculkan adanya tugas, wewenang, dan tanggung jawab.
- Adanya pembagian tugas sekelompok orang
- Adanya kerja sama di antara orang-orang yang bekerja.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa pengertian organisasi adalah suatu perkumpulan yang anggotanya terdiri atas beberapa orang untuk melakukan kerja sama dalam upaya mencapai tujuan bersama.



Gambar 3. 1 Organisasi adalah perkumpulan yang anggotanya terdiri atas beberapa orang atau lebih.

Sumber: Dokumentasi

Sebuah organisasi memiliki pengurus, anggota, dan tujuan. Tujuan dibentuknya organisasi adalah agar kegiatan organisasi berjalan dengan lancar, dan para anggota dapat menjalin kerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Salah satu contoh sederhana dari organisasi adalah pengurus kelas, yang bertugas mengurus dan mengatur kelas tempat belajar. Siapa saja pengurus kelasmu? Pengurus kelas terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan seksi-seksi.

2. Manfaat Organisasi

Organisasi merupakan kegiatan yang tidak wajib kita ikuti. Meskipun demikian, tidak ada salahnya kita aktif dalam kegiatan organisasi. Menagap? Mengikuti organisasi sangat banyak manfaatnya. Mengikuti organisasi di sekolah dapat menambah wawasan dan pengalaman.

Selain menambah wawasan dan pengalaman, organisasi juga membantu kita mengetahui dan mengembangkan bakat: misalnya, lewat kegiatan organisasi kita bisa menemukan kelebihan dan bakat yang selama ini terpendam. Satu hal yang pasti, aktif dalam organisasi berarti menambah teman yang bukan hanya teman sekelas atau teman di lingkungan rumah.

Melalui organisasi, Kamu akan mendapat lingkungan pergaulan yang berbeda. Peserta organisasi sangat beragam. Di sana kita bisa berkenalan dengan adik kelas, kakak kelas, dan teman seangkatan lain dari kelas yang berbeda.

Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwasanya aktif dalam organisasi mampu mendatangkan banyak manfaat untukmu, seperti:

- Menambah wawasan dan pengalaman
- Mengetahui dan mengaembangkan bakat
- Menambah teman
- Mudah bergaul
- Melatih diri mandiri
- Membagi dan mengisi waktu dengan kegiatan yang bermanfaat
- Menimbulkan kepercayaan diri dan tidak mudah mengeluh.



Di Sekitar Kita

Di sekitar kita ada banyak organisasi. Salah satu contoh organisasi itu adalah partai politik. Partai politik adalah organisasi yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan negara melalui pemilihan umum.



3. Tugas-Tugas Pengurus Organisasi

Dalam suatu organisasi terdiri dari beberapa pengurus, dan masing-masing pengurus mempunyai tugas yang berbeda-beda. Pengurus dalam sebuah organisasi terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, dan lain-lain.

Adapun tugas-tugas dari pengurus suatu organisasi, antara lain:

- a. Ketua, mempunyai tugas:
 - 1) Mengurus organisasi.
 - 2) Bertanggung jawab ke luar dan ke dalam organisasi.
 - 3) Memimpin rapat.
 - 4) Mengadakan hubungan dengan pihak luar.
 - 5) Membuat rencana kerja.



Gambar 3. 2 Salah satu tugas ketua organisasi adalah memimpin rapat.
Sumber: www.kompas.com

- b. Wakil ketua, mempunyai tugas:
 - 1) Membantu ketua dalam mengurus organisasi.
 - 2) Bertanggung jawab dan menggantikan tugas ketua, apabila ketua tidak ada.
- c. Sekretaris, mempunyai tugas:
 - 1) Membantu ketua dalam mengurus organisasi.
 - 2) Membuat agenda kegiatan organisasi.
 - 3) Membuat surat-surat yang diperlukan/proposal kegiatan.
 - 4) Membuat arsip.
 - 5) Membuat rencana kerja organisasi bersama ketua.
- d. Bendahara, mempunyai tugas:
 - 1) Membantu ketua dalam mengurus organisasi.
 - 2) Mengurus masalah keuangan organisasi.
 - 3) Membuat laporan keuangan.
 - 4) Membantu ketua membuat rencana kerja organisasi.

Setiap pengurus organisasi harus melakukan tugasnya dengan baik, agar tujuan organisasi dapat tercapai.

Pada pembahasan di depan telah disebutkan bahwa organisasi adalah suatu sistem usaha kerja sama dari sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama. Jadi dapat disimpulkan bahwa organisasi memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

a. Manusia (anggota dan pemimpin)

Setiap organisasi digerakkan oleh manusia. Artinya, manusia adalah yang menggerakkan suatu organisasi. Dalam organisasi terdapat seorang pemimpin dan ada beberapa orang yang dipimpin anggota.

b. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang ingin dicapai dan diwujudkan secara bersama sama. Untuk mencapai tujuan diperlukan pembagian tugas, kewajiban, hak, kewenangan, dan tanggung jawab masing-masing.

c. Pembagian tugas

Dalam suatu organisasi diperlukan pembagian tugas yang jelas. Pembagian tugas dalam organisasi disesuaikan dengan tugas dan tanggung jawab anggota organisasi. Tugas yang satu dengan tugas yang lain saling berhubungan. Apabila suatu ketika terjadi kesalahan, maka akibatnya akan ditanggung oleh seluruh anggota organisasi tersebut. Oleh karena itu masing-masing anggota organisasi harus bisa melaksanakan tugas yang diberikan dengan baik.

d. Kerja sama

Sistem kerja sama yang tersusun rapi, mutlak diperlukan dalam sebuah organisasi. Kerja sama penting bagi terselenggaranya tugas dan kewajiban masing-masing anggota organisasi. Tanpa bekerja sama, tujuan organisasi tidak akan pernah tercapai.



Latihan Soal 3.1

Jawablah pertanyaan-pertanyaan dibawah ini dengan jawaban yang benar!

1. Apa yang dimaksud dengan organisasi!
2. Bagaimana cara pemilihan pengurus sebuah organisasi!
3. Mengapa kita perlu ikut serta dalam sebuah organisasi?
4. Sebutkan pengurus-pengurus organisasi dan tugas-tugasnya!
5. Tuliskan jenis-jenis organisasi yang kamu ketahui, dan jelaskan fungsinya!



Tugas Mandiri

Tuliskan nama-nama pengurus yang ada di kelasmu!

Ketua	:
Wakil Ketua	:
Sekretaris	:
Bendahara	:
Wakil Sekretaris	:
Wakil Bendahara	:
Anggota	:
Seksi-seksi	:



Tugas Kelompok

Diskusikan bersama kelompokmu tentang masalah-masalah di bawah ini, kemudian presentasikan di depan kelas! Kemudian lakukan tanya jawab serta buatlah kesimpulan dari hasil presentasi bersama kelompokmu tersebut!

1. Sebutkan akibat jika pengurus organisasi melalaikan tugas-tugasnya!
2. Apa saja hak dan kewajiban pengurus organisasi?
3. Apa saja hak dan kewajiban anggota organisasi?
4. Bagaimana cara mencapai tujuan dari sebuah organisasi?
5. Apa saja tantangan yang dihadapi oleh seorang pengurus organisasi?

B. Organisasi di Lingkungan Sekolah dan Masyarakat

Ada banyak jenis organisasi yang berada di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Sekarang akan kita bahas jenis-jenis organisasi tersebut.

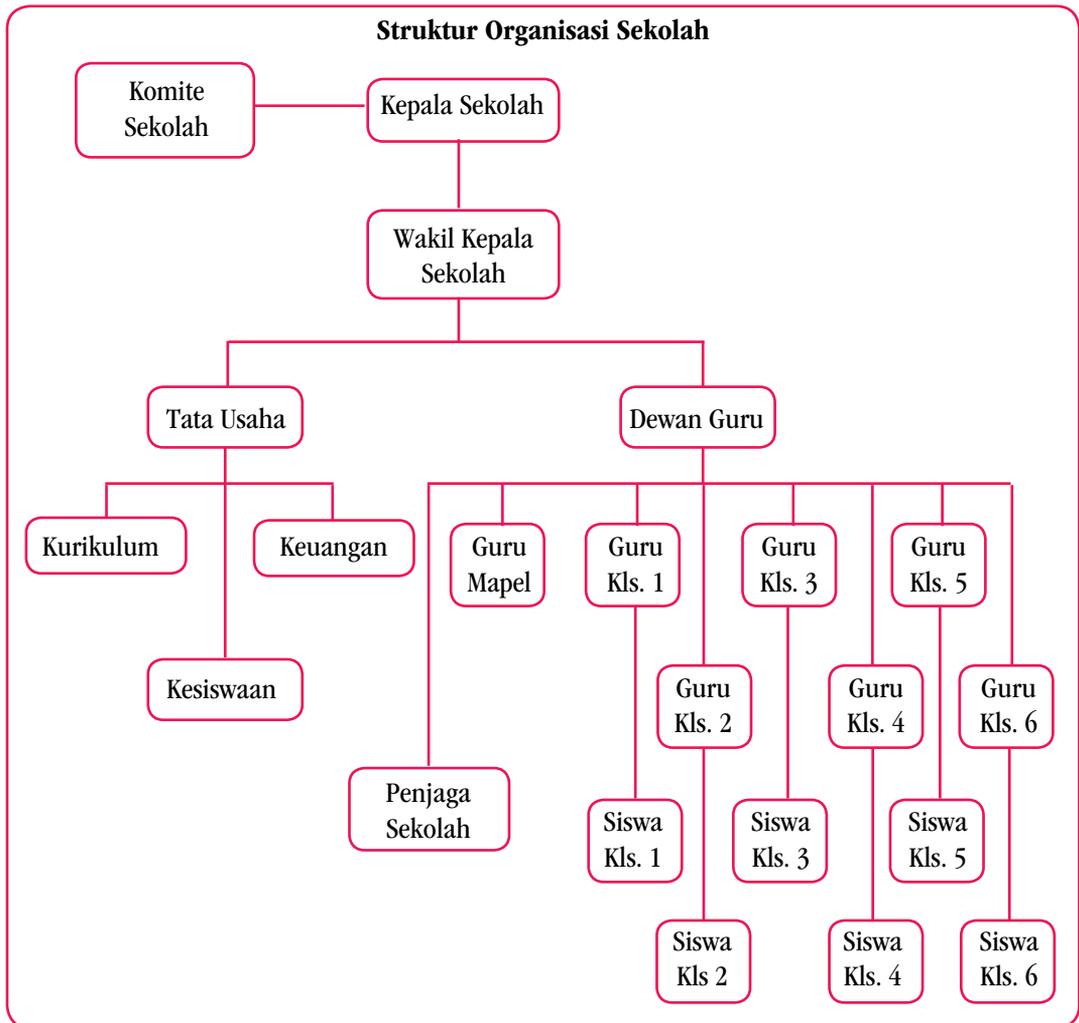
1. Organisasi di Lingkungan Sekolah

Ada beberapa jenis organisasi yang ada di lingkungan sekolah. Organisasi-organisasi tersebut diikuti dan dilakukan oleh guru, siswa, dan warga sekolah lainnya.

Sekolah merupakan organisasi sosial yang bergerak di bidang pendidikan. Organisasi sekolah bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan cara memberikan pendidikan bagi para siswa. Organisasi sekolah dapat berjalan lancar dan tercapai tujuannya jika setiap pengurus bertanggung jawab pada tugasnya masing-masing, selain itu juga harus melaksanakan aturan-aturan yang ada.

Kepengurusan organisasi sekolah terdiri dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, tata usaha, komite sekolah, guru, penjaga sekolah, dan siswa. Masing-masing pengurus mempunyai tugas dan kewajiban. Kepengurusan tersebut dijabarkan dalam struktur organisasi sekolah. Struktur organisasi sekolah berbeda-beda, tergantung dari sarana dan prasarana yang ada di masing-masing sekolah.

Perhatikan contoh struktur organisasi sekolah di bawah ini!



Dari contoh struktur organisasi di atas, dapat dijelaskan bahwa sekolah merupakan organisasi yang dipimpin oleh kepala sekolah. Di dalam organisasi sekolah juga terdapat komite sekolah yang merupakan mitra kerja sekolah. Komite sekolah beranggotakan wali/orang tua murid dan tokoh-tokoh masyarakat.

Setiap warga sekolah wajib menjalankan tugasnya masing-masing. Guru harus mendidik para siswa sesuai tujuan pembelajaran, dan siswa wajib belajar dengan rajin. Tata usaha harus mengerjakan administrasi sekolah, dan penjaga sekolah bertugas menjaga keamanan, keindahan, dan merawat perabot sekolah agar tetap baik.

Semua warga sekolah harus melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik. Oleh karena itu diperlukan tata tertib. Tata tertib tersebut harus ditaati oleh semua warga sekolah agar tujuan organisasi sekolah dapat dicapai.

Di lingkungan sekolah ada beberapa jenis organisasi. Mari kita bahas jenis-jenis dari organisasi tersebut.

a. Koperasi Sekolah

Koperasi sekolah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota. Koperasi sekolah anggotanya terdiri dari semua siswa, guru, dan karyawan sekolah.

Koperasi sekolah didirikan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan anggota sekolah. Apa saja barang-barang yang ada di koperasi sekolahmu?

Biasanya koperasi sekolah menyediakan alat-alat tulis (buku, bolpen, pensil, penggaris), seragam sekolah, dan lain-lain. Koperasi sekolah biasanya dikelola oleh guru, dan murid. Anggota koperasi sekolah terdiri dari semua siswa sekolah, guru, dan karyawan sekolah tersebut. Tujuan koperasi sekolah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya, yaitu seluruh warga sekolah.



Gambar 3. 3 Koperasi sekolah menyediakan barang-barang kebutuhan anggota sekolah.

Sumber: Dokumentasi

b. Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)

Adakah UKS di sekolahmu? Usaha kesehatan sekolah didirikan untuk menangani masalah kesehatan. Kegiatan UKS misalnya memberikan PPPK (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan). Jadi, di UKS disediakan beberapa jenis obat. UKS juga dapat digunakan oleh warga sekolah untuk beristirahat sementara ketika sakit.

Lalu apa tugas dari para petugas UKS? Petugas UKS memiliki tugas sebagai berikut:

- 1) Menyiapkan dan merapikan sprei, taplak, sarung bantal, obat-obatan, dan peralatan kesehatan lainnya secara rapi.
- 2) Membantu teman yang sakit dan memerlukan pertolongan pertama.
- 3) Wajib segera melapor kepada guru piket apabila ada siswa yang sakit dan harus dirawat dokter atau dibawa ke rumah sakit.



Gambar 3. 4 UKS merupakan pusat kesehatan di sekolah.

Sumber: www.palangmerah.org

c. Gugus Depan Pramuka

Gugus depan pramuka biasanya merupakan kegiatan ekstrakurikuler. Pernahkan kalian berkemah? Tentunya kalian mengenal gugus depan bukan?

Gugus depan biasanya didirikan berdasarkan Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka. Gugus depan dalam kelompok terdiri dari kelompok putra dan putri.

Pembina gugus depan terdiri dari Pembina siaga putra (Yanda), Pembina siaga putri (Bunda), Pembina penggalang putra dan putri (kakak).



Gambar 3. 5 Anak-anak sekolah dasar diwajibkan dalam kegiatan pramuka
Sumber: Dokumentasi

d. Komite Sekolah

Adakah komite sekolah di sekolahmu? Komite sekolah merupakan organisasi yang didirikan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. Biasanya pengurus komite sekolah terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, tokoh agama, dan tokoh-tokoh lainnya yang peduli pada pendidikan.

e. OSIS (Organisasi Siswa Intra Sekolah)

OSIS kependekan dari Organisasi Siswa Intra Sekolah yaitu suatu organisasi di tingkat sekolah di Indonesia, yang dimulai dari sekolah menengah. OSIS diurus dan dikelola oleh murid-murid yang terpilih untuk menjadi pengurus OSIS. Biasanya organisasi ini memiliki seorang pembimbing yaitu guru yang dipilih oleh pihak sekolah.

Kita sebagai pelajar secara tidak langsung menjadi anggota Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS). OSIS adalah organisasi sah yang merupakan bagian dalam sekolah, serta menampung kegiatan-kegiatan kokurikuler dan ekstra kurikuler yang menunjang kurikulum sekolah. Hal ini berarti siswa sebagai kader penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber inspirasi dalam organisasi OSIS. Setiap anggota organisasi tentu mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipatuhi, begitu juga OSIS.

Setiap anggota OSIS mempunyai hak, antara lain:

- 1) Mendapat perlakuan yang sama sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan.
- 2) Memilih dan dipilih sebagai perwakilan kelas atau pengurus.
- 3) Menyampaikan pendapat secara lisan ataupun tertulis.



Gambar 3. 6 OSIS diurus dan dikelola oleh murid-murid.
 Sumber: www.infoindonesia.wordpress.com

Adapun kewajiban setiap anggota OSIS, antara lain :

- 1) Memelihara nama baik dan kehormatan sekolah.
- 2) Mematuhi peraturan dan tata tertib sekolah.
- 3) Menghormati tenaga kependidikan.
- 4) Memelihara sarana dan prasarana serta keamanan, kebersihan, ketertiban, keindahan, dan kekeluargaan di sekolah.

f. PMR

PMR yang merupakan kependekan dari Palang Merah Remaja dibentuk untuk memberikan pertolongan pertama pada korban kecelakaan maupun bencana. PMR bergerak dalam bidang kemanusiaan. Anggota PMR terdiri dari para remaja usia sekolah.

Seperti halnya UKS, Palang Merah Remaja (PMR) juga dibentuk untuk menangani berbagai masalah kesehatan yang ada di sekolah. Kegiatan PMR difokuskan pada penanganan kesehatan siswa. Siswa dilibatkan secara langsung dalam kegiatan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K). Dengan demikian, apabila ada siswa yang jatuh sakit atau mendapat kecelakaan, petugas PMR bisa cepat membantu.



Gambar 3. 7 Lambang PMR
 Sumber: *Clip art corel gallery*

g. Klub olahraga

Klub olahraga merupakan organisasi olahraga yang ada di sekolah. Klub olahraga banyak macamnya. Ada klub basket, klub bola volley, klub futsal, klub catur, klub atletik, klub bulu tangkis, klub tenis meja, dan sebagainya. Siswa yang bergabung dalam klub olahraga ini membentuk tim, berlatih, dan bertanding dengan membawa nama sekolah.

Setiap siswa bebas untuk memilih klub olahraga sesuai minat dan bakatnya. Nah, lalu apa bakatmu? Jika kamu pandai bermain bola kamu boleh bergabung dengan klub sepak bola atau klub futsal, atau jika kamu pandai bermain catur tentu kamu akan dengan mudah masuk klub catur, dan sebagainya.



Gambar 3. 8 Setiap siswa bebas untuk memilih klub olahraga sesuai minat dan bakatnya.

Sumber: Dokumentasi



Di Sekitar Kita

Selain organisasi-organisasi yang disebutkan di atas, masih banyak jenis organisasi-organisasi sekolah yang lain, di antaranya:

1. Persatuan orangtua wali murid (POMA).
2. Paguyuban wali murid (PWK).
3. Himpunan murid berbakat (HMB).
4. Organisasi bidang olahraga.
5. Organisasi bidang seni dan budaya.
6. Organisasi bidang media massa.
7. Organisasi bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dengan ada berbagai macam bidang organisasi di sekolah, peran apa saja yang harus kita lakukan? Kita harus berbuat sesuatu untuk melangkah maju dan berkembang guna menghadapi tantangan masa depan.

Berbagai bentuk organisasi sekolah telah disiapkan untuk memenuhi kebutuhan siswa. Dengan demikian kalian bebas memilih jenis organisasi yang kalian inginkan tergantung pada minat dan bakat kalian.

Dalam memilih organisasi sekolah tersebut, ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan antara lain:

- a. Minat dan bakat kalian terhadap kegiatan tersebut.
- b. Manfaat yang dapat kalian peroleh dari mengikuti kegiatan tersebut.

c. Waktu dan tenaga yang dibutuhkan dalam kegiatan tersebut.

Ketiga hal di atas perlu kalian perhatikan baik-baik ketika kalian akan memilih jenis organisasi yang akan kalian ikuti.

Bagaimana dengan kalian? Pengalaman apa yang kalian peroleh dari organisasi di sekolah? Ada banyak manfaat apabila kita berpartisipasi dalam sebuah organisasi di sekolah, antara lain:

- a. Tanggung jawab, yang merupakan sikap dan perilaku yang berani menanggung segala akibat dari perbuatan atau tindakan yang dilakukan. Oleh karena itu, kita dapat belajar untuk bertanggung jawab terhadap tugas yang telah diberikan kepada kita.
- b. Belajar untuk rela berkorban bagi orang lain dengan melakukan sesuatu dengan ikhlas tanpa paksaan.
- c. Belajar memaafkan orang yang bersalah kepada kita.
- d. Memberi pengalaman kepada kita untuk belajar mengurus tugas sesuai jabatan kita dalam organisasi tersebut, dan lain-lain.
- e. Melatih bekerja keras, mengutamakan hak dan kewajiban bagi semua orang, dan berani tampil di depan umum serta berlatih bekerja sama.

2. Organisasi di Lingkungan Masyarakat

Selain organisasi di sekolah, masih banyak organisasi-organisasi lainnya, misalnya organisasi yang terdapat di lingkungan masyarakat. Apa saja organisasi yang berada di lingkungan tempat tinggalmu? Coba sebutkan!

Banyak sekali organisasi yang berada di lingkungan masyarakat, seperti: Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), desa/kelurahan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Dewan Kelurahan, Lembaga Masyarakat Desa (LMD), karang taruna, Posyandu, PKK, remaja masjid (Remas), dan lain-lain.

a. RT (*rukun tetangga*)

Tentunya di lingkunganmu terdapat rukun tetangga bukan? Siapakah ketua RT di lingkunganmu? Rukun tetangga dibentuk oleh masyarakat untuk memberikan pelayanan pada masyarakat di sekitarnya, misalnya pelayanan pembuatan KTP dan urusan administrasi lainnya.

Warga baru yang ada di suatu RT wajib melaporkan diri ke ketua RT agar tercatat sebagai warga baru di RT tersebut. Bahkan orang lain atau tamu yang menginap di sebuah keluarga pun juga harus lapor pada ketua RT, untuk menjaga agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

b. RW (*rukun warga*)

Rukun warga (RW) merupakan gabungan dari beberapa rukun tetangga (RT). Rukun warga ini dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat sekitar RW tersebut. Rukun warga biasanya dipimpin oleh ketua RW yang dipilih oleh ketua-ketua RT atau perwakilan dari warga RT yang tergabung dalam wilayah RW tersebut.

Nasihat Bijak

Sebagai pelajar yang baik, sebaiknya kamu amati berbagai organisasi di lingkungan masyarakat supaya kamu mampu memahami materi dalam bab ini secara mendalam.

c. *Karang taruna*

Karang taruna merupakan organisasi para pemuda atau remaja di suatu desa atau kelurahan. Fungsi dari organisasi ini adalah sebagai wadah pembinaan para pemuda desa atau kelurahan. Biasanya kegiatan karang taruna meliputi kegiatan-kegiatan positif, misalnya olahraga, kerja bakti, bakti sosial, kesenian, membantu acara warga yang mempunyai hajat, keagamaan, dan lain-lain. Di dalam organisasi juga terdapat beberapa pengurus seperti ketua, sekretaris, bendahara dan lain-lain.

d. *Desa atau kelurahan*

Desa atau kelurahan merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah tertentu. Desa mempunyai wewenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Pengertian tentang desa atau kelurahan diatur oleh Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Suatu desa dipimpin oleh seorang kepala desa yang dipilih langsung oleh masyarakat suatu desa tersebut. Kepala desa dibantu oleh perangkat desa, seperti sekretaris dan perangkat lainnya. Sedangkan kelurahan dipimpin oleh seorang lurah yang diangkat oleh bupati atau wali kota atas usul camat.

e. BPD (Badan Permusyawaratan Desa)

Badan Permusyawaratan Desa adalah sebuah lembaga yang dibentuk untuk membantu pengaturan dan penyelenggaraan pemerintah desa. Tugas dari Badan Permusyawaratan Desa ini biasanya membuat dan melaksanakan peraturan desa, menyusun anggaran pendapatan dan belanja desa serta menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Badan Permusyawaratan Desa adalah organisasi yang bertugas menetapkan peraturan desa bersama kepala desa. Selain sebagai pembuat peraturan desa, BPD juga bertugas untuk menampung dan menyalurkan aspirasi warga desa. Adapun kedudukan, tugas pokok, dan fungsi BPD meliputi:

1) Kedudukan BPD

BPD berkedudukan sebagai wadah permusyawaratan bagi pemuka-pemuka masyarakat yang ada di desa tersebut.

2) Tugas BPD

BPD bertugas untuk menampung dan menyalurkan aspirasi atau kebutuhan masyarakat.

3) Fungsi BPD

BPD berfungsi menyampaikan masukan bagi penyusunan keputusan desa dan membina hubungan yang baik antara masyarakat dengan pemerintah desa.

Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah mufakat. Pimpinan BPD dipilih oleh anggota BPD.

f. *Dewan kelurahan*

Dewan kelurahan merupakan organisasi yang dibentuk di tingkat kelurahan. Tugas dari dewan kelurahan ini adalah memberi masukan kepada kepala kelurahan, terutama yang berkaitan dengan aspirasi masyarakat. Ketua dewan kelurahan biasanya diambil dari tokoh masyarakat yang tinggal di wilayah kelurahan.

g. *PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga)*

PKK merupakan organisasi kewanitaan, biasanya beranggotakan ibu-ibu. Organisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga.

b. *Posyandu*

Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) merupakan organisasi yang didirikan untuk memberikan pelayanan terpadu kepada balita dan ibu-ibu yang sedang melaksanakan program Keluarga Berencana. Kegiatan ini meliputi pemeriksaan kesehatan bayi, penimbangan bayi, pemberian makanan tambahan bagi bayi, imunisasi bayi, konsultasi kesehatan, dan lain-lain.



Gambar 3. 9 Posyandu didirikan untuk melayani kesehatan ibu dan bayinya.
Sumber: Dokumentasi

Selain organisasi-organisasi yang telah disebutkan, masih ada organisasi-organisasi lain yang berada di lingkungan masyarakat, antara lain: kelompok pendengar pembaca, pemirsa siaran pedesaan RRI (Kelompencapir), Koperasi Unit Desa (KUD), Badan Usaha Unit Desa (BUUD), Himpunan Wanita Karya (HWK), dan lain-lain. Coba sebutkan organisasi-organisasi masyarakat yang berada di lingkunganmu!



Latihan Soal 3.2

A. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan jawaban yang benar!

1. Sebutkan organisasi-organisasi yang ada di lingkungan sekolahmu!
2. Sebutkan organisasi-organisasi yang ada di lingkungan masyarakat!
3. Jelaskan fungsi dari organisasi-organisasi di bawah ini:
 - a. OSIS
 - b. UKS
 - c. Karang taruna
 - d. Posyandu
4. Apa perbedaan antara organisasi di sekolah dan organisasi di masyarakat?
5. Mengapa perlu dibentuk suatu organisasi di sekolah dan di masyarakat?

B. Selidikilah jenis-jenis organisasi apa saja yang ada di lingkungan masyarakatmu! Kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini sesuai dengan hasil pengamatanmu!

1. Apa nama-nama organisasi yang telah kamu selidiki?
2. Siapa saja pengurusnya?
3. Apa tujuan organisasi tersebut?
4. Apa manfaat yang diperoleh dari organisasi tersebut bagi masyarakat sekitarnya?
5. Sebutkan jenis kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh organisasi tersebut!



Tugas Mandiri

Berilah tanda (✓) pada kolom yang telah disediakan, berkaitan dengan jenis organisasi yang ada di lingkungan masyarakatmu!

No	Nama Organisasi	Ada	Tidak Ada	Manfaat
1.	Rukun tetangga			
2.	Rukun warga			
3.	Kelurahan			
4.	Karang taruna			
5.	BPD			
6.	KUD			
7.	Posyandu			
8.	Majlis taklim			



Tugas Kelompok

Lakukan bersama kelompokmu wawancara kepada para pengurus dari salah satu jenis organisasi yang ada di sekolahmu!

1. Nama organisasi :
2. Pengurus :
3. Tujuan organisasi :
4. Kegiatan organisasi :
5. Manfaat organisasi :
 - a. Bagi pengurus:

.....
 - b. Bagi anggota:

.....

C. Kebebasan Berorganisasi

Kebebasan berarti kemerdekaan untuk bertindak sesuai dengan kemauan hati. Dalam menggunakan kebebasan maka harus dengan rasa tanggung jawab. Dengan menggunakan kebebasan secara bertanggung jawab merupakan perwujudan dari sikap menghormati kebebasan orang lain untuk melaksanakan hak dan kewajibannya.

Kebebasan berorganisasi berarti hak asasi seseorang untuk memilih atau bergabung dengan suatu organisasi harus sesuai dengan hati nuraninya. Sehingga tidak ada orang yang berhak melarang seseorang untuk mengikuti organisasi sesuai dengan keinginannya.



Di Sekitar Kita

Boedi Utomo adalah organisasi pertama di Indonesia yang menjadi pelopor berdirinya organisasi-organisasi lain. Melalui organisasi ini, para pemuda menyalurkan aspirasinya tentang perjuangan kemerdekaan. Pada awalnya organisasi ini bergerak dalam bidang pendidikan dan melahirkan golongan cendekiawan (orang-orang terpelajar) yang sadar akan kemerdekaan.



Kebebasan berorganisasi di Indonesia diatur oleh undang-undang secara tidak langsung hak berorganisasi tersirat dalam Pancasila yang merupakan sumber hukum Indonesia, dan tercantum juga dalam UUD 1945 Pasal 28 E Ayat (3), yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Berdasarkan beberapa dasar hukum di depan, dapat disimpulkan bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki hak untuk bebas memilih atau membentuk suatu organisasi yang sesuai dengan minat, dan bakat yang dimiliki, dengan syarat kebebasan tersebut tidak mengganggu hak dan kebebasan orang lain.

Walaupun setiap orang berhak untuk mengikuti organisasi, untuk memilih menjadi anggota atau pengurus suatu organisasi perlu memerhatikan hal-hal berikut:

1. Mengetahui tujuan organisasi. Maksudnya organisasi yang akan dimasuki harus sesuai dengan kemauan dan dapat membantu perkembangan belajar atau menambah pengalaman.
2. Mencari tahu kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh suatu organisasi, untuk mengetahui apakah kegiatan-kegiatan tersebut membantu dalam proses perkembangan diri yang positif atau tidak.
3. Mencari tahu dan menentukan sebaiknya posisi apa yang cocok dalam organisasi yang akan dimasuki.
4. Melakukan tugas-tugas yang telah diberikan organisasi dengan penuh rasa tanggung jawab.

Selain keempat hal di atas, sebaiknya kamu juga mengetahui cara-cara memilih organisasi sekolah yang tepat untuk kamu. Berikut ini tips-tips mengikuti kegiatan organisasi di sekolah.

Selanjutnya berikut ini kita uraian perihal kebebasan berorganisasi yang ada di lingkungan sekolah dan di lingkungan masyarakat.

1. Kebebasan Berorganisasi di Sekolah

Kebebasan berorganisasi di sekolah merupakan hak setiap siswa, tanpa paksaan dari guru atau teman. Jadi, kamu bebas untuk memilih jenis organisasi yang ingin kamu ikuti, berdasarkan minat, bakat, dan kemauanmu. Dengan mengikuti sebuah organisasi diharapkan dapat memberi manfaat kepada siswa, dan dapat membantu siswa untuk berkembang baik dalam pengetahuan, belajar, dan kepribadian.

Adapun manfaat yang diperoleh apabila seorang siswa masuk dalam sebuah organisasi di sekolah, antara lain:

- a. Dapat lebih maju dalam pelajaran atau bidang tertentu.
- b. Dapat belajar bagaimana menjadi warga negara yang baik.
- c. Dapat mengembangkan potensi kepemimpinan di sekolah.
- d. Menambah wawasan dan pengalaman
- e. Mengetahui dan mengembangkan bakat.
- f. Menambah teman.
- g. Mudah bergaul.
- h. Melatih diri mandiri.
- i. Membagi dan mengisi waktu dengan kegiatan yang bermanfaat.
- j. Menimbulkan kepercayaan diri dan tidak mudah mengeluh.

2. Kebebasan Berorganisasi di Masyarakat

Dalam pembahasan sebelumnya telah mempelajari jenis-jenis organisasi di masyarakat. Ternyata banyak sekali jenis organisasi di lingkungan tempat tinggalmu. Secara langsung kamu telah menjadi anggota RT, RW, kelurahan/desa karena kamu tinggal di wilayah tersebut. Sedangkan organisasi yang lainnya, seperti koperasi desa, remaja masjid, karang taruna, dan lain-lain merupakan organisasi yang keanggotaannya tidak otomatis. Untuk itu, kamu bebas memilih jenis organisasi yang ingin kamu ikuti.

Sesuai dengan pengertian kebebasan berorganisasi, maka setiap orang bebas memilih organisasi mana yang akan diikuti sesuai bakat, minat, dan kemampuan masing-masing, berdasarkan pertimbangan hati nurani masing-masing. Sehingga anggota masyarakat bebas memilih organisasi dan juga dapat membentuk organisasi baru yang diinginkan seperti kelompok seni, tim olahraga, dan lain-lain dengan syarat organisasi baru tersebut tidak merugikan masyarakat lainnya.



Latihan Soal 3.3

 **Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan jawaban yang benar!**

1. Apakah yang dimaksud dengan kebebasan organisasi?
2. Sebutkan hal-hal yang harus diperhatikan tentang kebebasan dalam melakukan kegiatan di suatu organisasi!
3. Jelaskan tentang Pasal 28 E Ayat (3) UUD 1945 tentang kebebasan!
4. Berilah dua contoh kebebasan yang tidak bertanggung jawab dalam sebuah organisasi!
5. Mengapa pelaksanaan kebebasan harus diiringi dengan kewajiban?



Tugas Mandiri

Tuliskan nama-nama jenis organisasi yang pernah kamu ikuti dan tuliskan alasannya mengapa kamu mengikuti organisasi tersebut!

No.	Nama Organisasi	Alasan
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		



Tugas Kelompok

Sekolah merupakan sebuah organisasi pendidikan. Kunjungilah sekolah yang berada di dekat sekolahmu, kemudian tanyakan kepada kepala sekolah atau guru sekolah tersebut tentang:

1. Struktur organisasi sekolah tersebut.
2. Jenis-jenis dengan tujuan dibentuknya organisasi tersebut.
3. Jumlah anggota yang mengikuti organisasi tersebut sesuai dengan kebebasannya dalam berpartisipasi.



Rangkuman

- Organisasi merupakan suatu perkumpulan yang anggotanya terdiri atas beberapa orang yang bekerja sama dalam upaya mencapai tujuan bersama.
- Tujuan dibentuknya organisasi adalah agar suatu kegiatan berjalan lancar dan dapat mencapai tujuan.
- Organisasi ada di lingkungan sekolah dan masyarakat.
- Macam-macam organisasi sekolah:
 1. OSIS
 2. Pramuka
 3. UKS
 4. Komite Sekolah
 5. PMR
 6. Koperasi Sekolah
- Macam-macam organisasi masyarakat
 1. RT
 2. RW
 3. BPD
 4. PKK
 5. Karang taruna
 6. Desa/kelurahan
 7. Dewan kelurahan
 8. Posyandu

- Manfaat berorganisasi:
 1. Melatih tanggung jawab.
 2. Belajar rela berkorban.
 3. Melatih bekerja keras.
 4. Dapat lebih maju dalam bidang tertentu.
 5. Dapat belajar menjadi warga negara yang baik.
 6. Dapat mengembangkan potensi kepemimpinan.
- Kebebasan berorganisasi berarti hak asasi seseorang untuk memilih atau bergabung dengan suatu organisasi sesuai dengan hati nuraninya.
- Kebebasan berorganisasi di Indonesia diatur oleh undang-undang yang bersirat dalam Pancasila dan tercantum dalam UUD 1945 Pasal 28 E Ayat (3).



Uji Kompetensi

Kerjakan di buku tugas kalian!

A. Uji Pemahaman Konsep

1. *Pilihlah huruf a, b, c, atau d di depan jawaban yang paling tepat!*

1. Suatu kelompok orang yang memiliki tujuan yang sama disebut
 - a. kelompok
 - b. organisasi
 - c. kerumunan
 - d. pentas
2. Tiga komponen penting dalam sebuah organisasi, adalah
 - a. anggota, pengurus, dan penasihat
 - b. anggota, ketua, dan sekretaris
 - c. ketua, bendahara, dan sekretaris
 - d. anggota, pengurus, dan tujuan
3. Tujuan pembentukan sebuah organisasi adalah
 - a. memilih pengurus
 - b. menjadi wadah belajar organisasi
 - c. menjadi wadah mengeluarkan pendapat
 - d. memudahkan pelaksanaan tujuan yang akan dicapai
4. Berikut ini yang bukan merupakan ciri-ciri dari organisasi, adalah
 - a. mempunyai anggota
 - b. memiliki tujuan yang jelas
 - c. mempunyai identitas yang jelas
 - d. mempunyai dana dan gedung yang besar
5. Pengurus organisasi yang bertugas mengurus masalah administrasi adalah
 - a. bendahara
 - b. wakil ketua
 - c. sekretaris
 - d. ketua
6. Bendahara bertugas mengurus masalah
 - a. keanggotaan
 - b. administrasi
 - c. keuangan
 - d. kepengurusan
7. Salah satu manfaat masuk dalam organisasi sekolah adalah

- a. memiliki banyak teman
 - b. lebih maju dalam bidang tertentu
 - c. lebih disenangi oleh guru
 - d. meningkatkan kreativitas
8. Sebelum dipilih, seorang calon pengurus organisasi harus melakukan
 - a. provokasi
 - b. kampanye
 - c. diskusi
 - d. propaganda
 9. Berikut ini yang bukan merupakan contoh organisasi di lingkungan sekolah, adalah
 - a. karang taruna
 - b. koperasi sekolah
 - c. gugus depan pramuka
 - d. tim sepak bola sekolah
 10. Anggota organisasi OSIS terdiri dari para
 - a. siswa
 - b. guru
 - c. penjaga
 - d. kepala sekolah
 11. Kelompok pramuka di tingkat SD merupakan kelompok
 - a. siaga
 - b. penegak
 - c. pandega
 - d. penggalang
 12. Organisasi di sekolah yang kegiatannya dalam bidang kesehatan adalah
 - a. OSIS
 - b. PMR
 - c. UKS
 - d. pramuka
 13. Kegiatan berikut yang tidak dilakukan oleh koperasi sekolah adalah
 - a. menjual buku tulis
 - b. menjual seragam
 - c. menjual beras dan sayuran
 - d. menjual makanan kecil dan permen
 14. Kegiatan yang dilakukan di luar jam sekolah biasa dinamakan kegiatan
 - a. kurikuler
 - b. latihan
 - c. intrakurikuler
 - d. ekstrakurikuler
 15. Badan yang bertugas membantu penyelenggaraan pemerintahan desa adalah
 - a. BPD
 - b. yayasan
 - c. dewan kelurahan
 - d. ketua RW
 16. Sebagai salah satu organisasi masyarakat, Posyandu memberikan pelayanan dalam hal
 - a. pendidikan anak
 - b. kesehatan orang tua
 - c. penyediaan barang
 - d. kesehatan bayi dan balita
 17. Kebebasan organisasi diatur dalam Pancasila dan UUD 1945 Pasal
 - a. 28 A Ayat (3)
 - b. 28 E Ayat (3)
 - c. 29 E Ayat (3)
 - d. 29 A Ayat (3)
 18. Berikut ini yang bukan merupakan manfaat aktif dalam organisasi adalah
 - a. belajar bekerja sama
 - b. belajar menang sendiri
 - c. berani tampil di depan umum
 - d. menumbuhkan rasa tanggung jawab
 19. Pengurus organisasi yang ditunjuk langsung oleh seluruh anggota disebut
 - a. interplasi
 - b. aklamasi
 - c. intrupsi
 - d. instruksi
 20. Seorang calon pengurus organisasi dinyatakan menang dalam pemilihan pengurus apabila memperoleh suara sebanyak
 - a. 50% dari jumlah suara yang sah
 - b. 50% + 1 dari jumlah suara
 - c. 50% + 1 dari jumlah suara yang sah
 - d. 50% dari jumlah suara semuanya

21. Kebebasan berorganisasi kita lakukan dengan cara yang baik agar
 - a. tidak merugikan orang lain
 - b. kebebasan ada batasnya
 - c. mengganggu orang lain
 - d. tidak ada tanggung jawab
22. Kebebasan yang disertai tanggung jawab berarti
 - a. bebas bertanggung jawab
 - b. bebas tanpa aturan
 - c. kebebasan ada batasnya
 - d. tidak ada tanggung jawab
23. Kebebasan mengemukakan pendapat dalam rapat adalah hak
 - a. pemimpin rapat
 - b. pemuka masyarakat
 - c. semua peserta rapat
 - d. kepala desa
24. Kita tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain, tetapi harus menerima hasil keputusan
 - a. terbaik
 - b. terbanyak
 - c. pimpinan
 - d. musyawarah
25. Kebebasan yang kita miliki harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada
 - a. semua warga masyarakat
 - b. Tuhan Yang Maha Esa
 - c. golongannya sendiri
 - d. dirinya sendiri
26. Pemerintah menjamin bahwa tidak ada ... dalam memeluk agama.
 - a. anjuran
 - b. kewajiban
 - c. paksaan
 - d. keuntungan
27. Kewajiban yang dimiliki oleh warga negara hendaknya memerhatikan
 - a. hak
 - b. kewajiban
 - c. peraturan
 - d. hak dan kewajiban
28. Dalam organisasi sangat diperlukan
 - a. kekuatan
 - b. kekayaan
 - c. kebersamaan
 - d. keberuntungan
29. Ikatan Dokter Indonesia (IDI) termasuk organisasi
 - a. masyarakat
 - b. profesi
 - c. keagamaan
 - d. dokter
30. Dalam berpartisipasi di sebuah organisasi harus sesuai dengan
 - a. minat
 - b. bakat
 - c. kemauan
 - d. minat, bakat, dan kemauan

II. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat!

1. Pengurus organisasi dipilih oleh
2. Tugas seorang ketua organisasi adalah
3. Organisasi sekolah yang kegiatannya dalam bidang kemanusiannya yaitu
4. Korpri dan Dharmawanita merupakan bentuk organisasi
5. Organisasi OSIS dibina oleh
6. Organisasi yang mengurus kesehatan balita adalah
7. Dalam memilih kegiatan ekstrakurikuler bisa memilih sendiri sesuai dengan ... dan
8. Penggunaan kebebasan disertai dengan
9. Dengan berorganisasi kita bisa mendapatkan
10. Kebebasan mengeluarkan pendapat dalam rapat tidak boleh menyinggung

III. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan jawaban yang benar!

1. Apakah yang dimaksud dengan organisasi?
2. Bagaimana pendapatmu jika di kelas tidak memiliki susunan pengurus kelas yang lengkap?
3. Sebutkan tingkatan-tingkatan dalam organisasi pramuka!
4. Sebutkan macam-macam organisasi sekolah dan masyarakat serta tujuan dari organisasi tersebut!
5. Mengapa pelaksanaan kebebasan harus diiringi dengan kewajiban?

Penarapan

A. Kerjakan portofolio di bawah ini bersama kelompokmu!

Materi Pokok : Kebebasan berorganisasi
 submateri pokok : Organisasi di lingkungan sekolah
 Kelas/Semester : V/I
 Nama :
 Tanggal :
 Waktu : 1 minggu

1. Permasalahan : Bagaimanakah struktur organisasi sekolahmu?
2. Jawaban sementara :
3. Tugas : a. Sebutkan macam-macam organisasi di sekolahmu!
 b. Carilah informasi tentang struktur-struktur organisasi di sekolahmu!
 c. Buatlah kesimpulan dan tuliskan format seperti berikut!
4. Lembar Kerja

No	Nama Organisasi Sekolah	Struktur Organisasi
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

Kesimpulan:

.....

.....

.....

Skor	Aspek yang Dinilai	Nilai	Nilai Akhir	Tanda Tangan	
				Guru	Orang Tua
A = 8,5 – 10	Pemahaman Masalah				
B = 7,5 – 8,4	Argumentasi				
C = 6,5 – 7,4	Kesesuaian Jawaban				
D = 0 – 6,4	Kerja sama				

B. Kerjakan portofolio di bawah ini bersama kelompokmu!

1. Amati berbagai organisasi yang ada di sekolahmu!
2. Lakukan pendataan terhadap jenis, tujuan, kegiatan, dan jumlah peserta organisasi tersebut!
3. Laporkan hasilnya secara tertulis dengan mengikuti tabel berikut ini!

Nama kelompok :

Ketua :

Sekretaris :

Anggota : 1.

2.

3.

4.

4. Hasil pengamatan:

No.	Nama Organisasi	Bergerak dalam Bidang	Profil Organisasi		
			Tujuan	Jumlah Anggota	Kegiatan
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					

BAB 4

KEPUTUSAN BERSAMA

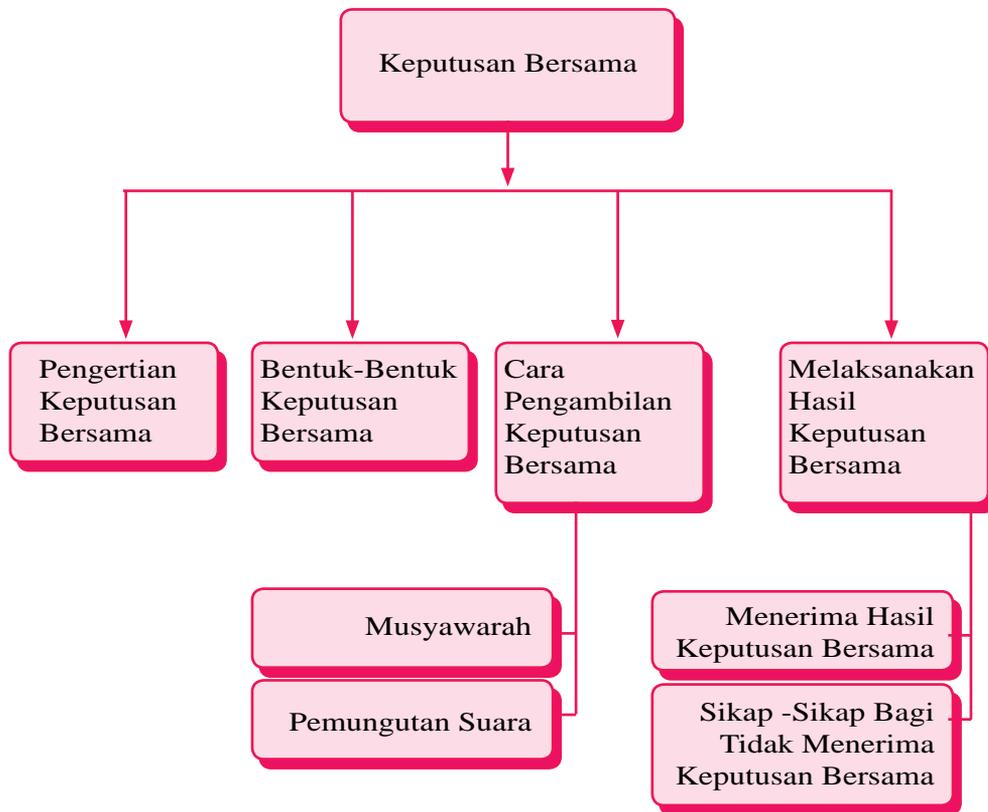


Gambar: Keputusan bersama dapat diraih dengan musyawarah.

Sumber: Dokumentasi

Pada suatu hari Bapak Ketua RT bermaksud mengajak para warganya untuk kerja bakti membersihkan sampah di lingkungan wilayahnya. Ia mengundang semua warganya untuk hadir dalam pertemuan itu dan meminta saran pendapat dari para warganya. Satu persatu warga menyampaikan pendapatnya dan akhirnya diambil satu keputusan, dan semua warga masyarakat melaksanakannya dengan ikhlas. Bagaimanakah sikap dan perilaku kita saat keputusan sudah diambil?

Peta Konsep



Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari materi dalam bab ini, kalian diharapkan mampu:

1. Mengetahui bentuk-bentuk keputusan bersama.
2. Mematuhi keputusan bersama yang telah diambil.

A. Pengertian Keputusan Bersama

Ketika pulang sekolah di jalan raya kamu melihat sebuah dompet, kemudian kamu ambil dompet itu. Apa yang akan kamu lakukan dengan dompet itu? Akan kamu kembalikan pada pemiliknya, atau kamu biarkan saja di jalan, atau mungkin kamu ambil isinya dan dompetnya kamu biarkan saja? Banyak sekali bukan pilihan-pilihan yang bisa kamu ambil. Ketika kamu ambil salah satu pilihan yang ada itu berarti kamu telah membuat suatu keputusan.

Dari uraian di atas, kita dapat menarik kesimpulan bahwa keputusan adalah apa yang diputuskan atau ketetapan yang diambil, jadi keputusan adalah segala putusan yang sudah ditetapkan berdasarkan pertimbangan dan pemikiran, penelitian yang matang. Kemudian keputusan ini menjadi pedoman dalam langkah-langkah berikutnya.

Melalui ilustrasi cerita di atas bisa kita lihat, bahwa keputusan itu ditujukan untuk diri kita sendiri, karena keputusan itu hanya memengaruhi diri kita sendiri. Di sisi lain ada pula keputusan yang harus melibatkan banyak orang untuk mengambil keputusan, karena dampak keputusan itu sangat besar, apabila kita salah dalam memutuskan sesuatu, bukan kita saja yang dirugikan, tapi juga orang lain. Keputusan yang diambil dengan melibatkan banyak orang dan keputusan itu untuk kepentingan bersama dinamakan keputusan bersama.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia keputusan adalah apa yang diputuskan atau ketetapan yang diambil secara bersama-sama. Jadi, keputusan adalah segala putusan yang sudah ditetapkan berdasarkan pertimbangan, pemikiran, dan penelitian yang matang. Keputusan merupakan pedoman dalam menentukan langkah-langkah berikutnya. Keputusan dibagi menjadi 2 macam, yaitu:

1. Keputusan Pribadi (Individu)

Keputusan pribadi (individu) yaitu keputusan yang sifatnya pribadi dan hanya untuk kepentingan diri sendiri. Contohnya ketika kalian diajak bermain oleh temanmu pada saat mengerjakan PR (pekerjaan rumah). Kalian tentu akan berpikir untuk memutuskan pergi bermain atau menyelesaikan PR-mu terlebih dahulu. Keputusan yang kalian tetapkan tersebut akan menjadi tanggung jawabmu sendiri. Oleh karena itu, berani mengambil keputusan maka berarti harus berani menanggung akibatnya.



Gambar 4. 1 Memutuskan menyelesaikan PR terlebih dahulu dari pada bermain adalah contoh bentuk keputusan.

Sumber: Dokumentasi

2. Keputusan Bersama

Keputusan bersama adalah keputusan yang diambil atas dasar persetujuan atau kesepakatan bersama. Keputusan bersama bersifat mengikat dan tidak dapat diganggu gugat. Hasil keputusan bersama biasanya diambil berdasar hasil musyawarah mufakat yang telah dipertimbangkan dengan baik dan benar.

Keputusan bersama merupakan ketentuan, ketetapan, dan penyelesaian yang dilakukan sekelompok orang terhadap suatu hal atau permasalahan. Semua pihak diharapkan dapat menerima keputusan bersama dengan ikhlas, bertanggung jawab, dan lapang dada.

Pengambilan keputusan untuk kepentingan bersama berbeda dengan pengambilan keputusan untuk kepentingan perorangan, karena pengambilan keputusan untuk kepentingan bersama dilakukan dengan melibatkan banyak orang, baik secara langsung, maupun tidak langsung.



Latihan Soal 4.1

A. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan jawaban yang benar!

1. Apa yang dimaksud dengan keputusan?
2. Sebutkan 3 keputusan yang sering kamu lakukan!
3. Jelaskan pengertian keputusan bersama!
4. Bagaimana caranya keputusan bersama diambil?
5. Mengapa dalam membuat suatu keputusan harus melalui pertimbangan yang masak?

B. Berilah tanda centang (✓) pada kolom yang sesuai dengan sikapmu!

No.	Pernyataan	Setuju	Tidak Setuju
1.	Jika melihat dompet di pinggir jalan kita ambil isi dompet tersebut.		
2.	Kita tidak boleh memaksakan kehendak pada orang lain.		
3.	Menghargai pendapat orang lain meskipun pendapatnya berbeda.		
4.	Berbohong pada orang tua yang telah merawat kita.		
5.	Mengikuti kerja bakti di lingkungan rumah semampu kita.		



Tugas Kelompok

Bersama kelompok, cobalah lakukan musyawarah mengenali kegiatan peringatan hari ulang tahun sekolahmu yang akan datang! Tuliskan hasil jalannya musyawarah pada kolom berikut!



Tugas Mandiri

Buatlah daftar kegiatan-kegiatan yang kamu lakukan sepanjang hari ini mulai dari bangun tidur sampai kamu tidur kembali! Lengkapi dengan waktu atau jam dilaksanakannya kegiatan tersebut!

B. Bentuk-Bentuk Keputusan Bersama

Secara umum, keputusan bersama terbagi dalam dua bentuk yaitu bentuk tertulis dan tidak tertulis (lisan). Mari kita bahas bentuk keputusan bersama tersebut secara rinci, yaitu:

1. Keputusan Secara Tertulis

Keputusan secara tertulis adalah keputusan yang diambil secara bersama-sama didasarkan atas kesepakatan bersama. Keputusan tertulis biasanya dituangkan dalam bentuk dokumen tertulis. Contoh keputusan bersama secara tertulis di antaranya:

- a. Undang-Undang Dasar 1945
- b. Undang-undang
- c. Peraturan pemerintah
- d. Peraturan daerah, dan sebagainya.

Keputusan secara tertulis merupakan kesepakatan dari orang-orang yang membuatnya. Keputusan secara tertulis mempunyai kekuatan hukum yang kuat. Oleh karena itu, siapapun yang tidak melaksanakan peraturan tertulis tersebut akan dikenai sanksi atau hukuman. Keputusan tertulis disahkan dengan tanda tangan para pembuat keputusan. Tahukah kamu siapa yang membuat keputusan secara tertulis di negara kita? Keputusan secara tertulis di negara kita dibuat oleh lembaga legislatif yaitu MPR, DPR, dan DPD



Gambar 4. 2 Keputusan secara tertulis di tingkat negara dibuat oleh lembaga legislatif.
Sumber: www.dpr.go.id

2. Keputusan Lisan

Keputusan lisan merupakan keputusan yang diucapkan dengan lisan kita. Keputusan lisan berwujud kata-kata dan biasanya tidak dituangkan secara tertulis dalam bentuk dokumen. Keputusan lisan tidak mempunyai kekuatan hukum seperti halnya keputusan tertulis. Sanksi yang diberikan dalam pelanggaran keputusan lisan pun hanya bersifat ringan saja. Tahukah kamu contoh keputusan lisan? Contoh keputusan lisan di antaranya:

- a. Keputusan bapak kepala desa dalam hal pembagian pengairan sawah

- b. Keputusan bapak RT tentang jadwal ronda malam.
- c. Keputusan bapak RW tentang jadwal ronda malam.



Gambar 4. 3 Kegiatan ronda malam merupakan salah satu contoh keputusan yang diambil secara lisan.

Sumber: *Illustrator*



Latihan Soal 4.2

A. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan jawaban yang benar!

1. Sebutkan bentuk-bentuk keputusan bersama!
2. Apa yang kamu ketahui tentang perjanjian multilateral?
3. Sebutkan bentuk-bentuk perjanjian!
4. Mengapa istilah memorandum jarang digunakan dalam kehidupan bermasyarakat?
5. Siapa yang berhak menandatangani perjanjian tertulis?

B. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat!

1. Perjanjian berasal dari kata dasar
2. Perjanjian yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih disebut
3. Persetujuan secara tertulis ditandai dengan penggunaan
4. Terhadap pendapat teman yang berbeda, sebaliknya kita
5. Memotong pembicaraan orang lain merupakan tindakan yang



Tugas Kelompok

Kamu bersama teman sekelasmu akan berkunjung ke tempat bersejarah. Hal-hal apa saja yang perlu kamu musyawarahkan? Tulislah dalam tabel berikut ini!

No.	Hal-Hal yang Perlu Dimusyawahkan
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	



Tugas Mandiri

Amatilah keadaan di lingkungan sekitarmu! Sebutkan contoh-contoh kesepakatan-kesepakatan yang ada dalam masyarakat!

No.	Contoh-Contoh Kesepakatan
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

C. Cara Pengambilan Keputusan Bersama

Dalam pergaulan hidup antarmanusia, sering terjadi perbedaan pendapat. Namun, sesungguhnya perbedaan pendapat di antara kita merupakan suatu hal yang lumrah dan wajar.

Kita harus sadar bahwa perbedaan itu bukan untuk dipertentangkan atau diperebutkan melainkan untuk dicari solusi pemecahannya. Bagaimana cara yang tepat untuk mengambil keputusan bersama?

1. Musyawarah untuk Mufakat

Musyawarah termasuk salah satu bentuk atau cara untuk mencapai keputusan bersama. Musyawarah adalah membicarakan dan menyelesaikan bersama suatu persoalan dan maksud untuk mencapai kata mufakat atau kesepakatan. Kita mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama bukan untuk kepentingan bersama bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan.

Dalam musyawarah pasti akan ada pihak yang setuju maupun yang tidak setuju terhadap rancangan keputusan akan tetapi setelah melalui pertimbangan, dan tukar pikiran maka dicapai titik temu atau kesepakatan bersama.

Ciri-ciri musyawarah untuk mufakat antara lain:

- a. Sesuai dengan kepentingan bersama.
- b. Pembicaraan harus dapat diterima dengan akal sehat sesuai hati nurani.
- c. Usul atau pendapat yang disampaikan mudah dipahami dan tidak memberatkan.
- d. Dalam proses musyawarah pertimbangan moral lebih diutamakan dan bersumber dari hati nurani yang luhur dan sebagainya.

Selain itu, dalam musyawarah kita harus menunjukkan sikap-sikap sebagai berikut:

- a. Menghargai pendapat orang lain.
- b. Mampu mengendalikan diri saat mengikuti musyawarah.
- c. Bertanggung jawab terhadap teman yang mengajukan pendapat.
- d. Bijaksana terhadap pendapat teman yang berbeda.
- e. Mematuhi semua aturan yang berlaku dalam musyawarah.
- f. Bertanggung jawab dengan cara melaksanakan keputusan hasil musyawarah.

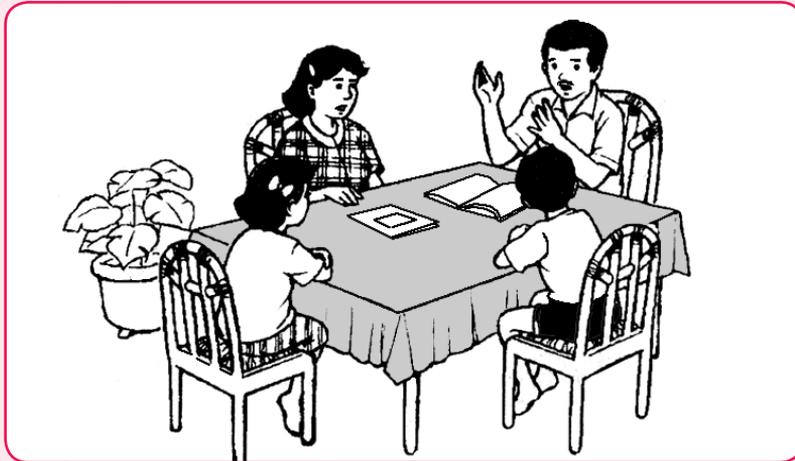
Dalam pelaksanaan musyawarah untuk mencapai mufakat kita harus berpedoman pada prinsip-prinsip dan aturan musyawarah, antara lain:

- a. Musyawarah dilandasi dengan akal sehat dan hati nurani yang luhur.
- b. Musyawarah dilandasi semangat kekeluargaan dan gotong-royong.
- c. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat.
- d. Menghargai pendapat orang lain dan tidak melaksanakan kehendak dalam musyawarah.
- e. Keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat, serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan.
- f. Melaksanakan keputusan bersama dengan dilandasi itikad baik dan penuh rasa tanggung jawab.

Kemauan untuk menggunakan musyawarah dalam menyelesaikan masalah harus menjadi kebiasaan setiap warga negara Indonesia di berbagai lingkungan kehidupan, antara lain sebagai berikut:

a. *Musywarah di lingkungan keluarga, misalnya:*

- 1) Menentukan tempat rekreasi keluarga.
- 2) Pemberian tugas yang harus dikerjakan tiap anggota keluarga.
- 3) Menentukan aturan-aturan dalam keluarga, dan sebagainya.



Gambar 4. 4 Musyawarah dalam keluarga untuk mencapai keputusan bersama.
Sumber: *Illustrator*

Keluarga Pak Hadi sedang berkumpul di ruang tamu.

“Besok libur, apakah ada rencana?” kata ayah.

“Besok kita pergi ke pantai saja,” kata Yono.

“Bertamasya ke kebun binatang”, kata Tuti.

“Kalau ibu, mau kerja bakti membersihkan rumah”, kata ibu.

“Mengapa Yono ingin pergi ke pantai?” tanya ayah.

“Bertamasya sambil menikmati keindahan alam”, kata Nono menjelaskan.

“Tuti, mengapa kamu ingin pergi ke kebun binatang?” tanya ayah.

“Di kebun binatang kita dapat mengenal macam-macam binatang” jawab Tuti.

“Bagaimana bu?” tanya ayah.

“Kedua usul itu baik. Namun, sudah lama kita tidak membersihkan rumah dan sebentar lagi akan ada perlombaan kebersihan”, kata ibu menjelaskan.

“Semua alasan bagus. Namun, pasti ada yang lebih penting”, kata ayah.

“Mana yang harus kita dahulukan”, tanya ayah.

Mereka berfikir sejenak.

Tidak lama kemudian Yono dan Tuti menjawab: “Membersihkan rumah, karena sebentar lagi ada perlombaan kebersihan”, alasan Yono.

“Bagus, bagus!” jawab ayah.

“Ini merupakan kesepakatan kita”, kata ibu.

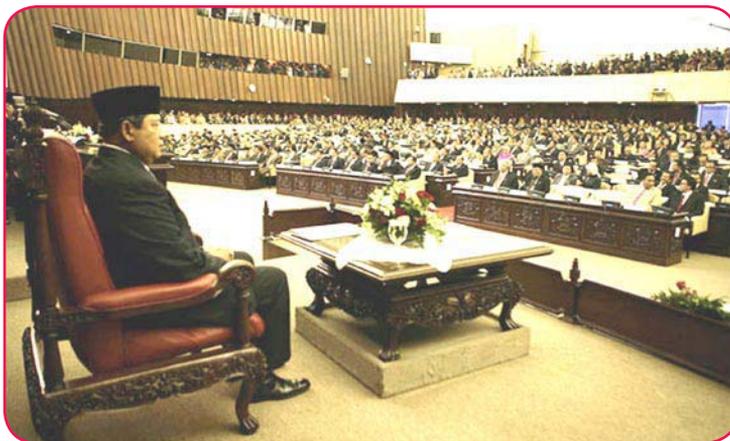
“Besok kita mengadakan kerja bakti membersihkan rumah dan halaman” kata ayah.

- b. Musyawarah di lingkungan sekolah, misalnya:
- 1) Memilih pengurus OSIS.
 - 2) Menentukan program kegiatan OSIS.
 - 3) Pemilihan ketua kelas.
 - 4) Menentukan tempat tujuan wisata, dan sebagainya.
- c. Musyawarah di lingkungan masyarakat, misalnya:
- 1) Pelaksanaan acara 17 Agustus-an.
 - 2) Membangun jalan.
 - 3) Rembug desa.
 - 4) Pembagian jadwal ronda/ siskamling.
 - 5) Memilih pengurus /LPMD, dan sebagainya.



Gambar 4. 5 Rembug desa contoh musyawarah di lingkungan masyarakat.
Sumber: www.pu.go.id

- d. Musyawarah di lingkungan kenegaraan, misalnya:
- 1) Rapat-rapat DPR/komisi.
 - 2) Membuat suatu undang-undang, dan sebagainya



Gambar 4. 6 Rapat MPR/DPR merupakan contoh musyawarah di lingkungan negara.
Sumber: www.presidentri.go.id

Pelaksanaan musyawarah untuk mufakat dapat terhambat atau sulit untuk dilakukan apabila:

- a. Peserta musyawarah hanya mementingkan diri sendiri/golongannya.
- b. Peserta musyawarah tidak menggunakan akal sehat dan hati nurani yang luhur.
- c. Peserta musyawarah berlaku tidak sopan dan bertutur kata tidak baik.
- d. Peserta musyawarah memaksakan kehendaknya.
- e. Peserta musyawarah tidak mau menghargai pendapat orang lain.

Musyawarah untuk mufakat harus dilandasi dengan semangat kekeluargaan. Musyawarah untuk mufakat merupakan pengamalan Pancasila, yaitu sila keempat yang berbunyi “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.”

Dengan musyawarah suatu persoalan akan mudah terpecahkan, sehingga dicapai suatu keputusan atau kata sepakat. Manfaat yang diperoleh jika menyelesaikan masalah secara musyawarah yaitu:

- a. Masalah dapat cepat terpecahkan.
- b. Keputusan yang diambil memiliki nilai keadilan.
- c. Hasil keputusan menguntungkan semua pihak.
- d. Dapat menyatukan pendapat yang saling berbeda.
- e. Adanya kebersamaan, dan sebagainya.

2. Pemungutan Suara (Votting)

Siswa kelas tiga mengadakan musyawarah, mereka bermusyawarah untuk menentukan objek wisata pada liburan nanti. Musyarah dipimpin oleh Ali ketua kelas lima. Anita mengusulkan pergi ke pantai, Budi mengusulkan ke museum, dan Rina mengusulkan ke kebun binatang. Anita menolak dan mengejek usulan Budi dan Rina. Mereka tidak ada yang mau mengalah. Akhirnya Ali mengambil inisiatif untuk melakukan pemungutan suara. Akhirnya dicapai keputusan berdasarkan suara terbanyak bahwa tempat tujuan wisata adalah ke pantai.

Pengambilan keputusan bersama melalui pemungutan suara merupakan alternatif terakhir ketika pengambilan keputusan melalui musyawarah tidak tercapai. Hasil keputusan melalui pemungutan suara juga harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Pengambilan keputusan bersama dengan cara pemungutan suara dapat kita jumpai dalam pemilihan presiden, pemilihan kepala daerah, dan sebagainya.



Gambar 4. 7 Pemungutan suara dilakukan apabila musyawarah tidak menemui titik temu.

Sumber: Dokumentasi

Keputusan berdasarkan pemungutan suara (votting) ditempuh apabila keputusan berdasarkan musyawarah mufakat tidak dapat dilakukan. Votting berarti sistem pengambilan keputusan berdasarkan pemungutan suara. Votting juga diartikan sebagai perolehan suara terbanyak.

Pengambilan suara berdasarkan votting dibagi menjadi dua macam, yaitu:

- Votting* terbuka, yaitu setiap anggota rapat memberikan suara dengan mengatakan setuju, menolak, atau *abstain* (tidak memberikan suara). Votting secara terbuka biasanya dilaksanakan secara lisan. Caranya dengan mengangkat tangan atau berdiri. Kemudian petugas, menghitungnya secara langsung, dan saat itu juga dapat diketahui hasilnya. Votting terbuka dilakukan terhadap hal yang menyangkut masalah keputusan atau kebijakan.
- Votting* tertutup, yaitu setiap anggota rapat memberikan suara dengan cara menuliskan nama atau pilihannya di kertas yang telah disediakan lalu dikumpulkan dan dihitung. Keputusan dianggap sah apabila diambil dalam rapat yang dihadiri dua pertiga tambah satu anggota *kuorum* dan disetujui lebih dari setengah dari jumlah yang hadir



Latihan Soal 4.3

 **Carilah 5 kata dalam acak kata berikut yang berhubungan dengan keputusan bersama!**

S	I	M	A	K	E	T	R	I	A	N
V	M	U	S	Y	A	W	A	R	A	H
O	B	F	U	S	D	A	W	A	L	I
T	E	A	N	A	I	K	H	L	A	S
I	B	K	O	C	L	A	H	T	U	A
N	A	A	K	E	D	G	U	N	A	R
G	I	T	S	E	P	A	K	A	T	P



Tugas Kelompok

Bersama teman-temanmu, buatlah satu peraturan baru di kelasmu, bacakan peraturan tersebut di depan kelas.

Hitunglah berapa jumlah orang yang setuju dan tidak setuju!

Jika lebih banyak yang setuju, tetapkanlah usulan tersebut sebagai peraturan kelas!

Jumlah yang Setuju	Jumlah yang Tidak Setuju
.....



Tugas Mandiri

Lakukanlah pengamatan terhadap pelaksanaan musyawarah di sekolahmu! Amatilah jalannya musyawarah hingga proses pengambilan keputusan! Tulislah cara anggota musyawarah dalam menghargai keputusan bersama tersebut!

Jenis Musyawarah	Cara Menghargai Keputusan
Kesimpulan:	

D. Melaksanakan Hasil Keputusan Bersama

Keputusan bersama dapat dicapai setelah masalah-masalah yang dimusyawarahkan dapat dicapai mufakat.

1. Menerima Hasil Keputusan Bersama

Dalam musyawarah semua pihak harus mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi dan golongan. Bila musyawarah telah mencapai mufakat, maka hasil pemufakatan menjadi keputusan bersama. Semua pihak harus menerima keputusan bersama dengan ikhlas, penuh tanggung jawab, dan lapang dada.

Berikut ini adalah beberapa cara menerima hasil keputusan bersama, yaitu:

- Semua pihak mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi dan golongan.
- Semua pihak memahami dengan baik masalah yang dimusyawarahkan.
- Semua pihak menghormati dan menghargai perbedaan pendapat.
- Semua pihak harus menerima dan terbuka setiap kritik, usul, dan saran.
- Semua pihak harus menyadari bahwa keputusan yang dihasilkan adalah keputusan yang terbaik demi kepentingan bersama.
- Semua pihak harus mampu menahan diri agar tidak memaksakan kehendak, bila pendapatnya tidak diterima.

Nasihat Bijak

Sebuah keputusan bersama harus ditaati. Kenapa? Karena keputusan tersebut dibuat untuk kepentingan bersama. Apa yang akan terjadi bila hasil keputusan bersama tidak ditaati? Kita akan dijauhi oleh orang-orang di sekitar kita jika kita tidak mematuhi keputusan bersama. Bahkan mungkin kita akan dibenci dan dikucilkan dari pergaulan masyarakat.

2. Melaksanakan Hasil Keputusan Bersama

Setelah semua pihak dapat menerima hasil keputusan bersama, langkah selanjutnya adalah melaksanakan keputusan tersebut. Semua pihak harus ikhlas dan penuh tanggung jawab melaksanakan keputusan bersama. Keputusan bersama merupakan penyelesaian masalah dihasilkan melalui musyawarah, tukar pikiran, tukar pendapat, serta sumbang saran untuk mencapai mufakat. Hasil keputusan bersama mengikat semua pihak untuk mematuhi.

Hasil keputusan bersama dilaksanakan dengan ikhlas dalam kehidupan sehari-hari. Melaksanakan keputusan dengan ikhlas berarti melaksanakan keputusan dengan hati yang bersih dan jujur. Dalam melaksanakan hasil keputusan bersama tidak boleh dengan rasa benci atau dendam. Karena keputusan tersebut adalah untuk kepentingan bersama. Jadi, dalam melaksanakan hasil keputusan bersama, hal-hal yang harus diperhatikan oleh semua pihak adalah:

- a. Hasil keputusan bersama harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia.
- b. Hasil keputusan bersama harus dilaksanakan dan dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- c. Hasil keputusan bersama harus dilaksanakan dengan memerhatikan nilai-nilai kebenaran dan keadilan.

Masalah-masalah yang ada dalam masyarakat sangat kompleks, oleh karena itu perlu dikembangkan kesadaran dalam hal-hal seperti:

- a. Menciptakan suasana yang akrab penuh rasa kekeluargaan untuk secara terbuka saling mengingatkan apabila ada kelalaian dalam pelaksanaan keputusan bersama.
- b. Melaksanakan keputusan bersama dengan ikhlas penuh rasa tanggung jawab.
- c. Selalu membina kerja sama, rasa setia kawan, dan disiplin agar keputusan musyawarah dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
- d. Setiap warga menerima hasil musyawarah sebagai keputusan bersama yang harus dilaksanakan untuk kesejahteraan bersama.
- e. Membina kerja sama sehingga tercipta suasana saling membantu, untuk mewujudkan tujuan musyawarah.
- f. Berusaha untuk memahami, bahwa perbedaan cara pandang bukan sebagai kendala, melainkan dimanfaatkan untuk memperkaya dan mendukung pelaksanaan berbagai hal yang telah disepakati bersama.

Pelaksanaan hasil keputusan bersama dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti dalam lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat.

a. Dalam lingkungan keluarga

Keputusan menyangkut tugas tiap anggota keluarga. Setiap anggota keluarga dengan ikhlas melaksanakan tugas yang menjadi bagiannya, seperti tugas menyapu lantai, mencuci piring, membersihkan halaman, dan sebagainya.



Gambar 4. 8 Kerja bakti membersihkan rumah yang setiap anggota keluarga mempunyai tugas masing-masing.

Sumber: ilustrasi

b. Dalam lingkungan sekolah

Keputusan bersama terlihat dalam pelaksanaan tata tertib sekolah. Misalnya: Setiap siswa memakai seragam sekolah, guru mengajar dengan sungguh-sungguh, belajar dengan penuh disiplin, dan sebagainya.



Gambar 4. 9 Siswa berpakaian seragam sekolah merupakan bentuk mematuhi keputusan bersama.

Sumber: www.depdiknas.go.id

c. Dalam lingkungan masyarakat

Keputusan menyangkut peraturan mengikat seluruh warga masyarakat. Di lingkungan masyarakat biasanya ada kepala desa, lurah, rukun warga (RW), rukun tetangga (RT), dan pemuka masyarakat. Mereka biasanya memimpin musyawarah antarwarga. Musyawarah menghasilkan

keputusan bersama yang harus diterima dan dilaksanakan oleh masyarakat. Misalnya, keputusan untuk melakukan gotong-royong membersihkan lingkungan, menjaga keamanan lingkungan dengan ronda malam bergiliran, dan berbagai tugas sosial yang lain.



Gambar 4. 10 Melakukan gotong royong dengan ikhlas merupakan bentuk mematuhi keputusan bersama.

Sumber: www.budpar.go.id

Pernahkah kalian melanggar keputusan bersama? Apa yang akan terjadi jika keputusan bersama tidak dilaksanakan dengan semestinya? Apabila keputusan bersama tidak dipatuhi maka tujuan dari keputusan tersebut tidak akan tercapai. Di samping itu, akan muncul banyak permasalahan yang lain bila kita melanggar keputusan tersebut. Berikut ini diuraikan bentuk-bentuk sikap dan perilaku yang tidak mematuhi keputusan bersama, antara lain:

- a. Melanggar keputusan dengan cara tidak mau melaksanakan isi keputusan.
- b. Lari dari tanggung jawab yang harus dipikulnya.
- c. Tidak mau menghargai pendapat orang lain dan maunya menang sendiri.
- d. Memprovokasi orang lain untuk tidak melaksanakan hasil keputusan.
- e. Mensabotase hasil keputusan dengan cara yang licik dan sebagainya.

Bentuk-bentuk perilaku di atas akan berakibat pada hancurnya keputusan yang telah disepakati bersama dan rusaknya persatuan dan kesatuan di antara pihak-pihak yang mengadakan keputusan. Sikap tercela di atas juga bisa memicu terjadinya konflik berkepanjangan. Oleh karena itu sewajarnya kita sebagai manusia wajib menghargai dan menghormati segala hasil keputusan dengan mematuhi dan melaksanakan hasil keputusan itu dengan penuh tanggung jawab dan ikhlas.

3. Hambatan-Hambatan dalam Mematuhi Keputusan Bersama

Seperti halnya usaha atau kegiatan lainnya, upaya mematuhi keputusan bersama pun memilikihambatan atau kendala. Hambatan dalam upaya mematuhi keputusan bersama datang dari dalam dan luar:

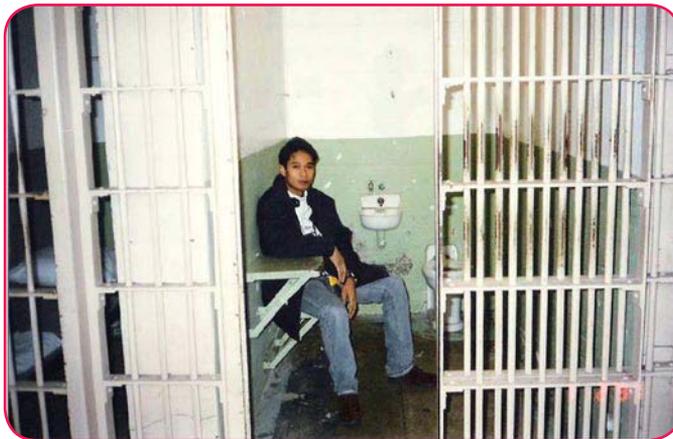
- a. Hambatan dari dalam, yaitu hambatan yang berasal dari peserta musyawarah itu sendiri, seperti:
 - 1) Tidak tertampungnya keinginan atau pendapat peserta.
 - 2) Peserta musyawarah merasa ingin menang sendiri.
 - 3) Peserta musyawarah mementingkan kepentingan kelompoknya tanpa menghiraukan kepentingan bersama.

- 4) Peserta musyawarah bersikap tidak mau tahu dalam setiap pembahasan masalah.
 - 5) Peserta musyawarah yang tidak mau menerima kritik dan saran dari orang lain.
- b. Hambatan dari luar, yaitu hambatan yang berasal dari luar kelompok musyawarah, seperti:
- 1) Menghasut dan memengaruhi hasil keputusan yang telah diambil.
 - 2) Meniru dan mencontoh hasil keputusan kelompok lain tanpa izin.
 - 3) Memengaruhi pihak-pihak lain dalam pengambilan keputusan.

4. Akibat-Akibat Tidak Mematuhi Keputusan Bersama

Telah disebutkan pada pembahasan di depan, bahwa setiap pengambilan dan pelaksanaan keputusan bersama selalu diwarnai oleh pihak yang setuju atau tidak setuju. Pihak yang tidak setuju dalam upaya mematuhi keputusan bersama menimbulkan beberapa akibat, antara lain:

- a. merasa bersalah,
- b. dikucilkan dari kelompok,
- c. tidak percaya orang lain,
- d. sanksi atau teguran dari kelompok lainnya,
- e. pemecatan dari keanggotaan kelompok tertentu,
- f. dipidana penjara atau harus mengganti kerugian, dan sebagainya.



Gambar 4. 11 Salah satu akibat tidak mematuhi keputusan bersama adalah dipidana penjara.

Sumber: Dokumentasi



Latihan Soal 4.4

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan jawaban yang benar!

1. Sebutkan 3 masalah di sekolah yang biasa dibahas melalui musyawarah!
2. Mengapa cara pengambilan keputusan bersama dengan musyawarah lebih baik dibandingkan dengan cara lain?
3. Bagaimana sikapmu jika dalam musyawarah pendapatmu tidak diterima?
4. Bagaimana menurutmu jika dalam musyawarah terjadi perbedaan pendapat?
5. Apa yang akan terjadi jika kita melanggar keputusan bersama?



Tugas Kelompok

- ✓ **Lakukan tugas berikut ini secara berkelompok!**
1. Buatlah kelompok yang terdiri dari 4-5 siswa!
 2. Lakukan pengamatan terhadap kegiatan musyawarah mufakat yang dilakukan di sekitar sekolahmu!
 3. Mintalah izin kepada bapak atau ibu guru ketika mengamati kegiatan tersebut!
 4. Amatilah peserta musyawarah tersebut secara saksama! Apakah dalam mengikuti musyawarah mereka telah bersikap menghargai pendapat orang lain, tenggang rasa, mengendalikan diri, bijaksana, tanggung jawab, dan taat asas?



Tugas Mandiri

Apakah di rumahmu pernah dilaksanakan musyawarah? Hal apa yang biasanya dibicarakan?

Ceritakan/tulislah dalam sebuah karangan singkat, kemudian bacalah di depan kelas!



Rangkuman

- Keputusan bersama adalah keputusan yang diambil dengan melibatkan banyak orang dan untuk kepentingan bersama.
- Bentuk-bentuk keputusan adalah:
 - a. Keputusan tertulis.
 - b. Keputusan lisan.
- Musyawarah adalah salah satu cara untuk menyelesaikan bersama suatu persoalan dengan maksud untuk mencapai kata mufakat.
- Votting adalah pengambilan keputusan bersama melalui pemungutan suara.
- Menerima keputusan bersama harus dengan rasa ikhlas, bertanggung jawab, dan lapang dada.
- Pelaksanaan hasil keputusan bersama dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari seperti dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat.
- Hambatan-hambatan dalam mematuhi keputusan bersama dapat berasal dari dalam ataupun dari luar pribadi pengambil keputusan.



Uji Kompetensi

Kerjakan di buku tugas kalian!

A. Uji Pemahaman Konsep

I. Pilihlah huruf a, b, c, atau d di depan jawaban yang paling tepat!

- Hakikat keputusan musyawarah merupakan keputusan oleh
 - semua peserta
 - semua kelompok
 - kelompok tertentu
 - beberapa golongan
- Cara yang tepat untuk menerima hasil keputusan bersama adalah
 - semua pihak harus bisa memaksakan kehendaknya
 - semua pihak menyadari bahwa keputusan yang dihasilkan adalah keputusan terbaik
 - semua pihak mengutamakan sendiri
 - semua pihak tidak mau menghargai perbedaan pendapat
- Di bawah ini **bukan** merupakan permasalahan yang biasanya dimusyawarahkan dalam kehidupan adalah
 - kerja bakti desa
 - ronda malam
 - tugas mencuci pakaian
 - membangun jalan
- Dalam lingkungan sekolah, keputusan yang menyangkut peraturan dan tata tertib sekolah harus dipatuhi oleh
 - siswa
 - kepala sekolah
 - karyawan sekolah
 - seluruh warga sekolah
- Dalam demokrasi Pancasila, putusan diambil secara musyawarah berdasarkan
 - pemungutan suara
 - suara terbanyak
 - kata sepakat
 - semangat kekeluargaan
- Dalam kehidupan bersama kita harus memerhatikan kepentingan
 - bersama
 - perseorangan
 - sosial
 - negara
- Kita tidak boleh berpendapat mutlak-mutlakan dan kita tidak boleh merasa
 - berkuasa
 - senang atau sedih
 - berbangsa
 - ikhlas
- Perbedaan pendapat dapat diselesaikan dengan cara
 - konsensus
 - memaksakan kehendak
 - mengikuti perintah atasan
 - mematuhi instruksi pemerintah
- Kebebasan mengeluarkan pendapat merupakan sendi pokok kehidupan
 - otokrasi
 - demokrasi
 - aristrokrasi
 - birokrasi
- Kebebasan berpikir dijamin dan dilindungi oleh
 - peraturan pemerintah
 - UUD
 - hak asasi
 - demokrasi
- Dalam musyawarah kita harus menghargai dan menghormati
 - kepala negara
 - kedaulatan negara
 - pendapat orang lain
 - perintah atasan

12. Persetujuan secara tertulis ataupun lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih disebut
 - a. perjanjian
 - b. kesepakatan
 - c. memorandum
 - d. persetujuan
13. Memahami keputusan bersama adalah hal yang bersifat
 - a. wajib
 - b. buruk
 - c. tercela
 - d. tidak perlu
14. Menghargai pendapat orang tua adalah bentuk dari upaya
 - a. memberontak terhadap keputusan
 - b. mematuhi keputusan bersama
 - c. negatif dari sebuah keputusan
 - d. positif dari sebuah keputusan
15. Berikut ini yang bukan merupakan bentuk-bentuk keputusan bersama adalah
 - a. perjanjian
 - b. kesepakatan
 - c. memorandum
 - d. referendum
16. Keputusan yang diambil dalam sebuah pengambilan keputusan wajib dilaksanakan dengan penuh
 - a. rasa perikemanusiaan
 - b. kekeluargaan
 - c. gotong royong
 - d. rasa tanggung jawab
17. Pengalaman organisasi di sekolah bekal utama siswa jika nanti telah
 - a. dewasa
 - b. berhasil
 - c. terjun dalam masyarakat
 - d. jadi orang terkenal
18. Pramuka adalah organisasi sekolah yang berlambang
 - a. padi dan kapas
 - b. pohon beringin
 - c. tunas kelapa
 - d. kepala banteng
19. Organisasi Siswa Intra Sekolah merupakan kepanjangan dari
 - a. UKS
 - b. PKS
 - c. PMR
 - d. OSIS
20. Di bawah ini yang bukan merupakan tindakan-tindakan yang merugikan dalam pelaksanaan hasil keputusan bersama, adalah
 - a. lari dari hasil musyawarah
 - b. membujuk orang lain untuk tidak melaksanakan keputusan
 - c. mampu mengendalikan diri saat bermusyawarah
 - d. mensabotase hasil keputusan musyawarah
21. Ciri utama masyarakat demokrasi yang ada di Indonesia adalah pengambilan keputusan dengan cara
 - a. musyawarah untuk mufakat
 - b. bergotong royong
 - c. sistem kekerabatan dan kekeluargaan
 - d. pengambilan suara terbanyak
22. Hal-hal yang tidak harus diperhatikan saat pengambilan keputusan adalah
 - a. hasil keputusan bersama harus bermanfaat
 - b. hasil keputusan bersama harus sesuai dan menghormati hak asasi manusia
 - c. hasil keputusan bersama harus berdasarkan pada asas keadilan
 - d. sesuai dengan kepentingan sekelompok orang
23. Setiap peserta rapat atau musyawarah mempunyai hak untuk
 - a. menyampaikan pendapat
 - b. menolak kesepakatan
 - c. menghentikan rapat
 - d. membubarkan acara
24. Musyawarah untuk mufakat merupakan bentuk pengamalan Pancasila, terutama sila ke

- a. lima
 - b. empat
 - c. tiga
 - d. dua
25. Musyawarah adalah membahas secara bersama-sama suatu masalah untuk mencapai
- a. musyawarah
 - b. mufakat
 - c. pungutan suara
 - d. pertandingan suara
26. Bila pendapatnya tidak diterima, maka sikap peserta musyawarah sebaiknya
- a. marah-marah
 - b. memaksakan kehendak
 - c. tidak melanjutkan rapat
 - d. menahan diri dan berusaha mencari pendapat lain yang bisa diterima
27. Musyawarah bertujuan untuk mencapai
- a. keberhasilan
 - b. mufakat
 - c. keberuntungan
 - d. suara terbanyak
28. Musyawarah berasaskan kebersamaan, kekeluargaan, dan
- a. keberagaman
 - b. kebermanfaatan
 - c. gotong royong
 - d. kerakyatan
29. Hasil keputusan bersama harus
- a. diterima dan diabaikan
 - b. dicatat dan diumumkan
 - c. dihargai dan diabadikan
 - d. diterima dan dijalankan
30. Pendapat orang lain harus didengarkan dan
- a. dibiarkan
 - b. dipertimbangkan
 - c. dipermasalahkan
 - d. diperhitungkan

II. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat!

1. Mematuhi keputusan yang diambil secara bersama merupakan tanggung jawab
2. Apabila keputusan tidak dipatuhi maka tujuan keputusan tidak akan
3. Keputusan yang diambil dalam musyawarah harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada
4. Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak disebut
5. Persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih disebut
6. Musyawarah dilakukan untuk mencapai kata
7. Keputusan bersama yang hanya digunakan dalam rangka hubungan diplomatis dengan negara lain adalah
8. Musyawarah dilaksanakan untuk memutuskan kepentingan
9. Memaksakan kehendak dalam musyawarah harus kita
10. Keputusan/kesepakatan yang dilanggar dapat menimbulkan

III. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan jawaban yang benar!

1. Apakah yang dimaksud dengan musyawarah untuk mufakat?
2. Sebutkan 3 contoh musyawarah di lingkungan masyarakat!
3. Bagaimanakah manfaat dari menyelesaikan masalah melalui musyawarah?

4. Bagaimana cara menerima hasil keputusan bersama?
5. Bilamana suatu keputusan bersama dianggap tidak sah?

B. Penerapan

Tuliskan sikapmu terhadap pernyataan-pernyataan berikut ini!

No	Penyataan	Sikapmu
1.	Heri ingin sekali bermain sepak bola. Tetapi hari ini hujan deras. Setelah berpikir terlebih dahulu akhirnya Heri memutuskan tinggal di rumah saja.
2.	Wati dan Rudi meminta izin tidak mengikuti pemilihan ketua kelas dengan alasan yang dibuat-buat dan tidak masuk akal.
3.	Yoga menolak hasil musyawarah karena Yoga membenci Budi yang merupakan ketua musyawarah kelas.
4.	Diana menonton televisi sampai larut malam. Akibatnya Diana tidak belajar, padahal besok pagi ada ulangan Pendidikan Kewarganegaraan. Akhirnya Diana memutuskan untuk membolos sekolah.
5.	Iwan melaksanakan piket kelas dengan rajin dan disiplin meskipun saat musyawarah pembagian tugas piket kelas, Iwan tidak hadir karena sakit.



Ulangan Semester 2

Kerjakan di buku tugas kalian!

I. Pilihlah huruf a, b, c, atau d di depan jawaban yang paling tepat!

- Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Pernyataan ini termuat dalam UUD 1945 Pasal
 - 1 Ayat (2)
 - 1 Ayat (1)
 - 2 Ayat (1)
 - 2 Ayat (2)
- Bangsa adalah suatu masyarakat dalam suatu daerah yang sama dan mereka tunduk kepada kedaulatan
 - sukunya
 - daerahnya
 - agamanya
 - negaranya
- Kemerdekaan bangsa Indonesia diraih berkat adanya
 - keprihatinan yang tinggi
 - persatuan dan kesatuan
 - dendam kepada penjajah
 - penderitaan bangsa Indonesia
- Alasan bangsa Indonesia memilih bentuk negara kesatuan adalah
 - agar rakyatnya mudah diatur
 - agar dikagumi oleh bangsa lain
 - karena tuntutan jiwa Pancasila
 - karena pesan para pendahulu bangsa
- Mampu menghadapi berbagai rintangan berarti
 - memiliki ketahanan menuju kemajuan
 - berwibawa dan disegani setiap orang
 - punya rasa kasih sayang yang tulus
 - kecerdasan sangat tinggi
- Sikap rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara dapat ditunjukkan melalui tindakan
 - merelakan tanahnya untuk diperlebar jalan
 - bekerja keras demi kepentingan keluarga
 - membantu tetangga yang sedang tertimpa musibah
 - menjadi anggota kelompok tani
- Ketahanan sekolah diciptakan melalui
 - persaingan yang ketat
 - kerukunan di sekolah
 - perlombaan antarmurid
 - kerukunan di kampung
- Lembaga yang merupakan ketahanan masyarakat di desa adalah
 - LMD
 - LKMD
 - PKK
 - siskamling
- Ketahanan nasional tercipta karena kita memegang teguh pada kebenaran dan
 - kekuasaan
 - keadilan
 - kesatuan
 - kehormatan
- Kewajiban warga negara yang diatur dalam UUD 1945, antara lain
 - memperoleh pendidikan
 - membela bangsa dan negara
 - berkumpul dan berserikat
 - memperoleh perlindungan
- Berikut ini yang wajib mematuhi tata tertib di sekolah adalah
 - siswa
 - guru
 - kepala sekolah
 - semua warga sekolah
- Salah satu ciri sekolah yang memiliki ketahanan adalah
 - mempunyai tempat ibadah
 - mempunyai lapangan olahraga
 - mempunyai koperasi
 - dapat memajukan bangsa

13. Di bawah ini adalah hal-hal yang ingin dicapai seseorang dalam berorganisasi adalah
 - a. kekayaan
 - b. kebenaran
 - c. memajukan anggota
 - d. tidak mempunyai tujuan
14. Organisasi siswa intra sekolah (OSIS) beranggotakan
 - a. guru
 - b. siswa
 - c. pekerja
 - d. masyarakat
15. Berikut ini yang bukan merupakan ciri-ciri organisasi, adalah
 - a. identitas yang jelas
 - b. tujuan yang jelas
 - c. struktur yang jelas
 - d. lambang dan bendera yang jelas
16. Berikut ini bukan merupakan organisasi yang berada di lingkungan sekolah, adalah
 - a. OSIS
 - b. PMR
 - c. pramuka
 - d. karang taruna
17. Istilah lain untuk menyebut pramuka adalah
 - a. praja muda karena
 - b. karang taruna muda
 - c. remaja muda
 - d. praja muda
18. Secara garis besar, organisasi sosial dibedakan menjadi dua kelompok yaitu
 - a. organisasi formal dan informal
 - b. organisasi umum dan khusus
 - c. organisasi terdaftar dan tidak terdaftar
 - d. organisasi agama dan nonagama
19. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam organisasi adalah
 - a. sarana guru
 - b. minat dan bakat
 - c. ikut-ikutan teman
 - d. jumlah pesertanya
20. Organisasi sosial adalah organisasi yang berada di lingkungan
 - a. sekolah
 - b. masyarakat
 - c. negara
 - d. internasional
21. Organisasi informal yang mewadahi berbagai macam kreativitas, minat, dan bakat remaja adalah
 - a. paguyuban
 - b. ikatan remaja masjid
 - c. kelompok kesenian
 - d. karang taruna
22. Pengalaman organisasi di sekolah adalah bekal utama siswa jika nanti telah
 - a. dewasa
 - b. berhasil
 - c. jadi orang terkenal
 - d. terjun dalam masyarakat
23. Induk organisasi yang menaungi keberadaan PMR adalah
 - a. PMI
 - b. apotik
 - c. poliklinik
 - d. rumah sakit
24. UKS biasanya berada di bawah pimpinan seorang
 - a. bidan
 - b. dokter
 - c. perawat
 - d. kepala sekolah
25. Berikut ini jenjang sekolah yang tidak memiliki OSIS adalah
 - a. SLTP
 - b. SMU
 - c. MAN
 - d. SD
26. Aturan-aturan yang dibuat oleh badan-badan resmi mempunyai sifat antara lain
 - a. memaksa
 - b. menyeluruh
 - c. memihak
 - d. menyenangkan

27. Rancangan undang-undang dapat diajukan oleh
 - a. presiden atau DPR
 - b. DPR dan gubernur
 - c. presiden dan gubernur
 - d. presiden dan menteri
28. Peraturan daerah provinsi dibuat oleh
 - a. gubernur
 - b. DPRD provinsi
 - c. gubernur bersama DPRD provinsi
 - d. bupati dan gubernur
29. Sikap yang perlu dikembangkan dalam musyawarah adalah
 - a. mau menang sendiri
 - b. mendengarkan pendapat orang lain
 - c. mengaku diri lebih hebat
 - d. memotong pembicaraan orang lain
30. Peraturan di rumah biasanya diputuskan oleh
 - a. anak
 - b. guru
 - c. orang tua
 - d. ketua
31. Pilihan yang dipilih dan dilaksanakan atas dasar beberapa pilihan disebut
 - a. keputusan
 - b. peraturan
 - c. program
 - d. musyawarah
32. Sebelum mengambil sebuah keputusan, sebaiknya
 - a. mendapat pengaruh teman
 - b. mempertimbangkan akibat keputusan kita
 - c. mendengarkan nasihat orang tua
 - d. mendengarkan saran dari guru
33. Keputusan yang salah dapat merugikan
 - a. orang tua
 - b. teman
 - c. diri sendiri
 - d. diri sendiri dan orang lain
34. Pihak yang tidak harus mengikuti peraturan sekolah
 - a. guru
 - b. kepala sekolah
 - c. siswa
 - d. pedagang pasar
35. Dalam pemungutan suara, keputusan diambil dari
 - a. suara terbanyak
 - b. musyawarah mufakat
 - c. kerja bakti
 - d. bakti sosial
36. Dalam rangka menjaga keamanan lingkungan, warga melakukan
 - a. ronda malam
 - b. gotong royong
 - c. kerja bakti
 - d. bakti sosial
37. Berikut adalah contoh hasil keputusan bersama
 - a. makan es krim
 - b. peraturan
 - c. pengurus kelas
 - d. tempat tujuan wisata
38. Pengambilan keputusan bersama sedapat mungkin dilakukan secara
 - a. pemungutan suara
 - b. pemaksaan
 - c. penunjukan
 - d. musyawarah
39. Pemakaian seragam di sekolah selain menanamkan jiwa persatuan juga menanamkan sikap
 - a. keteladanan
 - b. kesederhanaan
 - c. kebanggaan
 - d. keadilan
40. Peraturan perundang-undangan yang dibuat DPR bersama presiden dan memiliki kekuatan mengikat seluruh rakyat Indonesia adalah
 - a. peraturan
 - b. undang-undang
 - c. ketetapan MPR
 - d. UUD 1945

41. Fungsi hukum atau peraturan adalah ...
 - a. membuat masyarakat jera
 - b. menciptakan kebenaran dan keadilan
 - c. membatasi tingkah laku manusia
 - d. membuat pemerintah berwibawa
42. Kesadaran hukum di sekolah dilakukan dengan
 - a. menaati tata tertib sekolah
 - b. membayar BP3 tepat waktu
 - c. mendengarkan penjelasan guru
 - d. datang ke sekolah terlambat
43. Dalam musyawarah, keputusan yang dicapai sebaiknya atas dasar kepentingan
 - a. pribadi
 - b. umum
 - c. kelompok
 - d. sendiri
44. Warga desa sedang berkumpul di balai desa untuk melaksanakan *rembug desa*. Rembug desa dipimpin oleh
 - a. kepala desa
 - b. kepala dusun
 - c. ketua RW
 - d. ketua RT
45. Kegiatan di bawah ini yang tidak perlu dimusyawarahkan adalah
 - a. melihat TV
 - b. ronda malam
 - c. pemilihan ketua RT
 - d. perbaikan selokan
46. Sila keempat dari Pancasila dilambangkan dengan gambar
 - a. bintang
 - b. rantai
 - c. pohon beringin
 - d. kepala banteng
47. Untuk menyelesaikan kesulitan dalam keluarga sebaiknya
 - a. diserahkan kepada ayah
 - b. dimusyawarahkan bersama
 - c. dimusyawarahkan bapak dan ibu
 - d. diserahkan kepada orang lain
48. Dalam musyawarah hendaknya diliputi semangat
 - a. kerja sama
 - b. guyup rukun
 - c. gotong royong
 - d. kekeluargaan
49. Musyawarah untuk mencapai mufakat haruslah dilaksanakan dengan akal sehat dan
 - a. hati nurani yang luhur
 - b. sikap dingin
 - c. sikap ingin menang sendiri
 - d. menerima dengan penuh kesadaran
50. Apabila ada teman yang mengajukan usul dalam musyawarah, sikap kita adalah
 - a. menghormati
 - b. menertawakan
 - c. mengacuhkan
 - d. menyindir

II. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat !

1. NKRI merupakan singkatan dari
2. Peran serta warga negara dalam ketahanan negara tercantum dalam UUD 1945 Pasal ... Ayat
3. Adanya identitas, tujuan, anggota, dan struktur yang jelas merupakan ... organisasi.
4. Persatuan olahraga, paguyuban, dan karang taruna adalah contoh dari organisasi
5. Organisasi sekolah yang bergerak dalam bidang kemanusiaan adalah
6. Memaksakan kehendak termasuk perbuatan yang

7. Dalam musyawarah, yang diutamakan adalah kepentingan
8. Jika kita ingin mengutarakan pendapat dalam musyawarah hendaknya dengan sikap....
9. Keputusan MPR yang mengikat ke dalam maupun ke luar disebut
10. Suatu negara yang segala sesuatunya didasarkan pada aturan yang berlaku disebut negara

III. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan jawaban yang benar!

1. Apa yang akan terjadi jika rakyat Indonesia tidak bisa menjaga keutuhan NKRI?
2. Mengapa para pahlawan rela berkorban jiwa dan raga demi kemerdekaan Indonesia?
3. Sebutkan tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia menurut Undang-Undang No 10 Tahun 2004!
4. Bagaimana cara membagi waktu antara berorganisasi dengan belajar?
5. Bagaimana kelemahan dan kelebihan pengambilan keputusan bersama secara *votting*?

Glosarium

- Amandemen : usul, perubahan rancangan undang-undang yang dibicarakan dalam DPR
- Bela negara : sikap dan perilaku warga negara dalam menjaga kelangsungan hidup negaranya
- Berdaulat : mempunyai kekuasaan tertinggi atas suatu pemerintahan negara/daerah
- Berserikat : bersatu
- Bilateral : kerja sama yang dilakukan oleh dua pihak saja
- De facto : menurut kenyataan yang sesungguhnya (pengakuan atas suatu pemerintahan) menurut hakikatnya
- De jure : berdasarkan hukum (pengakuan atas suatu pemerintahan)
- Demokrasi : pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat
- Fraksi : bagian kecil, pecahan, kelompok dalam DPR yang terdiri atas partai-partai politik dalam pemilu
- Elemen negara : unsur negara
- Grasi : ampunan yang diberikan oleh kepala negara kepada orang yang telah dijatuhi hukuman
- Inovator : gagasan atau metode yang menyangkut hal-hal baru
- Kemajemukan : terjadi dari beberapa bagian yang merupakan kesatuan
- Musyawarah : cara menyelesaikan masalah secara demokratis demi kepentingan bersama
- Mahkamah : badan tempat memutuskan hukum atas suatu perkara, pelanggaran, dan pengadilan
- Negara : organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat
- Organisasi : kesatuan/kelompok yang terdiri atas bagian-bagian di dalam suatu perkumpulan dan sebagainya untuk mencapai tujuan bersama
- Perda : pemerintahan daerah
- Piagam : surat resmi yang berisi pernyataan atau penegasan mengenai suatu hal
- Pluralistik : banyak macam atau terdiri dari berbagai macam hal
- Proklamasi : pemberitahuan resmi kepada seluruh rakyat/pengumuman Kemerdekaan Negara Republik Indonesia 17 Agustus 1945
- Repelita : rencana pembangunan lima tahun
- Sanksi : hukuman yang diberikan kepada seseorang yang telah melanggar aturan

- Sabotase : usaha untuk menggagalkan suatu rencana dengan cara yang licik atau tidak baik
- Supremasi : kekuasaan tertinggi dalam suatu negara
- Stabilisator : sesuatu yang membuat stabil
- Teror : perbuatan sewenang-wenang
- Teroris : orang yang menggunakan kekerasan untuk menimbulkan rasa takut, biasanya untuk tujuan politik
- Vooting : pemungutan suara terbanyak

Daftar Pustaka

- Apriliyanto, Broto. 2005. *Laporan Hasil Observasi Program Pengalaman Lapangan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kristen I Surakarta Tahun 2005/2006*. Surakarta: UNS Press.
- Arifin, Firmansyah, dkk. 2005. *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara*. Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional dan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2003. *Kamus Besar Bahasa Indonesia: Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Hartanti, Evi. 2005. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hasibuan, S.P. Malayu. 1996. *Organisasi dan Motivasi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Joeniarto, S.P. 2001. *Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kompas, Minggu, 8 Juli 2007.
- Nodoeng, Supardan. 2004. *Teknik Perundang-undangan Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Redaksi Puspa Swara. 2006. *Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Perubahannya*. Jakarta: Puspa Swara.
- Sumarsono, S. dkk. 2001. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Tim Penulis Ensiklopedi Anak Nasional. 2005. *Ensiklopedi Anak Nasional*. Jakarta: PT. Delta Pamungkas.
- Tim Penulis Ensiklopedi Nasional Indonesia. 2004. *Ensiklopedi Nasional Indonesia*. Jakarta: PT. Delta Pamungkas.
- Tim Penulis Ensiklopedi Geografi. 2006. *Ensiklopedi Geografi Dunia untuk Pelajar dan Umum 1 - 6*. Jakarta: PT. Lentera Abadi.



Pendidikan Kewarganegaraan

untuk SD/MI Kelas V

ISBN 979-462-956-1

Buku ini telah dinilai oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) dan telah dinyatakan layak sebagai buku teks pelajaran berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2008 tanggal 10 Juli 2008 tentang Penetapan Buku Teks Pelajaran yang Memenuhi Syarat Kelayakan untuk Digunakan dalam Proses Pembelajaran

HET (Harga Eceran Tertinggi) Rp. 9.309,00